



Katalog BPS: 3301001

# INDIKATOR PERUMAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2011



Badan Pusat Statistik, Jakarta - Indonesia



# INDIKATOR PERUMAHAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2011



# **Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2011**

ISSN: 2302-5905

No. Publikasi: 04230.1201

Katalog BPS: 3301001

Ukuran Buku: 18,2 cm x 25,7 cm

Jumlah Halaman: 132 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh:

BPS RI, Jakarta-Indonesia

**Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya**

## KATA PENGANTAR

Data perumahan dan kesehatan lingkungan sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil-hasil pembangunan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal perbaikan kualitas tempat tinggal.

Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2011 ini merupakan lanjutan publikasi sejenis yang pernah diterbitkan pada tahun 2005, 2007, dan 2009, dengan sumber data utama dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Data yang disajikan meliputi kondisi fisik bangunan, fasilitas perumahan, dan kesehatan lingkungan perumahan.

Dengan terbitnya buku ini diharapkan sebagian kebutuhan data, khususnya yang terkait dengan perumahan dan kesehatan lingkungan dapat dipenuhi. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mengusahakan terwujudnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Jakarta, Oktober 2012

**Kepala Badan Pusat Statistik**



**Dr. Suryamin M.Sc**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	viii
<b>Daftar Peta</b> .....	Ix
<b>Daftar Tabel Lampiran</b> .....	x
<b>Bab I    Pendahuluan</b> .....	1
1.1    Umum.....	3
1.2    Sistematika Penyajian.....	5
1.3    Ruang Lingkup.....	5
1.4    Sumber Data.....	5
1.5    Definisi Operasional.....	6
<b>Bab II   Kondisi Fisik bangunan</b> .....	11
2.1    Status Kepemilikan Rumah.....	13
2.2    Rumah Layak Huni.....	16
2.3    Jenis Atap.....	18
2.4    Jenis Dinding.....	19
2.5    Jenis dan Luas Lantai.....	21
<b>Bab III  Fasilitas Perumahan</b> .....	41
3.1    Sumber Air Minum.....	43
3.1.1  Air Minum Layak.....	45
3.1.2  Air Kemasan.....	48

3.2	Sumber Penerangan.....	49
3.3	Tempat Buang Air Besar.....	51
<b>Bab IV</b>	<b>Kesehatan Lingkungan</b>	<b>89</b>
4.1	Kesehatan Perumahan.....	91
	4.1.1 Rumah Tangga Kumuh.....	91
	4.1.2 Permukiman kumuh.....	93
4.2	Kualitas Lingkungan.....	95
	4.2.1 Sarana Kebersihan Lingkungan.....	95
	4.2.2 Pencemaran Limbah Padat.....	98
4.3	Penyakit Akibat Sanitasi yang Kurang Baik.....	100
	4.3.1 Penyakit Malaria.....	100
	4.3.2 Penyakit Demam Berdarah.....	101
	4.3.3 Penyakit Diare.....	103



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman	
<b>Kondisi Fisik Bangunan</b>		
1	Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2011.....	14
2	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri menurut Status Hukum Tanah, 2011.....	16
3	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Tembok, 2009-2011.....	20
4	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang Dari 10 m <sup>2</sup> menurut Tipe Daerah, 2009-2011.....	22
<b>Fasilitas Perumahan</b>		
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, 2011.....	46
6	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Kemasan sebagai Sumber Air Minum, 2009-2011.....	48
7	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Leding sebagai Sumber Air Minum, 2009-2011.....	49
8	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah, 2011.....	52
9	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja dan Tipe Daerah, 2011.....	52
10	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja dan Tipe Daerah, 2011.....	53
11	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011.....	55

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
<b>Kondisi Fisik Bangunan</b>	
2.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri, 2009 - 2011.....	15
2.2 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni, 2009-2011.....	17
2.3 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni, 2009-2011.....	18
2.4 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Bambu, 2009-2011.....	20
2.5 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berlantai Tanah, 2009-2011.....	21
<b>Fasilitas Perumahan</b>	
3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum, 2009-2011.....	45
3.2 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, 2009-2011.....	47
3.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik Menurut Tipe Daerah, 2009-2011.....	50
3.4 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa Menurut Tipe Daerah, 2009-2011.....	55
3.5 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2009-2011.....	57
<b>Kesehatan Lingkungan</b>	
4.1 Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Tipe Daerah di Indonesia, Tahun 2008-2011.....	92
4.2 Persentase Desa yang Memiliki Permukiman Kumuh Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2008.....	94

4.3	Persentase Desa yang Memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Menurut Provinsi di Indonesia, Tahun 2008.....	97
4.4	Persentase Sampah yang Tertanggulangi Menurut Kota di Indonesia, Tahun 2010.....	98
4.5	Persentase Desa Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah dan Letak Geografis Desa di Indonesia, Tahun 2008.....	99
4.6	Annual Parasite Incidence (API) Malaria dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak di Indonesia, Tahun 2007-2010.....	100
4.7	Incidence Rate per 100.000 penduduk dan Case Fatality Rate Demam Berdarah di Indonesia, Tahun 2006-2010.....	102
4.8	Case Fatality rate Diare dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak di Indonesia, Tahun 2006-2010.....	103

## DAFTAR PETA

Peta	Halaman	
<b>Fasilitas Perumahan</b>		
3.1	Persebaran Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Listrik Menurut Provinsi, 2011	51

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>	
<b>Kondisi Fisik Bangunan</b>		
2.1	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan).....	23
2.2	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Pedesaan).....	24
2.3	Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan+Pedesaan).....	25
2.4	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan).....	26
2.5	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Pedesaan).....	27
2.6	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan+Pedesaan).....	28
2.7	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Atap Ijuk/Daun-daunan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan).....	29
2.8	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Atap Ijuk/Daun-daunan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Pedesaan).....	30
2.9	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Atap Ijuk/Daun-daunan menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan+Pedesaan).....	31
2.10	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Dinding dari Bambu menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan).....	32

2.11	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Dinding dari Bambu menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perdesaan).....	33
2.12	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Dinding dari Bambu menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	34
2.13	Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan).....	35
2.14	Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perdesaan).....	36
2.15	Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan)....	37
2.16	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang dari 10 m <sup>2</sup> menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan).....	38
2.17	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang dari 10 m <sup>2</sup> menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perdesaan).....	39
2.18	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang dari 10 m <sup>2</sup> menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	40

### **Fasilitas Perumahan**

3.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, 2011 (Perkotaan).....	58
3.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, 2011 (Perdesaan).....	60
3.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, 2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	62
3.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses terhadap Air Minum Layak, 2009-2011 (Perkotaan).....	64
3.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses terhadap Air Minum Layak, 2009-2011 (Perdesaan).....	65

3.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses terhadap Air Minum Layak, 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	66
3.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan, 2011 (Perkotaan).....	67
3.8	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan, 2011 (Perdesaan).....	68
3.9	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan, 2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	69
3.10	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik, 2009-2011 (Perkotaan).....	70
3.11	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik, 2009-2011 (Perdesaan).....	71
3.12	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik, 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan)....	72
3.13	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2011 (Perkotaan).....	73
3.14	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2011 (Perdesaan).....	74
3.15	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2011 (Perkotaan+Perdesaan).	75
3.16	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Tidak Ada Fasilitas Tempat Buang Air Besar , 2009-2011 (Perkotaan).....	76
3.17	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Tidak Ada Fasilitas Tempat Buang Air Besar , 2009-2011 (Perdesaan).....	77
3.18	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Tidak Ada Fasilitas Tempat Buang Air Besar , 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	78
3.19	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2011 (Perkotaan).....	79
3.20	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2011 (Perdesaan).....	80

3.21	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	81
3.22	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011 (Perkotaan).....	82
3.23	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011 (Perdesaan).....	83
3.24	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan)...	84
3.25	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2009-2011 (Perkotaan).....	85
3.26	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2009-2011 (Perdesaan).....	86
3.27	Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2009-2011 (Perkotaan+Perdesaan).....	87

### **Kesehatan Lingkungan**

4.1	Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi dan Tipe Daerah di Indonesia, Tahun 2011.....	105
4.2	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Permukiman Kumuh di Indonesia, Tahun 2008 (Pesisir).....	106
4.3	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Permukiman Kumuh di Indonesia, Tahun 2008 (Bukan Pesisir).....	107
4.4	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Permukiman Kumuh di Indonesia, Tahun 2008 (Pesisir+Bukan Pesisir).....	108
4.5	Hasil Output SPSS Uji Beda Proporsi Desa yang Memiliki Permukiman Kumuh di Daerah Pesisir dan Bukan Pesisir.....	109
4.6	Jumlah Truk Sampah, Gerobak Sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Menurut Kota di Indonesia, Tahun 2010.....	110
4.7	Persentase Desa yang Memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Menurut Provinsi dan Letak Geografis Desa di Indonesia, Tahun 2008.....	111

4.8	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Indonesia, Tahun 2008 (Pesisir).....	112
4.9	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Indonesia, Tahun 2008 (Bukan Pesisir).....	113
4.10	Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Indonesia, Tahun 2008 (Pesisir+Bukan Pesisir).....	114
4.11	<i>Annual Paracite Insidence</i> (API) Malaria Menurut Provinsi, Tahun 2007-2010.....	115
4.12	Hasil Output SPSS Uji Korelasi antara Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak dan API malaria.....	116
4.13	<i>Incidence Rate</i> dan <i>Case Fatality Rate</i> Demam Berdarah di Indonesia Tahun 2010.....	117



# **1** PENDAHULUAN

<http://www.bps.go.id>



# 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Umum

Sebelum manusia mengenal bangunan yang disebut rumah, manusia bermukim di tempat-tempat yang telah tersedia secara alami. Namun, dengan meningkatnya teknologi maka manusia saat ini dapat bermukim di suatu bangunan yang disebut rumah sehingga terbentuk daerah perumahan ataupun permukiman. Dengan terbentuknya permukiman penduduk, maka mulai timbul permasalahan kesehatan yang berhubungan dengan permukiman ini. Segala macam permasalahan kesehatan lingkungan selalu ada di lingkungan permukiman, sekalipun dalam skala kecil seperti perlunya penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah, serta permasalahan kesehatan lainnya.

Pengertian sebenarnya dari kesehatan lingkungan ternyata lebih luas daripada pengertian sanitasi yang dikenal sehari-hari. Selama ini pengertian kesehatan lingkungan hanya tertuju kepada lingkungan fisik (*physical environment*) yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah berkembang. Sebenarnya tidak demikian, kebutuhan akan lingkungan yang sehat dan aman juga dibutuhkan oleh masyarakat di semua negara dan semua lapisan masyarakat. Mungkin perbedaan bisa terjadi pada tingkat perkembangannya yang ditentukan oleh tingkat pendidikan masyarakat, kepadatan penduduk, dan faktor-faktor lain.

Usaha kesehatan lingkungan merupakan salah satu usaha dari enam usaha dasar kesehatan masyarakat, yaitu pemeliharaan dokumen kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, kesejahteraan ibu dan anak, serta pelayanan medis dan perawatan kesehatan. Usaha kesehatan lingkungan tersebut antara lain adalah program/kegiatan penyediaan air minum, pengolahan dan pembuangan limbah, pencegahan penyebaran penyakit, pengelolaan kualitas lingkungan permukiman. Usaha kesehatan lingkunganpun memerlukan data tentang keadaan kependudukan, sosial ekonomi, pendidikan, dan sebagainya.

Karena kebutuhan terhadap lingkungan yang sehat dan nyaman pada awalnya tidak dapat dipenuhi dengan cukup, maka lambat laun akhirnya

berpengaruh terhadap nilai-nilai kuantitasnya. Sebagai contoh, kebutuhan tanah yang semakin tinggi seiring dengan pertumbuhan penduduk yang demikian cepat di suatu daerah, akan mengakibatkan setiap keluarga tidak memiliki kesempatan untuk memiliki rumah yang layak karena terbatasnya tanah. Demikian pula kebutuhan terhadap air, baik untuk minum maupun kebutuhan rumah tangga yang lain (mandi, cuci pakaian, dll).

Mengingat pentingnya peranan kesehatan lingkungan terhadap penduduk, para ahli Ilmu Kesehatan Masyarakat senantiasa menempatkan kesehatan lingkungan sebagai basis yang utama dalam setiap kesempatan program kesehatan. Di Indonesia kebijakan pembangunan kesehatan sudah memberi ruang khusus dalam penekanan pentingnya kesehatan lingkungan sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Secara khusus Departemen Kesehatan dan Badan Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan sebagai instansi pelaksana sektor kesehatan dan lingkungan sudah memberikan perhatian khusus dengan membentuk unit kerja khusus untuk menangani masalah kesehatan lingkungan. Hal serupa juga dilakukan di daerah-daerah secara paralel sehingga program pembangunan kesehatan lingkungan bisa segera diterapkan dengan baik.

Kebijakan pembangunan kesehatan lingkungan selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program-program antara lain penyediaan air bersih yang terjangkau masyarakat, pembangunan sarana/infrastruktur dengan kelengkapan saluran pembuangan kotoran (*waste disposal*), perlindungan distribusi makanan dan bahan-bahan makanan, peraturan dan perundangan yang berpihak pada lingkungan, dan lain-lain. Program pembangunan kesehatan lingkungan meliputi pula berbagai program sosial ekonomi, bahkan budaya, karena pada dasarnya hal ini menjadi kewajiban lintas sektor yang terintegrasi.

Publikasi ini menyajikan indikator perumahan dan menggambarkan sebagian dari capaian pembangunan kesehatan lingkungan. Isi publikasi dirasakan masih sangat terbatas baik substansi, maupun penyajiannya. Oleh karena itu, upaya untuk menjadikannya lebih bermanfaat akan terus diupayakan. Informasi ini diharapkan

bermanfaat bagi banyak pihak, terutama para pengambil keputusan, perencana, dan pengguna data lainnya.

## **1.2. Sistematika Penyajian**

Penyajian “Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2011” terdiri dari empat bab yaitu:

Bab I: Pendahuluan, menguraikan mengenai penjelasan umum, sistematika penyajian, ruang lingkup, sumber data, dan definisi operasional.

Bab II: Kondisi Fisik Bangunan, meliputi sub bab: status kepemilikan rumah, rumah layak huni, jenis atap, jenis dinding, serta jenis dan luas lantai.

Bab III: Fasilitas Perumahan, meliputi sub bab: sumber air minum, sumber penerangan, dan tempat buang air besar.

Bab IV: Kesehatan Lingkungan, meliputi sub bab: kesehatan perumahan, kualitas lingkungan, dan penyakit akibat sanitasi yang kurang baik.

Lampiran: Tabel-tabel utama yang diolah dari Susenas (kor) 2009-2011 disajikan menurut provinsi dan daerah tempat tinggal.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Data yang disajikan dalam Publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan tahun 2011 ini menyajikan gambaran kondisi perumahan dan sebagian kesehatan lingkungan pada tingkat nasional dan provinsi. Beberapa data sektor ditambahkan untuk melengkapi analisis dan disajikan pada tingkat nasional.

## **1.4. Sumber Data**

Data yang disajikan dalam penyusunan publikasi ini merupakan data primer yang berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor tahun 2009-2011. Susenas merupakan kegiatan survei yang dilakukan BPS setiap tahun untuk mengumpulkan data sosial ekonomi penduduk yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah sampel Susenas 2011 sebanyak 285.904 rumah tangga tersebar di

daerah perkotaan dan perdesaan. Dalam publikasi ini jumlah sampel yang diolah merupakan jumlah sampel hasil validasi sebesar 282.387 rumah tangga.

Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun mencakup data kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga serta perumahan dan lingkungan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul mencakup konsumsi/pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman, serta sosial budaya, dan kesejahteraan rumah tangga.

Modul Perumahan berisi keterangan mengenai penguasaan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan, fasilitas dan perlengkapan, serta kondisi lingkungan.

Selain bersumber dari hasil survei, publikasi ini juga menggunakan data yang berasal dari catatan administrasi kementerian/instansi pemerintah di luar BPS sebagai sumber data sekunder antara lain dari Kementerian Kesehatan.

### 1.5. Definisi Operasional

**Atap** adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan, dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.

**Ijuk/rumbia** adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enu atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.

#### **Dinding**

**Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

**Bambu/rumbia** adalah dinding yang terbuat dari bambu atau rumbia. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.

## **Lantai**

### **Jenis Lantai Terluas**

Yang dimaksud dengan lantai di sini adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik terbuat dari papan, semen, maupun ubin. Dalam hal ini jenis lantai terluas hanya dibedakan dalam dua kategori, yaitu tanah dan bukan tanah

**Luas lantai** yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung). Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati.

Bila satu tempat tinggal dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga (rt), maka luas lantai hunian setiap rt adalah luas lantai dari ruangan yang dipakai bersama dibagi banyaknya rt ditambah dengan luas lantai pribadi rt yang bersangkutan.

### **Air minum layak**

Air minum layak adalah air yang bersumber dari leding eceran/meteran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (tangki septik)  $\geq 10$  m, dan air hujan.

### **Rumah Tidak Layak Huni**

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Luas lantai perkapita kurang dari  $7,2 \text{ m}^2$
2. Jenis atap rumah terbuat dari daun atau lainnya.
3. Jenis dinding rumah terbuat dari bambu atau lainnya.
4. Jenis lantai tanah.
5. Tidak mempunyai fasilitas buang air besar (WC sendiri)
6. Sumber penerangan bukan listrik.
7. Tidak mempunyai tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik
8. Tidak menggunakan air layak untuk air minum

### **Sumber penerangan**

**Listrik PLN** adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN.

**Bukan listrik** adalah sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, dan aladin, lampu minyak tanah lainnya (lampu teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya), lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri.

### **Fasilitas Buang Air Besar**

**Fasilitas tempat buang air besar** adalah ketersediaan jamban/kakus yang dapat digunakan oleh rumah tangga responden.

**Kloset leher angsa** adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf "U" (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Kloset selain leher angsa dapat berupa plengsengan dan cemplung/cubluk.

### **Tempat Penampungan Akhir kotoran/Tinja**

**Tangki** adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota.

### **Kualitas Air Minum**

**Jernih/bening**, bila air dituang dalam gelas bening tidak terlihat adanya benda-benda kecil yang bercampur menjadi satu.

**Berwarna**, bila air tampak keruh (bening/jernih) tetapi berwarna.

**Berasa**, bila air memberi rasa tertentu, seperti : asin, anta, payau.

**Berbusa**, bila air mengeluarkan busa/buih yang cukup banyak (seperti tercampur deterjen) pada waktu dituang ke suatu tempat (gelas).

**Berbau**, bila air mengeluarkan bau tertentu.



### **Bahan beracun dan berbahaya (B3)**

**B3** adalah suatu bahan kimia yang memiliki sifat-sifat mudah terbakar, dapat menyebabkan keropos karena oksidasi (korosi), bisa meledak dan bersifat racun. Karena membahayakan manusia dan lingkungan, maka cara pembuangannya tidak boleh disamakan dengan limbah rumah tangga lainnya. B3 ini bisa berbentuk padat, cair, atau gas.

Beberapa produk B3 yang dikenal masyarakat dan dipakai oleh rumah tangga antara lain: pengharum ruangan, pembasmi serangga (spray), cat rumah yang mengandung timah hitam (Pb) dan *cadmium* (Cd), pembersih noda lantai atau kamar mandi, pembasmi hama, aki, dan lain-lain.

### **Keadaan air got/selokan di sekitar rumah**

**Lancar**, bila air got/selokan itu mengalir lancar sehingga air yang ada di got tersebut bergerak, termasuk di sini bila gotnya tidak berair (kering).

Keadaan selain di atas dianggap tidak lancar.

### **Tempat Penampungan Air Limbah/Mandi/Cuci**

**Penampungan tertutup di pekarangan** yaitu penampungan limbah rumah tangga yang berupa lubang (biasanya pinggirannya disemen) dan diberi penutup.

**Penampungan yang tidak memenuhi syarat kesehatan** yaitu penampungan yang tidak diberi penutup, terletak di luar pekarangan atau dibuang langsung ke selokan/got/sungai/waduk/laut tanpa memperhatikan ada tidaknya bak penampungan.

### **Sarana Pembuangan Air Limbah /Mandi/Cuci**

**Saluran tertutup di pekarangan** adalah saluran limbah cair yang dibuat secara tertutup seperti dengan menggunakan pipa plastik, pipa besi, atau got tertutup dan berada di pekarangan.

**Saluran tertutup di luar pekarangan** adalah saluran limbah cair yang dibuat secara tertutup seperti dengan menggunakan pipa plastik, pipa besi, atau got tertutup dan berada di luar pekarangan.

**Saluran yang tidak sehat** adalah saluran limbah cair yang dibuat secara terbuka seperti got terbuka baik berada di dalam ataupun luar pekarangan, atau langsung dibuang tanpa melalui saluran.

### **Indikator Penyakit Malaria**

**Annual Parasite Incidence (API)** adalah indikator yang memantau penanggulangan penyakit malaria untuk Jawa-Bali dengan cara mendatangi warga yang mengeluh gejala klinis Malaria (aktif).

**Annual Malaria Incidence (AMI)** adalah indikator yang memantau penanggulangan penyakit malaria untuk luar Jawa-Bali dengan cara menunggu pasien datang berobat ke pelayanan kesehatan (pasif).

## **2** **KONDISI FISIK BANGUNAN**

<http://www.pps-go.id>



## **2** Kondisi Fisik Bangunan

Salah satu kebutuhan dasar manusia yang perlu diperhatikan pemenuhannya adalah rumah. Hal ini disebabkan rumah memiliki beberapa fungsi utama rumah diantaranya sebagai tempat tinggal sekaligus tempat membina dan membentuk manusia berkepribadian dan berkebudayaan. Dalam fungsinya sebagai tempat tinggal, rumah merupakan tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas serta merupakan tempat proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Oleh karena itu, kondisi fisik bangunan rumah perlu dirancang sedemikian rupa sehingga aman dan nyaman untuk ditinggali. Kondisi fisik bangunan yang akan dibahas dalam bab ini terdiri dari beberapa komponen fisik utama yaitu jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan luas lantai yang secara umum dapat menggambarkan kualitas bangunan tempat tinggal. Selain itu, status kepemilikan rumah berpengaruh pada kualitas rumah karena ada kecenderungan bahwa kepemilikan rumah akan membuat penghuni rumah berusaha selalu memperbaiki kualitas rumah.

### **2.1. Status Kepemilikan Rumah**

Tempat tinggal merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan setiap orang atau suatu rumah tangga. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut tidak semua orang dapat memenuhinya dengan mudah. Kondisi ekonomi akan sangat memberikan pengaruh, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan mudah dengan kondisi yang baik dan permanen. Hal ini tentu saja akan berlawanan dengan mereka yang berpenghasilan lebih rendah, atau bahkan rumah tangga miskin.

Perbedaan yang ada tersebut menyebabkan ada rumah tangga yang sudah memiliki sendiri rumah yang ditempatinya, menempati rumah tanpa mengeluarkan uang, masih menyewa atau mengontrak rumah, atau yang lainnya. Menurut hasil Susenas 2011 rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 78,77 persen, sisanya 21,23 persen rumah tangga menempati rumah bukan milik sendiri.

Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari menempati rumah milik orang tua (8,76 persen), kontrak (4,12 persen), sewa (4,55 persen), rumah dinas (1,65 persen), bebas sewa (1,96 persen), dan lainnya (0,19 persen). Persentase rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri di daerah perkotaan (30,38 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perdesaan (12,25 persen). Keadaan ini banyak dipengaruhi oleh rumah tangga yang mengontrak, sewa, dan menempati rumah milik orang tua/saudara. Diduga mahalannya harga jual rumah di perkotaan dan rendahnya daya beli menyebabkan sebagian penduduk terpaksa menempati rumah bukan milik sendiri.

**Tabel 1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Tempat Tinggal, 2011**

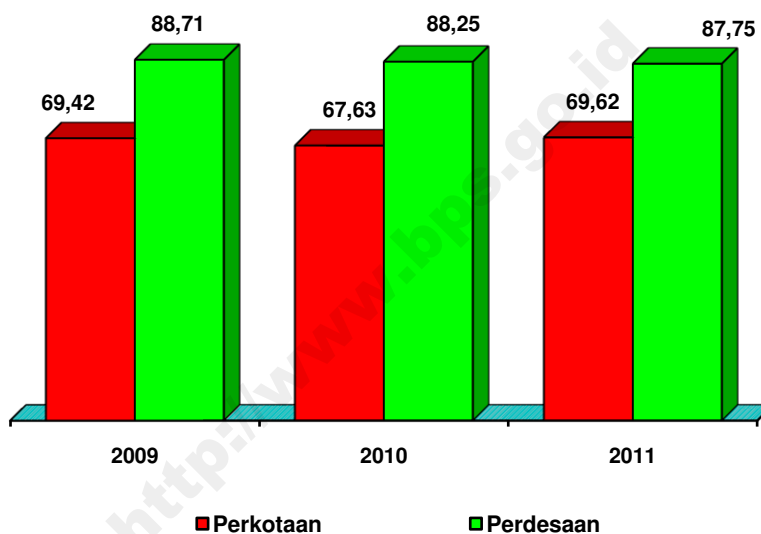
<b>Status Penguasaan Tempat Tinggal</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Milik sendiri	69,62	87,75	78,77
Kontrak	7,53	0,78	4,12
Sewa	8,50	0,68	4,55
Bebas Sewa	2,21	1,72	1,96
Rumah Dinas	1,71	1,59	1,65
Rumah milik orang tua/ sanak/saudara	10,22	7,31	8,76
Lainnya	0,21	0,16	0,19
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Susenas 2011

Jika dilihat dari status penguasaan tempat tinggal, rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan

akan tempat tinggal yang terjamin, karena cenderung lebih permanen dalam jangka panjang dibandingkan yang tidak menempati rumah milik sendiri. Dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2010 dan tahun 2011, pada Gambar 2.1 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang telah menempati rumah dengan status milik sendiri di daerah perkotaan mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2010 persentasenya sebesar 67,63 pada tahun 2011 naik menjadi 69,62 persen.

**Gambar 2.1. Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri, 2009 - 2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Jika dilihat menurut provinsi, secara nasional persentase kepemilikan rumah dengan status milik sendiri, paling rendah ditemui di Provinsi DKI Jakarta (46,63 persen).

Status hukum tanah tempat tinggal dari rumah tangga yang memiliki rumah sendiri, sebagian besar sudah berupa hak milik (90,46 persen). Persentase di perdesaan relatif sama dengan daerah perkotaan (90,76 persen berbanding 90,07 persen). Dari sebanyak 9,54 persen rumah tangga yang tanahnya belum berstatus

hak milik, ada 1,98 persen yang berstatus hak guna bangunan, hak pakai 3,86 persen, dan lainnya 3,70 persen.

**Tabel 2. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Milik Sendiri Menurut Status Hukum Tanah, 2011**

<b>Status hukum tanah</b>	<b>Perkotaan</b>	<b>Perdesaan</b>	<b>Perkotaan + Perdesaan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Hak milik	90,07	90,76	90,46
Hak guna bangunan	2,98	1,21	1,98
Hak pakai	3,29	4,31	3,86
Lainnya	3,67	3,73	3,70

Sumber: BPS, Susenas 2011

## **2.2. Rumah Layak Huni**

Tempat tinggal bukan hanya untuk berlindung dari cuaca atau iklim yang buruk. Tetapi juga merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang terdekat di dalam suatu rumah tangga.

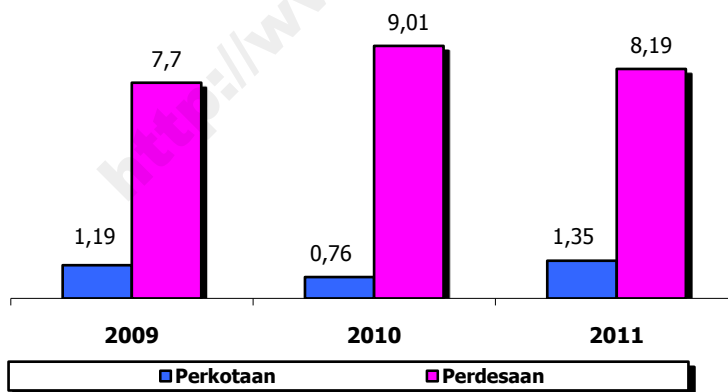
Ruang di mana keluarga beraktivitas, harus dapat memberi suasana kondusif bagi pembentukan generasi bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu, masalah rumah yang layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian yang baik.



Kriteria rumah dikatakan tidak layak huni pada tulisan ini apabila kondisi rumah:

- Luas lantai perkapita < 7,2 m<sup>2</sup>
- Jenis atap rumah terbuat dari daun/lainnya
- Jenis dinding rumah terbuat dari bambu/lainnya
- Jenis lantai tanah
- Sumber penerangan bukan listrik
- Jarak sumber air minum utama ke tempat pembuangan kotoran/tinja kurang dari 10 m
- Tidak mempunyai fasilitas buang air besar (wc sendiri)
- Tidak mempunyai tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik

**Gambar 2.2. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Gambar 2.2, menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni selama periode 2010-2011 di perkotaan mengalami kenaikan, yaitu dari 0,76 persen pada tahun 2010 menjadi 1,35 persen di tahun 2011,

sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan yaitu 9,01 persen pada tahun 2010 menjadi 8,19 persen di tahun 2011.

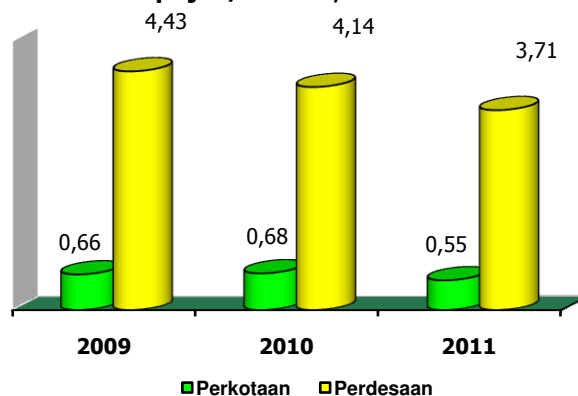
Selanjutnya bila dilakukan perbandingan pada tingkat provinsi rumah tidak layak huni paling banyak dijumpai di Provinsi Papua yaitu mencapai 46,27 persen dengan komposisi di daerah perkotaan sebesar 1,58 persen dan di daerah perdesaan 60,46 persen.

### 2.3. Jenis Atap

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas tempat tinggal adalah jenis bahan atap yang digunakan. Atap berfungsi melindungi secara langsung penghuni rumah dari cuaca yang tidak diinginkan seperti panas dan hujan. Salah satu syarat rumah layak huni adalah rumah yang menggunakan atap tidak mudah bocor.

Jenis atap genteng/seng/asbes masih menjadi pilihan utama penduduk Indonesia dalam membuat rumah. Hasil Susenas tahun 2011 menunjukkan bahwa lebih dari 90 persen rumah tangga menggunakan jenis atap genteng/seng/asbes. Namun, masih terdapat 2,14 persen rumah tangga menggunakan jenis atap yang tergolong tidak memenuhi syarat kesehatan yaitu atap berupa ijuk/rumbia. Jenis atap tersebut sebagian besar digunakan di daerah perdesaan yaitu sebesar 3,71 persen, sedangkan di daerah perkotaan yang menggunakan jenis atap ini sebesar 0,55 persen.

**Gambar 2.3. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Beratap Ijuk/rumbia, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Persentase rumah tangga yang menggunakan atap berupa ijuk/rumbia tahun 2011 mengalami penurunan dibanding tahun 2010. Penurunan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga di daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara umum penggunaan ijuk/rumbia di beberapa provinsi sebesar 2,14 persen. Namun, penggunaan ijuk/rumbia di Sulawesi Barat (21,84 persen), dan Sulawesi Tengah (21,23 persen) masih di atas dua puluh persen.

Di beberapa daerah ijuk masih banyak digunakan, seperti di Bali (0,45 persen). Di mana pemanfaatan ijuk di Bali hampir semuanya untuk atap tempat suci. Seperti di Pura, Merajan, dan sebagainya.

Penggunaan ijuk di Bali hampir semuanya terserap untuk pembangunan tempat suci milik masyarakat umum maupun milik pribadi. Banyaknya penggunaan ijuk untuk atap tempat suci ini, seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat karena ijuk untuk atap ini relatif cukup mahal. Masyarakat yang ekonominya mampu, jarang menggunakan atap tempat sucinya dari bahan bangunan lainnya seperti genteng, asbes, dan lainnya kendati dari segi harga jauh lebih murah. Mereka umumnya memilih untuk menggunakan bahan ijuk, karena jauh lebih tahan lama serta klasik.

#### **2.4. Jenis Dinding**

Selain penggunaan jenis atap, kualitas tempat tinggal juga dipengaruhi oleh penggunaan jenis dinding. Penggunaan dinding dapat dikatakan memenuhi syarat rumah layak huni jika dinding tersebut tidak lembab dan tidak tembus angin. Jenis dinding yang memenuhi syarat rumah layak huni adalah tembok. Pada tahun 2011 persentase penggunaan dinding tembok di Indonesia adalah sebesar 67,56 persen.

**Tabel 3. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Tembok, 2009-2011**

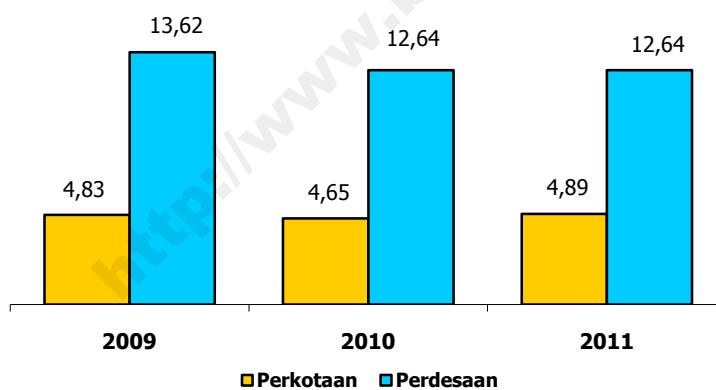
Tipe Daerah	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	82,46	83,21	82,92
Perdesaan	52,23	52,53	52,48
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>	<b>66,88</b>	<b>67,78</b>	<b>67,56</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Persentase penggunaan dinding tembok selama periode 2010-2011 relatif sama, yaitu dari 67,78 persen pada tahun 2010 menjadi 67,56 persen di tahun 2011.

Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan bambu, yaitu selama periode 2009 sampai dengan 2011 tidak mengalami fluktuasi yang mencolok.

**Gambar 2.4. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berdinding Bambu, 2009-2011**



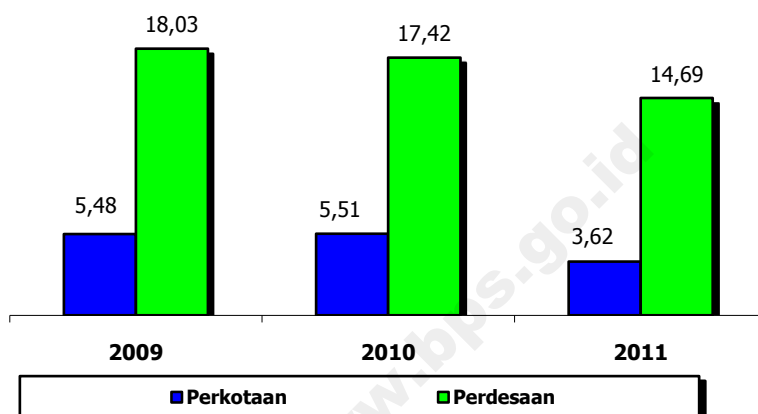
Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Jika dilihat pada tingkat provinsi, lima provinsi yang menggunakan dinding terbuat dari bambu dengan persentase terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (34,38 persen), Jawa Barat (17,76 persen), Nusa Tenggara Barat (16,89 persen), Gorontalo (16,44 persen), dan Banten (14,65 persen).

## 2.5. Jenis dan Luas Lantai

Indikator lain yang dapat menggambarkan kondisi rumah layak huni adalah jenis lantai rumah. Lantai bukan tanah dianggap lebih baik dibanding lantai tanah sehingga rumah tangga yang menggunakan lantai tanah dianggap menempati rumah tidak layak huni.

**Gambar 2.5. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Berlantai Tanah, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Gambar 2.5, menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni yang ditinjau dari kondisi lantai tanah di daerah perkotaan sebesar 3,62 persen sedangkan di daerah perdesaan masih ada 14,69 persen. Persentase rumah tangga yang menggunakan lantai tanah tahun 2011 mengalami penurunan dibanding tahun 2010. Penurunan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga di daerah perkotaan dan perdesaan.

Selanjutnya bila dilakukan perbandingan pada tingkat provinsi rumah berlantai tanah paling banyak dijumpai di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu mencapai 34,19 persen dengan komposisi di daerah perkotaan sebesar 8,24 persen dan di daerah perdesaan 40,40 persen.

Selain jenis lantai, indikator lain yang dapat digunakan untuk memastikan kondisi rumah layak huni adalah luas lantai. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat hubungannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

**Tabel 4. Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang Dari 10 m<sup>2</sup> Menurut Tipe Daerah, 2009-2011**

Tipe Daerah	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	24,82	25,44	24,71
Perdesaan	22,84	22,14	22,72
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>	<b>23,8</b>	<b>23,78</b>	<b>23,71</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Menurut *American Public Health Association* yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, ukuran luas lantai yang ideal digunakan per orang minimal adalah 10 m<sup>2</sup>. Artinya luas lantai yang digunakan oleh satu rumah tangga yang terdiri dari 5 orang harus minimal 50 m<sup>2</sup>. Berpedoman pada kriteria di atas, pada tahun 2011 terdapat 23,71 persen rumah tangga di Indonesia masih tinggal di rumah dengan rata-rata luas lantai per orang kurang dari 10 m<sup>2</sup>, dengan komposisi di perkotaan sebesar 24,71 persen dan di perdesaan sebesar 22,72 persen.

Perbandingan antar provinsi menunjukkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 10 m<sup>2</sup> tertinggi, yaitu sebesar 69,08 persen.

**Tabel 2.1 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	65,81	62,41	65,64
Sumatera Utara	59,30	60,11	57,39
Sumatera Barat	51,67	57,61	61,38
R i a u	54,66	54,81	54,27
Kepulauan Riau	58,01	63,55	59,35
J a m b i	63,54	64,93	67,29
Sumatera Selatan	59,51	60,80	64,73
Kep Bangka Belitung	71,51	73,57	71,46
Bengkulu	63,52	63,50	67,30
Lampung	72,39	75,14	74,65
DKI Jakarta	48,02	45,25	46,63
Jawa Barat	70,67	67,95	72,32
Banten	64,28	64,34	68,66
Jawa Tengah	82,39	80,83	81,17
DI Yogyakarta	69,50	65,05	69,38
Jawa Timur	80,90	78,88	79,63
B a l i	67,47	60,15	60,44
Nusa Tenggara Barat	77,78	77,99	80,19
Nusa Tenggara Timur	61,34	62,53	68,05
Kalimantan Barat	74,60	72,08	74,38
Kalimantan Tengah	63,72	61,35	63,24
Kalimantan Selatan	61,13	60,75	61,52
Kalimantan Timur	55,63	55,82	57,04
Sulawesi Utara	60,67	62,66	60,84
Gorontalo	61,72	64,26	67,38
Sulawesi Tengah	60,68	62,37	65,81
Sulawesi Selatan	61,70	67,66	69,37
Sulawesi Barat	83,40	75,85	78,55
Sulawesi Tenggara	66,27	65,00	67,44
Maluku	63,04	60,16	68,03
Maluku Utara	64,97	68,15	70,93
Papua	42,22	50,66	46,85
Papua Barat	42,51	50,89	48,09
<b>Indonesia</b>	<b>69,42</b>	<b>67,63</b>	<b>69,62</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.2 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	81,99	82,08	83,97
Sumatera Utara	74,18	72,69	72,75
Sumatera Barat	74,42	75,32	74,40
R i a u	79,80	74,00	75,11
Kepulauan Riau	87,51	85,13	79,03
J a m b i	82,45	82,10	81,02
Sumatera Selatan	85,01	83,79	82,81
Kep Bangka Belitung	89,59	87,97	89,86
Bengkulu	84,76	84,45	83,08
Lampung	90,73	90,38	89,95
DKI Jakarta			
Jawa Barat	88,32	89,51	88,06
Banten	89,84	90,11	90,89
Jawa Tengah	94,13	93,55	92,98
DI Yogyakarta	96,71	94,79	92,40
Jawa Timur	94,90	94,12	92,80
B a l i	89,65	89,03	85,76
Nusa Tenggara Barat	89,06	89,10	88,76
Nusa Tenggara Timur	90,27	88,86	91,27
Kalimantan Barat	90,01	89,00	89,13
Kalimantan Tengah	83,74	78,42	81,07
Kalimantan Selatan	84,31	83,10	82,42
Kalimantan Timur	82,88	77,21	77,76
Sulawesi Utara	82,01	83,06	83,53
Gorontalo	81,27	79,79	83,94
Sulawesi Tengah	87,03	87,45	87,95
Sulawesi Selatan	90,47	90,65	90,07
Sulawesi Barat	88,40	86,33	88,90
Sulawesi Tenggara	89,26	88,94	90,87
Maluku	84,67	83,75	86,06
Maluku Utara	88,79	87,72	88,42
Papua	87,34	92,31	91,27
Papua Barat	78,18	67,76	74,96
<b>Indonesia</b>	<b>88,71</b>	<b>88,25</b>	<b>87,75</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011



**Tabel 2.3 Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Tempat Tinggal Milik Sendiri Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	77,46	76,59	78,80
Sumatera Utara	67,34	66,58	65,43
Sumatera Barat	66,55	68,53	69,42
R i a u	67,25	66,56	67,11
Kepulauan Riau	71,86	67,09	62,72
J a m b i	76,47	76,98	76,98
Sumatera Selatan	75,51	75,89	76,63
Kep Bangka Belitung	80,91	80,75	80,89
Bengkulu	77,36	78,05	78,35
Lampung	85,97	86,70	86,23
DKI Jakarta	48,02	45,25	46,63
Jawa Barat	78,09	75,67	77,94
Banten	74,20	72,33	75,96
Jawa Tengah	88,45	87,88	87,64
DI Yogyakarta	78,63	74,50	76,51
Jawa Timur	88,09	87,05	86,62
B a l i	76,84	71,28	70,25
Nusa Tenggara Barat	84,34	84,46	85,26
Nusa Tenggara Timur	85,36	83,74	86,78
Kalimantan Barat	85,82	84,00	84,85
Kalimantan Tengah	76,93	72,68	75,20
Kalimantan Selatan	74,79	73,78	73,74
Kalimantan Timur	66,05	63,88	64,93
Sulawesi Utara	72,75	73,73	73,21
Gorontalo	75,10	74,44	78,14
Sulawesi Tengah	81,50	81,34	82,71
Sulawesi Selatan	81,11	82,40	82,59
Sulawesi Barat	86,77	83,99	86,65
Sulawesi Tenggara	83,94	82,32	84,56
Maluku	78,96	74,57	79,18
Maluku Utara	81,74	82,27	83,84
Papua	77,35	81,71	80,57
Papua Barat	67,71	62,75	67,23
<b>Indonesia</b>	<b>79,36</b>	<b>78,00</b>	<b>78,77</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.4 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,62	0,61	1,77
Sumatera Utara	0,38	0,36	0,87
Sumatera Barat	0,57	0,57	1,50
R i a u	0,20	0,09	0,13
Kepulauan Riau	0,44	0,15	0,30
J a m b i	0,71	0,57	0,61
Sumatera Selatan	0,36	0,20	0,84
Kep Bangka Belitung	0,64	0,16	0,54
Bengkulu	0,57	0,25	0,89
Lampung	2,19	1,75	1,25
DKI Jakarta	0,28	0,03	0,16
Jawa Barat	1,54	0,80	1,92
Banten	1,62	0,51	2,05
Jawa Tengah	1,34	1,17	1,18
DI Yogyakarta	0,66	0,07	0,39
Jawa Timur	1,05	1,03	1,31
B a l i	0,60	0,51	0,66
Nusa Tenggara Barat	6,79	3,68	4,12
Nusa Tenggara Timur	4,61	2,90	5,34
Kalimantan Barat	0,22	0,05	0,22
Kalimantan Tengah	0,52	0,08	1,85
Kalimantan Selatan	0,22	0,03	0,34
Kalimantan Timur	0,17	0,15	0,18
Sulawesi Utara	1,09	0,91	1,37
Gorontalo	2,46	3,29	4,44
Sulawesi Tengah	0,26	0,55	1,60
Sulawesi Selatan	0,85	0,41	1,20
Sulawesi Barat	2,29	1,38	6,22
Sulawesi Tenggara	1,51	0,51	2,84
Maluku	3,05	1,00	3,55
Maluku Utara	2,41	0,38	0,73
Papua	2,90	2,09	1,58
Papua Barat	0,60	0,07	0,36
<b>Indonesia</b>	<b>1,19</b>	<b>0,76</b>	<b>1,35</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.5 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5,83	6,65	7,42
Sumatera Utara	5,88	8,63	7,52
Sumatera Barat	5,12	6,90	5,78
R i a u	2,32	3,95	3,22
Kepulauan Riau	1,74	1,70	3,91
J a m b i	4,02	5,44	2,97
Sumatera Selatan	6,00	8,60	6,00
Kep Bangka Belitung	2,39	4,00	2,61
Bengkulu	6,36	10,63	7,60
Lampung	6,86	7,53	5,74
DKI Jakarta			
Jawa Barat	6,64	7,75	8,07
Banten	13,28	16,95	17,29
Jawa Tengah	4,10	3,71	2,59
DI Yogyakarta	1,61	1,17	0,96
Jawa Timur	4,71	5,19	3,82
B a l i	4,48	6,90	4,42
Nusa Tenggara Barat	14,17	14,59	13,50
Nusa Tenggara Timur	46,90	45,80	42,48
Kalimantan Barat	9,40	15,00	7,87
Kalimantan Tengah	4,73	10,17	6,29
Kalimantan Selatan	2,93	4,23	5,12
Kalimantan Timur	1,21	2,70	3,11
Sulawesi Utara	5,88	5,28	7,44
Gorontalo	19,51	22,71	20,76
Sulawesi Tengah	9,46	13,57	15,48
Sulawesi Selatan	5,54	6,20	6,01
Sulawesi Barat	9,16	16,40	17,23
Sulawesi Tenggara	6,66	8,48	10,09
Maluku	16,59	15,92	17,03
Maluku Utara	18,54	10,31	14,58
Papua	51,91	61,03	60,46
Papua Barat	8,92	8,67	8,62
<b>Indonesia</b>	<b>7,70</b>	<b>9,01</b>	<b>8,19</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.6 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah Tidak Layak Huni Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4,37	4,96	5,83
Sumatera Utara	3,35	4,61	4,35
Sumatera Barat	3,54	4,47	4,14
R i a u	1,26	2,45	2,03
Kepulauan Riau	1,05	0,40	0,92
J a m b i	2,98	3,99	2,28
Sumatera Selatan	3,90	5,71	4,24
Kep Bangka Belitung	1,55	2,07	1,60
Bengkulu	4,34	7,46	5,59
Lampung	5,65	6,13	4,65
DKI Jakarta	0,28	0,03	0,16
Jawa Barat	3,68	3,29	4,12
Banten	6,14	5,61	7,06
Jawa Tengah	2,77	2,58	1,95
DI Yogyakarta	0,98	0,42	0,57
Jawa Timur	2,93	3,26	2,65
B a l i	2,24	2,97	2,12
Nusa Tenggara Barat	11,08	10,02	9,67
Nusa Tenggara Timur	39,71	37,45	35,31
Kalimantan Barat	6,90	10,58	5,65
Kalimantan Tengah	3,30	6,78	4,83
Kalimantan Selatan	1,81	2,48	3,14
Kalimantan Timur	0,57	1,11	1,30
Sulawesi Utara	3,80	3,28	4,68
Gorontalo	14,13	16,02	15,05
Sulawesi Tengah	7,53	10,39	12,19
Sulawesi Selatan	4,01	4,12	4,28
Sulawesi Barat	6,92	13,05	14,83
Sulawesi Tenggara	5,47	6,28	8,14
Maluku	13,01	10,12	11,88
Maluku Utara	13,76	7,55	10,96
Papua	41,06	46,03	46,27
Papua Barat	6,48	6,11	6,25
<b>Indonesia</b>	<b>4,55</b>	<b>4,91</b>	<b>4,80</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.7 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Atap Ijuk/Daun-daunan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	4,00	3,68	3,32
Sumatera Utara	1,87	2,78	2,01
Sumatera Barat	0,68	0,99	0,92
R i a u	0,46	0,63	0,40
Kepulauan Riau	1,63	0,68	0,94
J a m b i	2,23	1,15	0,53
Sumatera Selatan	1,42	1,53	0,98
Kep Bangka Belitung	0,94	1,53	1,20
Bengkulu	0,39	0,17	0,07
Lampung		0,30	0,05
DKI Jakarta	0,10	0,09	0,02
Jawa Barat	0,07	0,07	0,11
Banten	0,16	0,33	0,28
Jawa Tengah	0,06	0,12	0,07
DI Yogyakarta			
Jawa Timur	0,09	0,02	0,04
B a l i	0,10	0,25	0,15
Nusa Tenggara Barat	1,41	1,17	1,18
Nusa Tenggara Timur	0,66	1,08	0,27
Kalimantan Barat	2,91	3,07	2,18
Kalimantan Tengah	3,40	1,64	2,52
Kalimantan Selatan	4,32	4,66	4,21
Kalimantan Timur	1,14	0,76	0,18
Sulawesi Utara	0,86	1,84	0,98
Gorontalo	3,18	4,41	4,18
Sulawesi Tengah	7,17	5,94	8,03
Sulawesi Selatan	2,05	1,69	1,07
Sulawesi Barat	24,74	20,46	17,56
Sulawesi Tenggara	10,84	11,26	9,15
Maluku	6,11	3,04	3,26
Maluku Utara	2,41	2,13	1,16
Papua	0,81	0,69	0,81
Papua Barat	1,03	1,12	0,72
<b>Indonesia</b>	<b>0,66</b>	<b>0,68</b>	<b>0,55</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.8 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Atap Ijuk/Daun-daunan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	18,49	15,11	13,97
Sumatera Utara	8,47	9,23	7,13
Sumatera Barat	2,84	2,26	2,45
R i a u	5,29	5,40	5,99
Kepulauan Riau	14,43	19,27	13,95
J a m b i	1,87	1,10	0,84
Sumatera Selatan	4,95	4,48	3,56
Kep Bangka Belitung	4,02	6,47	3,81
Bengkulu	0,32	0,20	0,36
Lampung	0,52	0,63	0,61
DKI Jakarta			
Jawa Barat	0,58	0,20	0,70
Banten	6,05	8,31	5,41
Jawa Tengah	0,15	0,09	0,09
DI Yogyakarta			
Jawa Timur	0,16	0,12	0,03
B a l i	0,61	1,37	0,92
Nusa Tenggara Barat	3,72	2,41	2,56
Nusa Tenggara Timur	7,29	4,69	2,47
Kalimantan Barat	10,14	8,39	6,75
Kalimantan Tengah	6,68	7,06	6,90
Kalimantan Selatan	20,82	18,74	19,72
Kalimantan Timur	2,77	2,72	2,51
Sulawesi Utara	9,51	7,94	8,17
Gorontalo	19,32	19,35	14,73
Sulawesi Tengah	24,81	25,26	25,32
Sulawesi Selatan	5,71	4,54	3,55
Sulawesi Barat	23,61	25,21	23,03
Sulawesi Tenggara	24,70	23,35	17,90
Maluku	16,30	15,98	14,42
Maluku Utara	12,92	9,57	8,15
Papua	13,72	19,26	15,02
Papua Barat	8,63	3,58	4,51
<b>Indonesia</b>	<b>4,43</b>	<b>4,14</b>	<b>3,71</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.9 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Atap Ijuk/Daun-daunan Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,43	11,92	10,97
Sumatera Utara	5,43	6,09	4,69
Sumatera Barat	2,09	1,78	1,87
R i a u	2,88	3,55	3,84
Kepulauan Riau	7,63	3,73	3,17
J a m b i	1,98	1,11	0,75
Sumatera Selatan	3,64	3,47	2,68
Kep Bangka Belitung	2,54	3,99	2,54
Bengkulu	0,34	0,19	0,27
Lampung	0,38	0,55	0,47
DKI Jakarta	0,10	0,09	0,02
Jawa Barat	0,28	0,11	0,32
Banten	2,45	2,80	1,97
Jawa Tengah	0,11	0,10	0,08
DI Yogyakarta			
Jawa Timur	0,13	0,08	0,04
B a l i	0,31	0,68	0,45
Nusa Tenggara Barat	2,75	1,89	2,00
Nusa Tenggara Timur	6,17	3,98	2,05
Kalimantan Barat	8,18	6,82	5,42
Kalimantan Tengah	5,56	5,24	5,46
Kalimantan Selatan	14,05	12,87	13,27
Kalimantan Timur	1,77	1,50	1,07
Sulawesi Utara	5,76	5,15	4,90
Gorontalo	14,22	14,20	11,04
Sulawesi Tengah	21,11	20,55	21,23
Sulawesi Selatan	4,52	3,52	2,66
Sulawesi Barat	23,98	24,15	21,84
Sulawesi Tenggara	21,49	20,01	15,55
Maluku	13,61	10,94	10,16
Maluku Utara	9,81	7,50	6,32
Papua	10,87	14,54	11,60
Papua Barat	6,40	2,85	3,42
<b>Indonesia</b>	<b>2,61</b>	<b>2,42</b>	<b>2,14</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.10 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Dinding dari Bambu Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,42	0,68	0,75
Sumatera Utara	4,04	3,98	4,57
Sumatera Barat	0,29	0,84	1,20
R i a u	0,08	0,10	0,38
Kepulauan Riau	0,05	0,19	0,16
J a m b i	0,32	0,43	0,45
Sumatera Selatan	0,47	0,28	0,46
Kep Bangka Belitung	0,11	0,17	0,12
Bengkulu	3,32	1,74	5,06
Lampung	8,86	9,08	7,12
DKI Jakarta	0,19	0,25	0,13
Jawa Barat	8,62	8,52	9,27
Banten	4,34	3,68	4,67
Jawa Tengah	5,03	4,32	4,60
DI Yogyakarta	3,83	3,01	3,61
Jawa Timur	5,15	5,34	5,07
B a l i	1,96	1,77	2,07
Nusa Tenggara Barat	15,35	12,14	9,83
Nusa Tenggara Timur	14,52	15,27	15,78
Kalimantan Barat	0,18	0,14	0,10
Kalimantan Tengah	0,31	0,32	0,35
Kalimantan Selatan	0,24	0,26	0,20
Kalimantan Timur	0,19	0,13	0,22
Sulawesi Utara	2,17	2,52	2,10
Gorontalo	8,58	10,27	9,00
Sulawesi Tengah	0,42	0,20	0,81
Sulawesi Selatan	3,76	3,54	3,63
Sulawesi Barat	6,47	2,58	1,67
Sulawesi Tenggara	1,89	2,20	2,27
Maluku	1,58	0,74	0,88
Maluku Utara	0,27	0,93	0,54
Papua	0,14	0,23	0,32
Papua Barat	0,14	0,07	0,37
<b>Indonesia</b>	<b>4,83</b>	<b>4,65</b>	<b>4,89</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011



**Tabel 2.11 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Dinding dari Bambu Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	2,24	2,79	2,05
Sumatera Utara	6,65	6,00	5,94
Sumatera Barat	1,90	1,78	2,78
R i a u	0,32	0,55	0,54
Kepulauan Riau	0,17	0,36	0,14
J a m b i	0,96	0,75	0,94
Sumatera Selatan	2,83	3,01	2,32
Kep Bangka Belitung	0,51	0,33	0,48
Bengkulu	4,35	5,72	6,89
Lampung	13,00	11,54	12,19
DKI Jakarta			
Jawa Barat	30,63	31,62	33,02
Banten	34,24	36,09	35,04
Jawa Tengah	10,76	9,47	9,17
DI Yogyakarta	15,13	13,50	15,30
Jawa Timur	13,27	12,36	11,34
B a l i	5,56	6,72	6,77
Nusa Tenggara Barat	24,36	20,73	21,76
Nusa Tenggara Timur	40,44	38,43	38,83
Kalimantan Barat	0,73	0,61	0,97
Kalimantan Tengah	0,48	0,43	0,30
Kalimantan Selatan	0,56	0,50	0,61
Kalimantan Timur	0,33	0,36	0,40
Sulawesi Utara	6,66	7,06	7,65
Gorontalo	22,62	23,31	20,44
Sulawesi Tengah	3,25	3,44	3,24
Sulawesi Selatan	12,26	11,67	12,46
Sulawesi Barat	4,75	4,87	5,76
Sulawesi Tenggara	4,39	3,79	4,65
Maluku	2,77	2,68	2,01
Maluku Utara	5,06	1,92	4,02
Papua	0,87	0,78	0,44
Papua Barat	1,81	0,67	0,66
<b>Indonesia</b>	<b>13,62</b>	<b>12,64</b>	<b>12,64</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.12 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Dinding dari Bambu Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,73	2,20	1,68
Sumatera Utara	5,45	5,02	5,29
Sumatera Barat	1,35	1,42	2,17
R i a u	0,20	0,38	0,48
Kepulauan Riau	0,10	0,22	0,15
J a m b i	0,76	0,65	0,79
Sumatera Selatan	1,95	2,07	1,68
Kep Bangka Belitung	0,32	0,25	0,30
Bengkulu	3,99	4,51	6,34
Lampung	11,92	10,94	10,96
DKI Jakarta	0,19	0,25	0,13
Jawa Barat	17,88	16,79	17,76
Banten	15,94	13,73	14,65
Jawa Tengah	7,99	7,17	7,11
DI Yogyakarta	7,62	6,34	7,23
Jawa Timur	9,32	9,11	8,40
B a l i	3,48	3,68	3,89
Nusa Tenggara Barat	20,59	17,14	16,89
Nusa Tenggara Timur	36,03	33,92	34,38
Kalimantan Barat	0,58	0,47	0,72
Kalimantan Tengah	0,42	0,39	0,32
Kalimantan Selatan	0,43	0,40	0,44
Kalimantan Timur	0,25	0,22	0,29
Sulawesi Utara	4,71	4,99	5,13
Gorontalo	18,18	18,81	16,44
Sulawesi Tengah	2,65	2,65	2,67
Sulawesi Selatan	9,49	8,75	9,27
Sulawesi Barat	5,31	4,36	4,87
Sulawesi Tenggara	3,81	3,35	4,01
Maluku	2,46	1,92	1,58
Maluku Utara	3,64	1,65	3,11
Papua	0,71	0,64	0,41
Papua Barat	1,32	0,49	0,58
<b>Indonesia</b>	<b>9,36</b>	<b>8,67</b>	<b>8,80</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.13 Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,98	2,82	2,53
Sumatera Utara	2,55	2,07	1,26
Sumatera Barat	1,66	2,16	1,05
R i a u	4,16	1,71	0,54
Kepulauan Riau	2,49	1,94	0,48
J a m b i	3,33	3,25	1,11
Sumatera Selatan	2,48	2,94	1,72
Kep Bangka Belitung	1,60	2,23	0,55
Bengkulu	1,81	1,89	0,92
Lampung	6,96	7,63	3,21
DKI Jakarta	3,02	2,15	0,25
Jawa Barat	3,69	4,25	2,28
Banten	5,26	4,34	2,76
Jawa Tengah	12,63	12,37	10,69
DI Yogyakarta	4,94	3,77	3,49
Jawa Timur	6,83	8,67	5,84
B a l i	2,46	3,41	1,41
Nusa Tenggara Barat	5,73	5,48	4,33
Nusa Tenggara Timur	9,84	8,86	8,24
Kalimantan Barat	0,62	1,47	0,28
Kalimantan Tengah	2,95	3,90	0,27
Kalimantan Selatan	1,04	1,60	0,25
Kalimantan Timur	2,34	3,01	0,20
Sulawesi Utara	4,93	7,76	3,59
Gorontalo	2,21	2,59	1,92
Sulawesi Tengah	3,75	2,50	1,05
Sulawesi Selatan	2,45	3,01	1,05
Sulawesi Barat	6,00	3,84	1,58
Sulawesi Tenggara	5,15	4,23	2,04
Maluku	6,49	4,33	3,49
Maluku Utara	5,82	6,95	3,49
Papua	5,71	4,72	1,17
Papua Barat	2,60	2,83	1,72
<b>Indonesia</b>	<b>5,48</b>	<b>5,51</b>	<b>3,62</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.14 Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,71	11,13	8,17
Sumatera Utara	6,85	7,36	5,22
Sumatera Barat	3,25	3,31	2,53
R i a u	6,05	5,56	2,81
Kepulauan Riau	1,72	4,19	0,65
J a m b i	7,88	7,16	4,56
Sumatera Selatan	12,91	14,47	8,57
Kep Bangka Belitung	2,66	2,14	1,72
Bengkulu	9,45	8,21	7,00
Lampung	20,16	19,46	15,63
DKI Jakarta			
Jawa Barat	8,22	7,28	6,48
Banten	17,37	12,55	11,81
Jawa Tengah	36,78	34,01	30,02
DI Yogyakarta	17,89	16,20	12,23
Jawa Timur	28,85	27,03	24,70
B a l i	8,56	10,21	7,02
Nusa Tenggara Barat	11,61	10,27	9,47
Nusa Tenggara Timur	46,64	42,14	40,40
Kalimantan Barat	3,40	2,71	0,64
Kalimantan Tengah	4,09	3,45	1,08
Kalimantan Selatan	2,27	1,87	1,10
Kalimantan Timur	4,10	3,59	1,38
Sulawesi Utara	11,35	9,58	8,03
Gorontalo	9,36	7,12	6,65
Sulawesi Tengah	9,50	10,67	7,35
Sulawesi Selatan	3,83	4,34	2,92
Sulawesi Barat	7,21	7,79	5,75
Sulawesi Tenggara	11,35	10,27	6,56
Maluku	21,89	19,49	16,24
Maluku Utara	28,43	17,57	18,52
Papua	37,98	38,30	23,73
Papua Barat	10,81	8,52	4,90
<b>Indonesia</b>	<b>18,03</b>	<b>17,42</b>	<b>14,69</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.15 Persentase Rumah Tangga yang Berlantai Tanah Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	9,54	8,81	6,58
Sumatera Utara	4,87	4,79	3,34
Sumatera Barat	2,70	2,87	1,96
R i a u	5,11	4,07	1,94
Kepulauan Riau	2,13	2,31	0,51
J a m b i	6,44	5,99	3,55
Sumatera Selatan	9,02	10,51	6,23
Kep Bangka Belitung	2,15	2,19	1,15
Bengkulu	6,79	6,28	5,17
Lampung	16,73	16,60	12,60
DKI Jakarta	3,02	2,15	0,25
Jawa Barat	5,60	5,33	3,78
Banten	9,96	6,89	5,73
Jawa Tengah	25,10	24,37	21,28
DI Yogyakarta	9,28	7,72	6,20
Jawa Timur	18,15	18,52	15,85
B a l i	5,04	6,03	3,58
Nusa Tenggara Barat	9,15	8,26	7,37
Nusa Tenggara Timur	40,39	35,66	34,19
Kalimantan Barat	2,64	2,34	0,54
Kalimantan Tengah	3,70	3,61	0,82
Kalimantan Selatan	1,76	1,76	0,75
Kalimantan Timur	3,02	3,23	0,65
Sulawesi Utara	8,56	8,75	6,01
Gorontalo	7,11	5,55	4,99
Sulawesi Tengah	8,29	8,68	5,86
Sulawesi Selatan	3,38	3,86	2,24
Sulawesi Barat	6,82	6,91	4,84
Sulawesi Tenggara	9,92	8,60	5,34
Maluku	17,82	13,59	11,37
Maluku Utara	21,74	14,62	14,58
Papua	30,83	29,75	18,29
Papua Barat	8,40	6,83	3,98
<b>Indonesia</b>	<b>11,95</b>	<b>11,50</b>	<b>9,21</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.16 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang dari 10 m<sup>2</sup> Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	25,85	23,89	28,36
Sumatera Utara	22,38	24,73	26,30
Sumatera Barat	22,93	26,22	23,74
R i a u	25,13	24,98	25,79
Kepulauan Riau	32,10	23,75	30,43
J a m b i	22,03	23,05	21,36
Sumatera Selatan	38,16	36,27	38,70
Kep Bangka Belitung	22,80	19,91	20,22
Bengkulu	31,52	29,66	27,88
Lampung	22,76	19,13	21,13
DKI Jakarta	45,06	47,01	41,99
Jawa Barat	27,34	27,52	27,02
Banten	28,40	28,53	28,43
Jawa Tengah	10,94	10,94	10,99
DI Yogyakarta	15,93	20,38	14,45
Jawa Timur	16,75	17,22	15,48
B a l i	28,78	27,67	27,76
Nusa Tenggara Barat	42,12	40,07	38,19
Nusa Tenggara Timur	46,60	44,27	42,87
Kalimantan Barat	23,14	21,49	25,28
Kalimantan Tengah	29,10	28,50	28,86
Kalimantan Selatan	28,63	27,05	27,67
Kalimantan Timur	30,97	27,07	26,09
Sulawesi Utara	34,72	30,74	31,52
Gorontalo	26,88	30,09	29,86
Sulawesi Tengah	30,94	28,13	29,46
Sulawesi Selatan	25,96	25,33	25,71
Sulawesi Barat	34,96	34,05	31,13
Sulawesi Tenggara	30,13	30,62	30,53
Maluku	39,99	39,89	42,98
Maluku Utara	30,69	27,85	30,23
Papua	47,86	40,53	46,91
Papua Barat	39,98	39,82	45,66
<b>Indonesia</b>	<b>24,82</b>	<b>25,44</b>	<b>24,71</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.17 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang dari 10 m<sup>2</sup> Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,68	33,81	36,65
Sumatera Utara	35,39	35,42	34,14
Sumatera Barat	29,40	31,15	31,97
R i a u	29,61	28,00	28,92
Kepulauan Riau	35,59	27,31	25,36
J a m b i	25,89	24,52	25,38
Sumatera Selatan	33,21	35,94	34,87
Kep Bangka Belitung	20,61	20,97	16,63
Bengkulu	30,42	31,97	35,17
Lampung	15,76	15,41	15,62
DKI Jakarta			
Jawa Barat	23,04	23,38	25,12
Banten	28,42	26,25	25,35
Jawa Tengah	6,01	5,72	5,92
DI Yogyakarta	2,48	2,54	2,91
Jawa Timur	9,51	8,06	8,68
B a l i	28,26	26,97	30,13
Nusa Tenggara Barat	40,95	37,80	38,34
Nusa Tenggara Timur	53,90	48,70	49,28
Kalimantan Barat	36,25	37,74	34,30
Kalimantan Tengah	28,06	32,68	31,25
Kalimantan Selatan	23,44	22,80	22,11
Kalimantan Timur	24,58	27,65	27,58
Sulawesi Utara	36,93	33,41	38,69
Gorontalo	46,43	44,44	44,16
Sulawesi Tengah	36,58	35,25	34,60
Sulawesi Selatan	22,30	19,94	20,21
Sulawesi Barat	38,60	35,98	32,43
Sulawesi Tenggara	31,01	30,12	29,04
Maluku	42,08	41,97	39,33
Maluku Utara	31,99	30,29	30,12
Papua	71,16	77,63	76,12
Papua Barat	37,69	39,94	37,43
<b>Indonesia</b>	<b>22,84</b>	<b>22,14</b>	<b>22,72</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

**Tabel 2.18 Persentase Rumah Tangga yang Menempati Rumah dengan Luas Lantai per Orang Kurang dari 10 m<sup>2</sup> Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	32,20	31,04	34,32
Sumatera Utara	29,41	30,23	30,41
Sumatera Barat	27,16	29,26	28,82
R i a u	27,37	26,83	27,71
Kepulauan Riau	33,74	24,33	29,56
J a m b i	24,66	24,08	24,20
Sumatera Selatan	35,06	36,05	36,18
Kep Bangka Belitung	21,66	20,44	18,38
Bengkulu	30,81	31,26	32,99
Lampung	17,58	16,31	16,96
DKI Jakarta	45,06	47,01	41,99
Jawa Barat	25,53	26,04	26,34
Banten	28,41	27,82	27,42
Jawa Tengah	8,39	8,04	8,21
DI Yogyakarta	11,42	14,71	10,88
Jawa Timur	13,03	12,31	11,87
B a l i	28,56	27,40	28,68
Nusa Tenggara Barat	41,44	38,75	38,28
Nusa Tenggara Timur	52,66	47,84	48,04
Kalimantan Barat	32,69	32,94	31,68
Kalimantan Tengah	28,42	31,27	30,46
Kalimantan Selatan	25,57	24,58	24,42
Kalimantan Timur	28,52	27,29	26,66
Sulawesi Utara	35,97	32,19	35,43
Gorontalo	40,26	39,49	39,15
Sulawesi Tengah	35,40	33,52	33,38
Sulawesi Selatan	23,49	21,88	22,19
Sulawesi Barat	37,42	35,55	32,15
Sulawesi Tenggara	30,81	30,26	29,44
Maluku	41,53	41,16	40,72
Maluku Utara	31,60	29,61	30,15
Papua	66,00	68,19	69,08
Papua Barat	38,36	39,91	39,80
<b>Indonesia</b>	<b>23,80</b>	<b>23,78</b>	<b>23,71</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011



# **3 FASILITAS PERUMAHAN**

<http://www.kemendagri.go.id>



# 3

## FASILITAS PERUMAHAN

Selain sebagai tempat tinggal, rumah juga berfungsi sebagai tempat untuk berinteraksi antar anggota rumah tangga dalam suasana yang nyaman dan sehat agar tercipta kehidupan rumah tangga yang bahagia. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung beberapa fasilitas perumahan yang tersedia, antara lain sarana penerangan listrik yang cukup, air bersih untuk keperluan minum dan masak, serta tersedianya fasilitas jamban yang memenuhi syarat kesehatan. Aksesibilitas anggota rumah tangga terhadap fasilitas perumahan tersebut akan menentukan kualitas rumah tangga yang bermuara pada tingkat kesejahteraan rumah tangga dan derajat kesehatan anggota rumah tangga yang tinggal di dalamnya.

### 3.1. Sumber Air Minum

Air merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kelangsungan hidup manusia yang utamanya digunakan untuk minum dan memasak. Kebutuhan rata-rata air minum per kapita per hari adalah 1,5 liter, artinya apabila dalam satu rumah tangga terdiri dari lima orang anggota rumah tangga, maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan minimal 7,5 liter air untuk minum. Oleh karena itu, ketersediaan air minum yang cukup untuk setiap rumah tangga menjadi sesuatu yang penting dalam memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar.

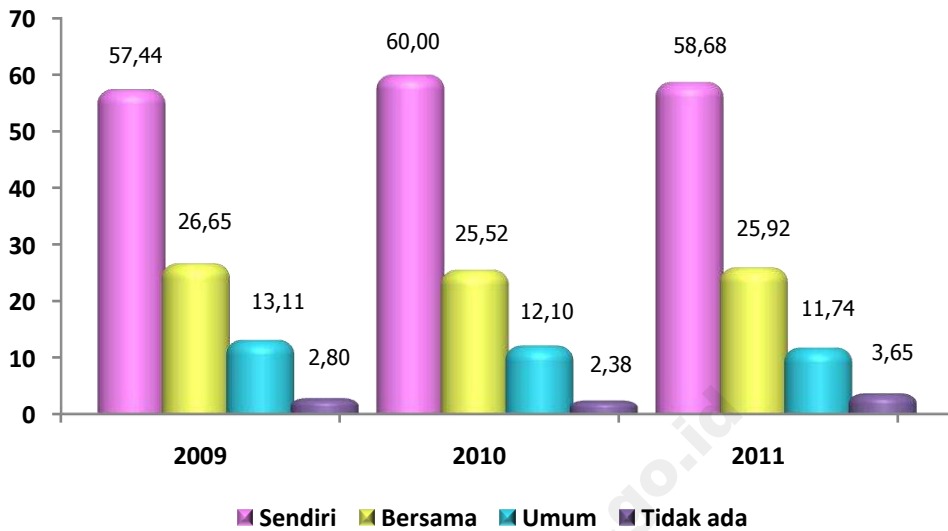
Sumber air minum yang digunakan bagi setiap rumah tangga sangat bervariasi bergantung pada ketersediaan akses serta kondisi sosial, ekonomi dan letak geografis rumah tangga tersebut. Sumber air minum utama berdasarkan hasil pendataan Susenas terdiri dari air kemasan bermerk, air isi ulang, leding (baik meteran ataupun eceran), sumur bor/pompa, sumur terlindung dan tidak terlindung, mata air terlindung dan tidak terlindung, air hujan, air sungai, dan lainnya. Secara nasional sumber air minum utama yang paling banyak digunakan adalah sumur terlindung yaitu sebesar 25,42 persen, disusul berturut-turut sumur bor/pompa 15,36 persen, air isi ulang 14,78 persen, mata air terlindung 9,77 persen, leding meteran

9,00 persen, air kemasan bermerk 7,51 persen, sumur tak terlindung 7,02 persen, mata air tak terlindung 3,63 persen, leding eceran 2,57 persen, air hujan 2,40 persen, air sungai 2,39 persen, dan lainnya 0,16 persen. Berdasarkan tipe daerah (perdesaan dan perkotaan), sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga di perdesaan adalah sumur terlindung yaitu sebesar 30,87 persen, sedangkan di perkotaan adalah air isi ulang yaitu sebesar 22,72.

Jika dilihat variasi antar provinsi, penggunaan sumur terlindung sebagai sumber air minum utama yang tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar 52,78 persen dan yang terendah di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 0,86 persen. Kecenderungan rumah tangga di Provinsi DKI Jakarta menggunakan air kemasan bermerk sebagai sumber air minum utama yang mencapai 38,64 persen. Sebaran penggunaan sumber air minum utama di masing-masing provinsi selengkapnya bisa dilihat di lampiran Tabel 3.3.

Dari aspek kepemilikan fasilitas sumber air minum bagi rumah tangga, dapat dibedakan menjadi fasilitas sendiri, bersama, atau umum. Fasilitas sumber air minum sendiri adalah fasilitas yang hanya bisa diakses dan digunakan oleh rumah tangga tersebut, fasilitas sumber air minum bersama adalah fasilitas yang digunakan oleh beberapa rumah tangga tertentu, dan fasilitas umum adalah fasilitas sumber air minum yang bisa digunakan oleh rumah tangga mana saja. Secara nasional, 58,68 persen rumah tangga memiliki fasilitas sumber air minum sendiri, yang tersebar di daerah perkotaan sebesar 68,95 persen dan di daerah perdesaan sebesar 51,95 persen. Akan tetapi, masih ada sebesar 3,65 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas sumber air minum. Presentase rumah tangga menurut fasilitas air minum dari tahun 2009 hingga tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 3.1.

**Gambar 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Minum, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

### 3.1.1. Air Minum Layak

Kelayakan air minum yang dikonsumsi rumah tangga perlu mendapat perhatian karena berhubungan langsung dengan tingkat kesehatan anggota rumah tangga. Minimnya akses ke sumber air minum layak memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Keberadaan sumber air dengan jarak yang terlalu dekat dengan tempat penampungan tinja/limbah/kotoran membuka peluang tercemarnya air tersebut oleh sumber penyakit yang menyebar melalui perantara kotoran atau perantara air. Oleh karena itu, sumber air minum layak dalam publikasi ini difokuskan kepada sumber air yang berjarak  $\geq 10$  meter dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat.

**Tabel 5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sumber Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, 2011**

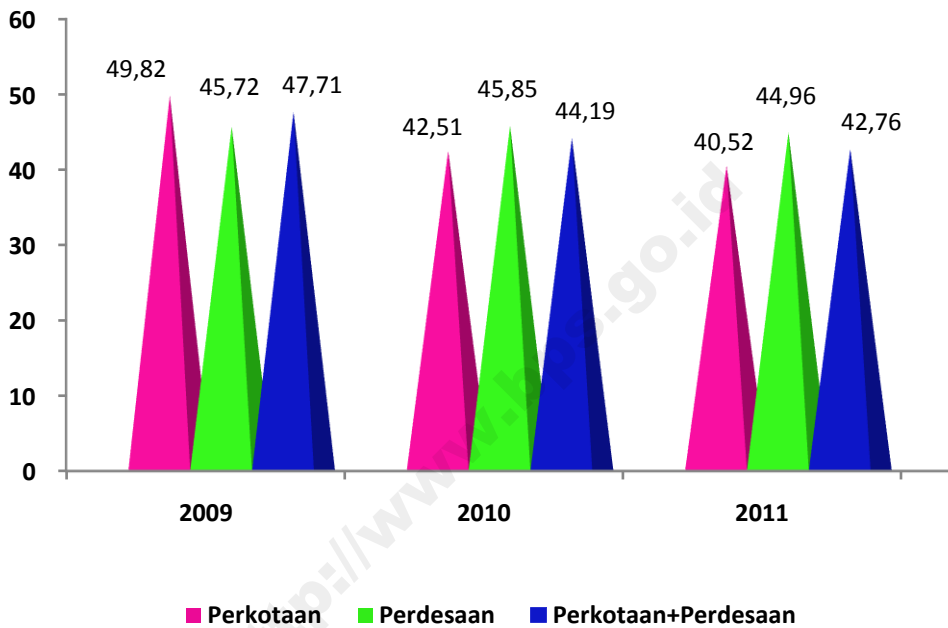
Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>1. Air Layak</b>	<b>40,52</b>	<b>44,96</b>	<b>42,76</b>
- <i>Leding meteran</i>	13,39	4,68	9,00
- <i>Leding eceran</i>	3,57	1,58	2,57
- <i>Sumur bor dengan jarak <math>\geq 10</math> m</i>	9,23	7,62	8,42
- <i>Sumur terlindung dengan jarak <math>\geq 10</math> m</i>	11,15	18,62	14,92
- <i>Mata air terlindung dengan jarak <math>\geq 10</math> m</i>	2,12	8,72	5,45
- <i>Air hujan</i>	1,05	3,73	2,40
<b>2. Air Tidak Layak</b>	<b>23,07</b>	<b>46,62</b>	<b>34,95</b>
- <i>Sumur tidak terlindung</i>	2,95	11,02	7,02
- <i>Mata air tidak terlindung</i>	0,63	6,57	3,63
- <i>Sumur bor dengan jarak <math>&lt; 10</math> m</i>	8,61	5,29	6,94
- <i>Sumur terlindung dengan jarak <math>&lt; 10</math> m</i>	8,71	12,26	10,50
- <i>Mata air terlindung dengan jarak <math>&lt; 10</math> m</i>	1,70	6,88	4,31
- <i>Air sungai</i>	0,36	4,39	2,39
- <i>Lainnya</i>	0,11	0,21	0,16
<b>3. Air Kemasan</b>	<b>36,41</b>	<b>8,42</b>	<b>22,29</b>
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Susenas 2011

Gambar 3.2 menunjukkan, secara nasional persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak masih cukup rendah, yaitu sekitar 42,76 persen pada tahun 2011. Dalam tiga tahun terakhir, persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2009, rumah tangga yang memanfaatkan sumber air minum layak sebesar 47,71 persen, kemudian menurun menjadi 44,19 persen pada tahun 2010, dan semakin menurun menjadi 42,76 persen pada tahun 2011. Menurut tipe daerah,

sumber air minum layak dimanfaatkan oleh 44,96 persen rumah tangga di daerah pedesaan, lebih tinggi dibanding rumah tangga di daerah perkotaan yang sebesar 40,52 persen.

**Gambar 3.2. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak Menurut Tipe Daerah, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Pada lampiran Tabel 3.6 disajikan perbandingan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menurut provinsi. Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak adalah DI Yogyakarta yaitu sebesar 62,66 persen, dan yang terendah adalah Kepulauan Riau yaitu sebesar 20,86 persen. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak memiliki disparitas yang cukup tinggi antar provinsi di Indonesia.

### 3.1.2. Air Kemasan

Beberapa tahun terakhir fenomena penggunaan air kemasan mengalami peningkatan terutama pada penggunaan air isi ulang. Kondisi ini disebabkan makin mudahnya akses untuk mendapatkan air kemasan, baik air kemasan bermerk ataupun air isi ulang, disamping karena kualitas air leding yang semakin menurun sehingga tidak secara langsung bisa dimanfaatkan sebagai air minum. Tabel 6 dan Tabel 7 berikut menampilkan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan dan leding dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 6. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Kemasan sebagai Sumber Air Minum, 2009-2011**

Tipe Daerah	2009		2010		2011	
	Air Kemasan Bermerk	Air isi ulang	Air Kemasan Bermerk	Air isi ulang	Air Kemasan Bermerk	Air isi ulang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	9,39	13,34	15,33	17,78	13,69	22,72
Perdesaan	0,88	3,06	1,70	4,11	1,44	6,98
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	<b>5,01</b>	<b>8,04</b>	<b>8,47</b>	<b>10,90</b>	<b>7,51</b>	<b>14,78</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011



**Tabel 7. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Leding sebagai Sumber Air Minum, 2009-2011**

Tipe Daerah	2009		2010		2011	
	Leding meteran	Leding eceran	Leding meteran	Leding eceran	Leding meteran	Leding eceran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	18,94	4,66	14,59	3,95	13,39	3,57
Perdesaan	5,24	2,19	4,62	1,77	4,68	1,58
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	<b>11,88</b>	<b>3,39</b>	<b>9,58</b>	<b>2,86</b>	<b>9,00</b>	<b>2,57</b>

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

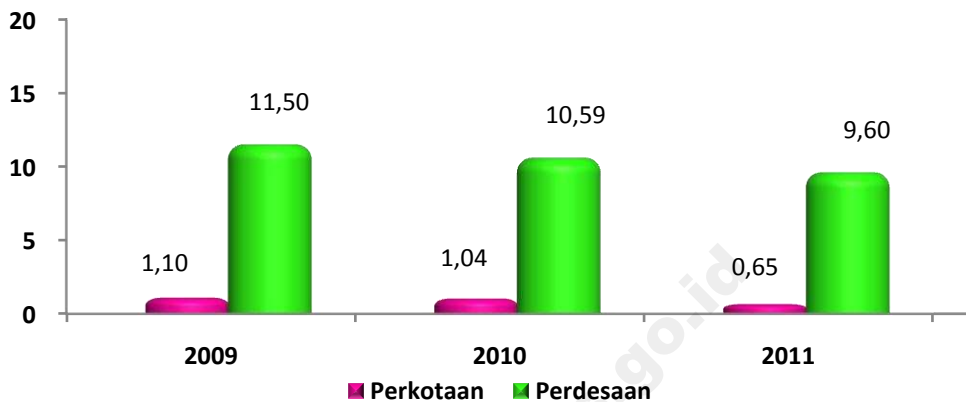
Dari Tabel 7 terlihat bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan leding sebagai sumber air minum mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dimana 15,27 persen pada tahun 2009 turun menjadi 12,44 persen di tahun 2010 dan semakin menurun menjadi 11,57 persen di tahun 2011. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi peralihan penggunaan sumber air minum oleh rumah tangga. Kondisi yang demikian memungkinkan penggunaan air kemasan sebagai sumber air minum bagi rumah tangga mengalami peningkatan.

### 3.2. Sumber Penerangan

Berbagai sumber penerangan yang digunakan sebagai fasilitas penerangan antara lain listrik (PLN dan non PLN), petromak, lampu aladin, pelita, sentir, dan obor. Listrik merupakan sarana yang sangat penting bagi rumah tangga karena disamping sebagai sumber penerangan juga sebagai sumber tenaga bagi sebagian besar peralatan elektronik rumah tangga saat ini. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan akan listrik bagi warga negaranya. PT PLN sebagai penyedia layanan listrik bagi masyarakat sudah selayaknya lebih meningkatkan kualitas layanan yang diberikan agar ketersediaan listrik menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah

perdesaan maupun perkotaan. Untuk itu, program pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya terhadap kebutuhan listrik bagi masyarakat telah banyak dilakukan, diantaranya program listrik masuk desa.

**Gambar 3.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik Menurut Tipe Daerah, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Sampai tahun 2011, sekitar 94,83 persen rumah tangga di Indonesia sudah menikmati atau terjangkau fasilitas penerangan listrik, dimana 90,51 persen diantaranya dilayani oleh PLN dan 4,32 persen lainnya menggunakan listrik non-PLN. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik lengkapnya dapat dilihat di lampiran Tabel 3.9. Berdasarkan tipe daerah, ada sekitar 9,60 persen rumah tangga di daerah perdesaan masih menggunakan petromak, lampu aladin, pelita, sentir, obor, dan lainnya, sementara di daerah perkotaan terdapat kurang dari satu persen rumah tangga yang belum memiliki akses ke fasilitas listrik sebagai sumber penerangan (lihat Gambar 3.3). Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di lampiran Tabel 3.12.

Bila dibandingkan antar provinsi, rentang persentase rumah tangga yang belum menikmati fasilitas listrik berkisar antara 0,05 persen di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 60,60 persen di Provinsi Papua. Sementara itu, provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang rumah tangganya belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan rata-rata kurang dari satu persen. Sebaran penggunaan listrik untuk masing-masing provinsi bisa dilihat pada peta berikut.

**Peta 3.1 Persebaran Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Listrik Menurut Provinsi, 2011**



Sumber: BPS, Susenas 2011

### 3.3. Tempat Buang Air Besar

Untuk mempromosikan perilaku hidup sehat bagi anggota rumah tangga, salah satu fasilitas penunjang yang diperlukan dalam setiap rumah tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi, seperti tempat buang air besar. Rumah tangga akan cenderung berupaya agar tempat tinggalnya memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan kebersihannya bisa lebih terjaga. Berdasarkan hasil Susenas 2011 yang tersaji dalam Tabel 8, secara nasional 65,20 persen rumah tangga mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri. Sebesar 74,45 persen rumah tangga di daerah perkotaan 56,12 persen rumah tangga di daerah perdesaan memiliki fasilitas tempat buang air sendiri. Sementara itu, masih ada sekitar 17,78 persen rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar.

Bila dibandingkan antar provinsi seperti yang disajikan dalam Lampiran Tabel 3.15, presentase rumah tangga yang mempunyai fasilitas tempat buang air besar sendiri tertinggi di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 79,64 persen, sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 18,89 persen.

**Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar dan Tipe Daerah, 2011**

Tipe Daerah	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	74,45	14,80	2,90	7,85
Perdesaan	56,12	11,97	4,38	27,53
<b>Perkotaan+Perdesaan</b>	<b>65,20</b>	<b>13,37</b>	<b>3,65</b>	<b>17,78</b>

Sumber: BPS, Susenas 2011

Disamping fasilitas tempat buang air besar, tempat penampungan kotoran/tinja juga berpengaruh terhadap kondisi kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena tempat penampungan yang tidak memenuhi syarat sanitasi, seperti tempat penampungan berupa lobang tanah atau tanah terbuka, dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar termasuk mencemarkan sumber air di dekatnya, dan dapat menimbulkan bau yang kurang sedap untuk lingkungan sekitarnya. Tempat penampungan yang memenuhi syarat kesehatan adalah tangki septik atau Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL). Pada tahun 2011, persentase rumah tangga yang menggunakan tangki septik/SPAL adalah 60,33 persen. Rumah tangga di daerah perkotaan yang menggunakan tangki septik/SPAL adalah sebesar 77,61 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 43,35 persen (lihat Tabel 9).

**Tabel 9. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja dan Tipe Daerah, 2011**

Tipe Daerah	Tangki/SPAL	Kolam/Sawah	Sungai/Danau/Laut	Lobang Tanah	Pantai/Tanah Lapang/Kebun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	77,61	2,68	11,45	6,50	1,13	0,63
Perdesaan	43,35	5,51	20,12	21,71	8,04	1,27
<b>Perkotaan + Perdesaan</b>	<b>60,33</b>	<b>4,11</b>	<b>15,83</b>	<b>14,17</b>	<b>4,61</b>	<b>0,95</b>

Sumber: BPS, Susenas 2011

Bila dibandingkan antar provinsi seperti yang disajikan dalam Lampiran Tabel 3.21, provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat penampungan akhir kotoran/tinja adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 93,90 persen, sedangkan yang terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 28,05 persen.

Dari Tabel 8 dan Tabel 9, bisa dibuat tabulasi silang antara fasilitas tempat buang air besar dan tempat penampungan akhir kotoran/tinja sebagai berikut:

**Tabel 10. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja dan Tipe Daerah, 2011**

Tipe Daerah	Fasilitas Buang Air Besar	Tempat Penampungan Akhir Kotoran/Tinja					
		Tangki/SPAL	Kolam/Sawah	Sungai/Danau/Laut	Lobang Tanah	Pantai/Tanah Lapang/Kebun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan	Sendiri	86,42	1,31	5,31	6,55	0,11	0,29
	Bersama	78,60	3,28	8,86	8,48	0,17	0,61
	Umum	52,27	11,82	27,28	6,33	0,73	1,57
	Tidak ada	-	11,22	68,66	2,34	12,71	5,07
	Total	77,61	2,68	11,45	6,50	1,13	0,63
Perdesaan	Sendiri	63,60	2,63	3,62	29,11	0,67	0,36
	Bersama	50,03	7,28	10,49	30,96	0,70	0,55
	Umum	32,72	20,76	32,55	10,73	2,06	1,17
	Tidak ada	-	8,20	55,98	4,34	27,19	4,29
	Total	43,35	5,51	20,12	21,71	8,04	1,27
Perkotaan + Perdesaan	Sendiri	76,51	1,88	4,58	16,35	0,36	0,32
	Bersama	65,70	5,09	9,59	18,63	0,41	0,58
	Umum	40,42	17,24	30,48	9,00	1,54	1,33
	Tidak ada	-	8,86	58,75	3,90	24,02	4,47
	Total	60,33	4,11	15,83	14,17	4,61	0,95

Sumber: BPS, Susenas 2011

Dari Tabel 8, dapat diketahui bahwa 17,78 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas buang air besar. Dari sejumlah rumah tangga tersebut, sebesar 8,86 persen ke kolam/sawah, 58,75 persen ke sungai/danau/laut, 3,90 persen ke lobang tanah, 24,02 persen ke pantai/tanah lapang/kebun, dan 4,47 persen ke tempat lainnya (lihat Tabel 10).

Selain tempat penampungan akhir kotoran/tinja, jenis kloset yang digunakan rumah tangga juga menunjukkan kualitas kelayakan fasilitas sanitasi yang akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan anggota rumah tangga dan lingkungan sekitar serta resiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan yang disebabkan pencemaran air oleh limbah/kotoran. Dari hasil susenas 2011, jenis kloset yang digunakan rumah tangga pada umumnya adalah leher angsa, plengsengan, atau cemplung/cubluk.

Dari sisi kualitas kelayakannya, jenis kloset plengsengan dan cemplung/cubluk merupakan jenis kloset yang kurang memenuhi syarat kesehatan karena berpotensi dalam mencemari lingkungan perumahan. Sedangkan jenis kloset leher angsa merupakan jenis kloset yang terbaik dan memenuhi syarat kesehatan.

Hasil Susenas 2011 menunjukkan masih terdapat sebesar 20,83 persen rumah tangga yang tidak menggunakan kloset leher angsa, yang terdiri dari 7,19 persen menggunakan kloset plengsengan, 10,67 persen menggunakan cemplung/cubluk, dan 2,97 persen tidak menggunakan kloset sama sekali. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2010 persentase rumah tangga yang tidak menggunakan kloset leher angsa sebesar 22,21 persen mengalami penurunan sebesar 1,38 persen (lihat Tabel 11).

**Tabel 11. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011**

Jenis Kloset	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kloset selain leher angsa</b>	<b>24,30</b>	<b>22,21</b>	<b>20,83</b>
- <i>Plengsengan</i>	8,86	7,81	7,19
- <i>Cemplung/cubluk</i>	13,26	12,25	10,67
- <i>Tidak pakai</i>	2,18	2,15	2,97

Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Penggunaan kloset selain leher angsa banyak terdapat di daerah perdesaan dibandingkan daerah perkotaan yaitu 33,46 persen berbanding 10,71 persen, hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.4.

**Gambar 3.4. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa Menurut Tipe Daerah, 2009-2011**



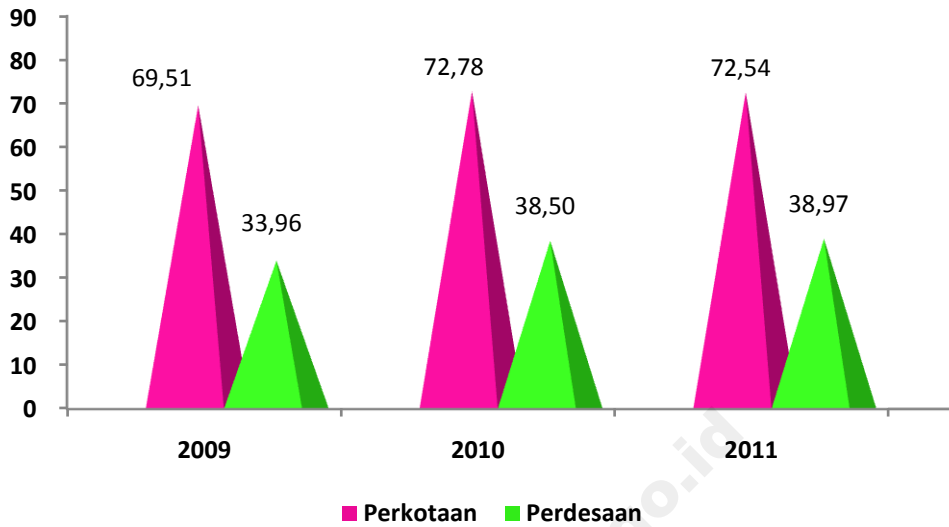
Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Lampiran Tabel 3.24 menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase rumah tangga tertinggi yang menggunakan kloset selain leher angsa adalah Papua yaitu sebesar 52,09 persen sedangkan yang terendah adalah Bali sebesar 2,42 persen. Jika ditinjau berdasarkan tipe daerah, di daerah perkotaan provinsi dengan persentase rumah tangga tertinggi yang menggunakan kloset selain leher angsa adalah Papua Barat yaitu sebesar 37,04 persen sedangkan yang terendah adalah Gorontalo sebesar 2,58 persen (lihat lampiran Tabel 3.22). Untuk daerah perdesaan provinsi dengan persentase rumah tangga tertinggi yang menggunakan kloset selain leher angsa adalah Papua yaitu sebesar 73,25 persen sedangkan yang terendah adalah Bali sebesar 1,96 persen (lihat lampiran Tabel 3.23).

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan rumah tangga adalah akses terhadap sanitasi layak yang didefinisikan apabila rumah tangga mempunyai fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik. Berdasarkan Tabel 3.27, persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dimana tahun 2009 terdapat 51,19 persen meningkat menjadi 55,54 persen di tahun 2010 dan mengalami peningkatan lagi di tahun 2011 menjadi 55,60 persen. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak bagi rumah tangga mengalami peningkatan, yang berarti juga bahwa terjadi peningkatan kepedulian dan kualitas kesehatan rumah tangga. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak berdasarkan tipe daerah dapat dilihat pada Gambar 3.5.



**Gambar 3.5. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak Menurut Tipe Daerah, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Bila dibandingkan antar provinsi seperti yang disajikan dalam Lampiran Tabel 3.27, persentase tertinggi rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 87,83 persen, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 23,82 persen.

**Tabel 3.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, 2011**

Provinsi	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,13	56,21	9,02	2,44	5,40	16,55
Sumatera Utara	6,43	31,38	24,34	2,86	13,11	15,51
Sumatera Barat	2,96	35,25	20,86	0,98	9,38	17,86
R i a u	3,73	56,25	1,56	0,24	11,75	11,61
Kepulauan Riau	8,90	64,83	9,08	1,12	0,73	9,77
J a m b i	7,76	29,41	22,78	0,30	2,86	19,52
Sumatera Selatan	2,52	30,34	29,12	7,21	2,77	21,84
Kep. Bangka Belitung	25,64	36,01	1,47	0,33	8,06	22,40
Bengkulu	2,59	27,53	18,51	1,08	4,68	24,18
Lampung	14,36	23,00	4,19	2,46	8,97	30,02
DKI Jakarta	38,64	28,72	10,91	3,67	16,93	0,86
Jawa Barat	11,90	22,08	7,55	2,32	25,33	19,90
Banten	24,74	27,31	3,25	2,78	30,00	9,17
Jawa Tengah	6,73	7,48	17,09	6,13	19,31	34,34
DI Yogyakarta	16,20	6,34	7,00	0,10	9,90	54,89
Jawa Timur	15,94	13,91	11,07	4,95	20,94	25,08
B a l i	34,14	15,93	23,38	0,80	5,82	9,80
Nusa Tenggara Barat	10,04	10,36	16,18	3,97	8,66	39,52
Nusa Tenggara Timur	3,63	9,48	44,24	3,30	3,11	19,77
Kalimantan Barat	5,72	24,26	6,17	0,38	2,06	1,45
Kalimantan Tengah	3,80	36,82	22,24	1,69	18,94	5,61
Kalimantan Selatan	3,75	14,91	44,54	12,33	4,09	9,32
Kalimantan Timur	6,37	50,06	27,69	4,12	2,29	2,47
Sulawesi Utara	10,97	37,40	14,46	1,72	14,10	12,14
Gorontalo	3,39	17,06	24,38	2,29	11,08	37,26
Sulawesi Tengah	3,79	34,83	24,69	1,15	22,98	4,58
Sulawesi Selatan	1,23	43,17	25,33	5,16	11,36	10,04
Sulawesi Barat	1,78	28,10	22,16	6,73	11,56	15,58
Sulawesi Tenggara	3,64	23,49	27,00	2,07	10,24	19,99
Maluku	0,69	11,05	22,99	8,21	12,36	18,48
Maluku Utara	1,66	21,69	44,30	1,54	3,14	20,83
Papua	8,24	40,88	21,83	2,73	5,17	6,14
Papua Barat	5,43	49,34	17,18	2,28	4,83	7,87
<b>Indonesia</b>	<b>13,69</b>	<b>22,72</b>	<b>13,39</b>	<b>3,57</b>	<b>17,85</b>	<b>19,86</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

## Perkotaan

Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2,99	1,34	0,67	0,70	0,48	0,07
3,35	1,72	0,23	0,47	0,42	0,17
5,03	4,24	2,17	0,55	0,59	0,13
2,96	0,77	0,09	0,24	10,63	0,18
2,62	2,06	0,56	0,08	0,26	-
4,30	0,58	0,20	0,26	11,50	0,52
3,32	0,34	0,22	1,40	0,76	0,14
5,39	0,46	0,04	0,16	0,04	-
19,32	1,19	0,55	0,35	-	-
15,28	0,96	0,31	0,46	-	-
0,13	-	-	0,02	0,11	-
3,78	5,91	1,10	0,05	0,03	0,05
1,72	0,33	0,49	0,09	0,08	0,04
2,97	4,98	0,73	0,08	0,08	0,09
4,40	1,11	0,05	-	-	-
1,80	5,35	0,43	0,18	0,21	0,15
0,72	7,66	1,11	0,16	0,47	-
3,42	6,26	1,25	0,32	-	-
4,90	6,47	0,62	1,05	-	3,44
2,42	1,29	0,49	3,43	52,30	0,02
3,80	0,14	0,20	5,57	1,12	0,08
5,92	0,26	0,09	4,65	0,14	-
1,19	0,44	0,11	1,69	2,93	0,63
2,28	5,32	0,65	0,11	0,85	-
1,14	1,49	0,77	1,14	-	-
0,98	4,77	0,77	1,20	-	0,24
1,72	0,83	0,41	0,50	0,19	0,06
3,80	6,62	0,69	2,99	-	-
2,25	9,19	1,17	0,17	0,71	0,09
1,61	21,84	1,61	0,23	0,93	-
1,96	0,55	0,09	0,34	3,89	-
1,27	5,57	0,96	1,02	5,27	0,92
0,40	4,06	0,36	0,07	7,97	0,20
<b>2,95</b>	<b>3,82</b>	<b>0,63</b>	<b>0,36</b>	<b>1,05</b>	<b>0,11</b>

**Tabel 3.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, 2011**

Provinsi	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,89	18,87	4,65	1,72	3,84	40,25
Sumatera Utara	0,59	8,34	3,21	1,04	21,58	21,20
Sumatera Barat	0,79	13,82	8,26	1,97	3,34	24,96
R i a u	1,12	17,29	0,44	0,06	6,43	24,80
Kepulauan Riau	2,39	12,38	0,24	1,62	6,88	32,99
J a m b i	1,28	12,61	5,99	0,28	2,52	31,52
Sumatera Selatan	0,71	8,12	3,31	1,32	4,38	45,92
Kep. Bangka Belitung	8,66	20,70	0,62	0,17	7,01	39,66
Bengkulu	0,49	5,72	5,08	0,30	1,64	21,97
Lampung	1,86	3,83	1,24	1,10	3,30	47,92
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,65	9,64	2,61	1,77	16,17	26,83
Banten	2,25	15,68	1,95	1,33	15,13	25,04
Jawa Tengah	1,44	3,97	6,02	2,11	14,25	36,56
DI Yogyakarta	0,73	1,16	12,69	0,55	2,48	48,09
Jawa Timur	2,26	4,00	5,44	1,51	23,11	36,06
B a l i	3,67	1,90	27,39	1,38	4,09	12,57
Nusa Tenggara Barat	2,56	3,45	4,36	2,03	11,17	43,96
Nusa Tenggara Timur	0,09	0,58	5,37	1,45	2,30	20,34
Kalimantan Barat	1,25	3,14	2,06	0,41	2,37	7,26
Kalimantan Tengah	0,74	4,84	5,07	0,35	10,63	15,55
Kalimantan Selatan	0,96	6,62	8,31	6,90	17,64	10,44
Kalimantan Timur	1,13	28,21	9,31	0,74	3,99	10,26
Sulawesi Utara	1,74	10,06	4,69	4,00	3,10	26,51
Gorontalo	0,51	4,60	3,73	3,05	4,83	51,07
Sulawesi Tengah	0,14	2,77	5,78	1,29	13,14	21,75
Sulawesi Selatan	0,33	7,22	4,17	1,32	20,61	28,21
Sulawesi Barat	0,22	3,61	3,63	0,93	6,10	28,18
Sulawesi Tenggara	0,32	3,44	6,38	2,67	4,60	37,79
Maluku	0,04	0,96	0,81	1,57	3,63	42,90
Maluku Utara	0,61	1,63	3,67	2,10	0,74	47,10
Papua	0,18	2,52	0,43	0,42	0,89	5,51
Papua Barat	2,34	15,17	2,32	1,37	2,58	14,08
<b>Indonesia</b>	<b>1,44</b>	<b>6,98</b>	<b>4,68</b>	<b>1,58</b>	<b>12,91</b>	<b>30,87</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Perdesaan**

<b>Sumur Tak Terlindung</b>	<b>Mata Air Terlindung</b>	<b>Mata Air Tak Terlindung</b>	<b>Air Sungai</b>	<b>Air Hujan</b>	<b>Lainnya</b>
<b>(8)</b>	<b>(9)</b>	<b>(10)</b>	<b>(11)</b>	<b>(12)</b>	<b>(13)</b>
13,85	7,73	3,11	4,05	0,85	0,18
11,16	14,49	8,17	5,59	4,08	0,55
13,10	13,97	11,84	5,60	2,19	0,17
17,89	1,54	0,67	2,56	26,92	0,26
19,85	10,61	7,46	1,42	4,15	-
21,84	1,66	1,27	8,87	11,92	0,23
15,43	2,43	1,76	9,58	6,96	0,06
18,70	0,85	2,20	0,99	0,45	
48,02	6,76	5,84	4,01	0,06	0,10
30,39	3,63	3,94	1,68	0,99	0,11
-	-	-	-	-	-
8,96	20,13	10,65	1,43	0,14	0,03
19,57	9,26	6,98	1,70	0,79	0,32
7,49	22,12	4,63	0,56	0,75	0,11
10,57	9,09	3,41	0,19	11,03	-
4,58	17,66	3,95	0,43	0,69	0,30
1,02	29,74	8,47	2,24	7,51	0,02
7,79	21,94	1,83	0,91	-	-
6,56	34,94	18,15	6,19	3,62	0,40
9,10	10,02	5,67	24,65	33,72	0,34
9,10	2,14	0,90	42,34	7,59	0,74
18,73	1,38	2,04	23,39	2,93	0,66
12,98	4,53	2,72	16,19	9,31	0,64
11,73	30,56	4,40	0,48	2,56	0,17
10,30	12,62	2,44	6,77	0,08	-
10,66	25,14	7,20	10,95	0,63	0,55
12,18	14,15	8,06	1,99	1,75	0,01
12,77	13,29	18,39	12,35	0,54	-
11,01	22,18	6,47	2,44	2,68	0,03
7,31	27,48	9,61	3,58	1,93	0,18
16,91	11,06	4,68	5,50	5,51	0,50
5,82	13,78	39,77	15,40	15,08	0,22
8,25	8,95	7,44	15,39	21,88	0,24
<b>11,02</b>	<b>15,61</b>	<b>6,57</b>	<b>4,39</b>	<b>3,73</b>	<b>0,21</b>

**Tabel 3.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum, 2011**

Provinsi	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Leding Meteran	Leding Eceran	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,81	29,40	5,88	1,92	4,28	33,57
Sumatera Utara	3,37	19,32	13,27	1,91	17,55	18,49
Sumatera Barat	1,62	22,02	13,08	1,59	5,65	22,24
R i a u	2,12	32,26	0,87	0,13	8,48	19,73
Kepulauan Riau	7,79	55,85	7,56	1,21	1,78	13,74
J a m b i	3,18	17,55	10,93	0,29	2,62	27,99
Sumatera Selatan	1,33	15,72	12,13	3,34	3,83	37,69
Kep. Bangka Belitung	16,94	28,16	1,03	0,25	7,52	31,24
Bengkulu	1,12	12,26	9,11	0,53	2,55	22,63
Lampung	4,91	8,50	1,96	1,43	4,68	43,56
DKI Jakarta	38,64	28,72	10,91	3,67	16,93	0,86
Jawa Barat	8,23	17,63	5,79	2,12	22,06	22,38
Banten	17,35	23,49	2,82	2,30	25,11	14,39
Jawa Tengah	3,83	5,56	11,03	3,93	16,54	35,55
DI Yogyakarta	11,41	4,74	8,76	0,24	7,60	52,78
Jawa Timur	8,68	8,65	8,08	3,12	22,09	30,91
B a l i	22,33	10,49	24,93	1,03	5,15	10,87
Nusa Tenggara Barat	5,62	6,27	9,19	2,82	10,14	42,15
Nusa Tenggara Timur	0,77	2,30	12,88	1,81	2,45	20,23
Kalimantan Barat	2,55	9,27	3,25	0,40	2,28	5,57
Kalimantan Tengah	1,74	15,37	10,72	0,79	13,37	12,28
Kalimantan Selatan	2,12	10,06	23,36	9,16	12,01	9,97
Kalimantan Timur	4,38	41,74	20,69	2,83	2,94	5,43
Sulawesi Utara	5,94	22,49	9,13	2,96	8,10	19,98
Gorontalo	1,52	8,96	10,97	2,78	7,02	46,23
Sulawesi Tengah	1,01	10,37	10,26	1,25	15,47	17,68
Sulawesi Selatan	0,65	20,21	11,82	2,71	17,26	21,64
Sulawesi Barat	0,56	8,94	7,67	2,19	7,29	25,43
Sulawesi Tenggara	1,21	8,83	11,93	2,51	6,12	33,00
Maluku	0,29	4,81	9,28	4,10	6,96	33,58
Maluku Utara	0,88	6,88	14,31	1,96	1,37	40,22
Papua	2,12	11,76	5,59	0,97	1,92	5,66
Papua Barat	3,23	25,00	6,60	1,63	3,23	12,29
<b>Indonesia</b>	<b>7,51</b>	<b>14,78</b>	<b>9,00</b>	<b>2,57</b>	<b>15,36</b>	<b>25,42</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

## Perkotaan+Perdesaan

Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10,79	5,93	2,42	3,11	0,75	0,15
7,44	8,41	4,39	3,15	2,33	0,37
10,01	10,25	8,14	3,66	1,58	0,15
12,16	1,24	0,45	1,67	20,66	0,23
5,57	3,52	1,74	0,31	0,92	
16,69	1,34	0,96	6,34	11,80	0,32
11,30	1,72	1,23	6,79	4,84	0,09
12,21	0,66	1,15	0,58	0,25	
39,42	5,09	4,26	2,92	0,04	0,07
26,71	2,98	3,06	1,39	0,75	0,08
0,13			0,02	0,11	
5,63	10,99	4,51	0,54	0,07	0,04
7,59	3,27	2,62	0,62	0,31	0,13
5,45	14,37	2,86	0,34	0,44	0,10
6,31	3,58	1,09	0,06	3,42	
3,27	11,89	2,30	0,32	0,46	0,23
0,83	16,22	3,97	0,97	3,20	0,01
6,01	15,54	1,59	0,67		
6,24	29,45	14,77	5,20	2,92	0,99
7,16	7,49	4,17	18,49	39,11	0,25
7,35	1,48	0,67	30,23	5,46	0,53
13,41	0,91	1,23	15,61	1,77	0,39
5,68	1,99	1,10	7,21	5,36	0,63
7,43	19,08	2,69	0,31	1,79	0,09
7,09	8,72	1,86	4,80	0,06	
8,37	20,32	5,68	8,64	0,48	0,48
8,40	9,34	5,30	1,45	1,19	0,03
10,81	11,84	14,53	10,31	0,42	
8,65	18,68	5,04	1,83	2,15	0,05
5,14	25,33	6,55	2,30	1,55	0,11
13,00	8,31	3,48	4,14	5,09	0,37
4,72	11,80	30,42	11,93	12,71	0,39
5,99	7,55	5,40	10,98	17,88	0,23
<b>7,02</b>	<b>9,77</b>	<b>3,63</b>	<b>2,39</b>	<b>2,40</b>	<b>0,16</b>

**Tabel 3.4 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses terhadap Air Minum Layak, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,19	24,74	23,64
Sumatera Utara	62,45	52,11	44,94
Sumatera Barat	58,14	47,94	41,54
R i a u	35,83	29,05	25,89
Kepulauan Riau	36,22	21,69	18,31
J a m b i	63,59	54,14	46,76
Sumatera Selatan	59,66	50,65	49,71
Kep. Bangka Belitung	34,31	36,13	23,86
Bengkulu	43,15	37,02	34,60
Lampung	37,71	34,02	30,48
DKI Jakarta	34,81	28,41	24,29
Jawa Barat	41,04	34,35	32,19
Banten	27,54	22,19	22,39
Jawa Tengah	61,54	58,63	58,05
DI Yogyakarta	57,61	54,50	56,93
Jawa Timur	54,06	47,95	49,07
B a l i	51,63	37,77	40,13
Nusa Tenggara Barat	49,76	50,44	45,39
Nusa Tenggara Timur	76,97	69,43	64,73
Kalimantan Barat	76,28	67,54	62,00
Kalimantan Tengah	53,03	48,71	38,16
Kalimantan Selatan	76,64	67,18	66,50
Kalimantan Timur	65,10	45,35	37,15
Sulawesi Utara	43,79	44,74	35,81
Gorontalo	61,47	47,10	46,20
Sulawesi Tengah	49,01	38,30	41,87
Sulawesi Selatan	63,38	49,04	42,54
Sulawesi Barat	65,01	55,96	45,76
Sulawesi Tenggara	71,13	51,34	55,96
Maluku	74,72	65,56	57,52
Maluku Utara	66,56	68,75	61,33
Papua	53,56	43,63	35,64
Papua Barat	55,20	38,49	38,50
<b>Indonesia</b>	<b>49,82</b>	<b>42,51</b>	<b>40,52</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011



**Tabel 3.5 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses terhadap Air Minum Layak, 2009-2011**

	<b>Perdesaan</b>		
<b>Provinsi</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Aceh	29,20	30,68	30,62
Sumatera Utara	41,33	40,34	38,82
Sumatera Barat	40,53	38,17	34,27
R i a u	46,08	46,96	44,64
Kepulauan Riau	39,46	34,72	33,18
J a m b i	45,44	45,80	43,31
Sumatera Selatan	41,91	43,55	42,81
Kep. Bangka Belitung	39,18	40,22	34,47
Bengkulu	27,60	24,37	23,53
Lampung	41,20	39,36	40,19
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	39,77	37,04	36,47
Banten	27,35	22,61	21,56
Jawa Tengah	55,28	56,49	56,72
DI Yogyakarta	65,85	73,12	75,42
Jawa Timur	57,25	57,26	56,84
B a l i	71,42	65,47	66,74
Nusa Tenggara Barat	41,51	43,15	41,61
Nusa Tenggara Timur	39,00	44,43	46,61
Kalimantan Barat	45,71	48,98	46,81
Kalimantan Tengah	28,56	36,40	32,29
Kalimantan Selatan	34,79	35,94	38,04
Kalimantan Timur	40,54	39,83	30,05
Sulawesi Utara	45,03	44,13	40,20
Gorontalo	37,18	36,40	37,35
Sulawesi Tengah	43,13	34,07	40,37
Sulawesi Selatan	43,74	42,92	42,18
Sulawesi Barat	32,28	32,12	25,92
Sulawesi Tenggara	55,50	50,50	52,86
Maluku	48,59	51,47	46,11
Maluku Utara	34,16	48,57	40,80
Papua	30,29	28,59	23,31
Papua Barat	45,12	48,24	41,15
<b>Indonesia</b>	<b>45,72</b>	<b>45,85</b>	<b>44,96</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.6 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses terhadap Air Minum Layak, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	30,60	29,02	28,65
Sumatera Utara	51,04	46,06	41,73
Sumatera Barat	46,62	41,92	37,05
R i a u	40,96	40,01	37,44
Kepulauan Riau	37,74	23,82	20,86
J a m b i	51,19	48,29	44,32
Sumatera Selatan	48,53	45,99	45,17
Kep. Bangka Belitung	36,84	38,17	29,30
Bengkulu	33,02	28,23	26,85
Lampung	40,29	38,07	37,82
DKI Jakarta	34,81	28,41	24,29
Jawa Barat	40,51	35,32	33,72
Banten	27,47	22,32	22,12
Jawa Tengah	58,30	57,44	57,32
DI Yogyakarta	60,38	60,41	62,66
Jawa Timur	55,70	52,94	53,19
B a l i	59,99	48,44	50,44
Nusa Tenggara Barat	44,96	46,20	43,15
Nusa Tenggara Timur	45,45	49,29	50,11
Kalimantan Barat	54,02	54,47	51,22
Kalimantan Tengah	36,89	40,55	34,23
Kalimantan Selatan	51,97	48,97	49,86
Kalimantan Timur	55,71	43,27	34,44
Sulawesi Utara	44,49	44,41	38,20
Gorontalo	44,85	40,09	40,45
Sulawesi Tengah	44,36	35,10	40,72
Sulawesi Selatan	50,13	45,12	42,31
Sulawesi Barat	42,92	37,44	30,24
Sulawesi Tenggara	59,12	50,74	53,69
Maluku	55,50	56,95	50,47
Maluku Utara	43,75	54,18	46,18
Papua	35,44	32,42	26,28
Papua Barat	48,08	45,34	40,39
<b>Indonesia</b>	<b>47,71</b>	<b>44,19</b>	<b>42,76</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.7 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan, 2011**

Provinsi	Perkotaan				
	Listrik		Bukan Listrik		
	PLN	Non PLN	Petromak/ Aladin	Pelita/ Sentir/ Obor	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	98,79	0,50	0,38	0,23	0,10
Sumatera Utara	98,50	0,70	0,20	0,54	0,07
Sumatera Barat	95,41	1,71	0,71	2,00	0,17
Riau	93,06	5,88	0,26	0,67	0,12
Kepulauan Riau	95,93	3,06	0,12	0,80	0,09
Jambi	94,42	3,28	0,68	1,62	-
Sumatera Selatan	97,41	1,16	0,37	0,93	0,14
Kep. Bangka Belitung	91,91	6,49	0,10	1,08	0,41
Bengkulu	96,68	1,15	0,06	2,02	0,08
Lampung	98,04	1,01	0,04	0,82	0,09
DKI Jakarta	99,65	0,29	0,00	0,04	0,01
Jawa Barat	98,71	1,01	0,03	0,19	0,05
Banten	99,03	0,64	0,04	0,23	0,06
Jawa Tengah	99,32	0,32	0,01	0,33	0,01
DI Yogyakarta	99,48		0,06	0,40	0,06
Jawa Timur	98,79	0,86	0,07	0,20	0,09
Bali	99,39	0,33	0,02	0,26	-
Nusa Tenggara Barat	94,83	2,30	0,95	1,92	-
Nusa Tenggara Timur	95,78	1,70	-	2,28	0,24
Kalimantan Barat	96,21	2,50	0,03	1,06	0,20
Kalimantan Tengah	94,19	2,07	0,50	3,24	-
Kalimantan Selatan	98,30	1,29	0,10	0,28	0,03
Kalimantan Timur	93,54	5,54	0,21	0,58	0,14
Sulawesi Utara	97,72	1,32	0,19	0,56	0,22
Gorontalo	95,01	0,49	0,55	3,94	-
Sulawesi Tengah	96,06	2,19	0,17	1,52	0,06
Sulawesi Selatan	98,57	0,67	0,01	0,74	0,01
Sulawesi Barat	90,02	4,19	-	5,79	-
Sulawesi Tenggara	95,91	1,48	-	2,61	-
Maluku	91,93	2,04	0,04	5,76	0,22
Maluku Utara	97,11	2,03	0,24	0,62	-
Papua	92,65	3,22	0,10	2,65	1,39
Papua Barat	96,18	2,38	0,52	0,92	-
<b>Indonesia</b>	<b>98,25</b>	<b>1,09</b>	<b>0,10</b>	<b>0,49</b>	<b>0,07</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.8 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan, 2011**

Provinsi	Perdesaan				
	Listrik		Bukan Listrik		
	PLN	Non PLN	Petromak/ Aladin	Pelita/ Sentir/ Obor	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	92,59	1,29	2,08	3,70	0,33
Sumatera Utara	84,22	4,94	1,88	8,56	0,40
Sumatera Barat	81,57	6,29	3,31	8,51	0,33
R i a u	40,99	44,71	0,67	13,14	0,48
Kepulauan Riau	48,73	40,67	1,00	8,99	0,61
J a m b i	67,94	19,56	2,07	9,75	0,68
Sumatera Selatan	70,63	17,98	2,01	8,46	0,92
Kep. Bangka Belitung	66,57	28,10	0,63	4,34	0,36
Bengkulu	69,91	13,44	1,41	14,75	0,49
Lampung	77,24	13,19	0,67	8,27	0,63
DKI Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	96,99	1,97	0,11	0,79	0,15
Banten	96,16	2,30	0,02	1,47	0,05
Jawa Tengah	98,18	1,03	0,04	0,70	0,06
DI Yogyakarta	99,64	0,07	0	0,29	0
Jawa Timur	96,57	2,43	0,29	0,60	0,12
B a l i	95,55	1,93	0,03	2,35	0,14
Nusa Tenggara Barat	80,30	6,15	1,12	12,01	0,42
Nusa Tenggara Timur	31,82	11,94	0,36	55,31	0,58
Kalimantan Barat	60,68	13,36	0,23	24,81	0,92
Kalimantan Tengah	51,41	21,14	3,42	23,18	0,85
Kalimantan Selatan	83,32	9,03	0,93	6,49	0,23
Kalimantan Timur	60,65	24,02	0,68	12,57	2,09
Sulawesi Utara	89,66	5,50	1,25	3,22	0,36
Gorontalo	62,63	10,36	6,25	20,16	0,60
Sulawesi Tengah	64,58	11,17	1,52	22,11	0,63
Sulawesi Selatan	81,05	8,24	0,89	9,50	0,33
Sulawesi Barat	40,39	34,24	0,45	24,45	0,47
Sulawesi Tenggara	67,86	11,63	0,58	19,26	0,67
Maluku	58,08	9,44	0,98	30,40	1,09
Maluku Utara	52,65	21,38	1,15	23,70	1,13
Papua	12,47	9,00	1,57	23,50	53,46
Papua Barat	48,33	21,63	0,97	28,64	0,43
<b>Indonesia</b>	<b>82,91</b>	<b>7,49</b>	<b>0,75</b>	<b>7,55</b>	<b>1,30</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.9 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Sumber Penerangan, 2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan				
	Listrik		Bukan Listrik		
	PLN	Non PLN	Petromak/ Aladin	Pelita/ Sentir/ Obor	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	94,34	1,07	1,60	2,72	0,26
Sumatera Utara	91,02	2,92	1,08	4,74	0,24
Sumatera Barat	86,86	4,54	2,31	6,02	0,27
Riau	60,99	29,80	0,51	8,35	0,34
Kepulauan Riau	87,85	9,50	0,27	2,20	0,18
Jambi	75,72	14,78	1,66	7,36	0,48
Sumatera Selatan	79,78	12,23	1,45	5,89	0,66
Kep. Bangka Belitung	78,92	17,56	0,38	2,75	0,39
Bengkulu	77,94	9,76	1,01	10,93	0,37
Lampung	82,31	10,22	0,51	6,46	0,50
DKI Jakarta	99,65	0,29	0,00	0,04	0,01
Jawa Barat	98,09	1,36	0,06	0,41	0,09
Banten	98,09	1,18	0,03	0,64	0,05
Jawa Tengah	98,70	0,71	0,03	0,53	0,04
DI Yogyakarta	99,53	0,02	0,04	0,37	0,04
Jawa Timur	97,61	1,69	0,19	0,41	0,10
Bali	97,90	0,95	0,02	1,07	0,05
Nusa Tenggara Barat	86,23	4,58	1,05	7,89	0,25
Nusa Tenggara Timur	44,17	9,96	0,29	45,07	0,51
Kalimantan Barat	70,99	10,21	0,17	17,92	0,71
Kalimantan Tengah	65,49	14,86	2,46	16,62	0,57
Kalimantan Selatan	89,54	5,81	0,59	3,91	0,15
Kalimantan Timur	81,02	12,57	0,39	5,14	0,88
Sulawesi Utara	93,33	3,60	0,77	2,01	0,29
Gorontalo	73,97	6,91	4,26	14,48	0,39
Sulawesi Tengah	72,04	9,04	1,20	17,23	0,49
Sulawesi Selatan	87,38	5,51	0,57	6,33	0,21
Sulawesi Barat	51,20	27,70	0,35	20,39	0,36
Sulawesi Tenggara	75,41	8,90	0,42	14,78	0,49
Maluku	71,00	6,62	0,62	20,99	0,76
Maluku Utara	64,30	16,31	0,91	17,65	0,83
Papua	31,79	7,61	1,21	18,48	40,91
Papua Barat	62,10	16,09	0,84	20,66	0,31
<b>Indonesia</b>	<b>90,51</b>	<b>4,32</b>	<b>0,43</b>	<b>4,05</b>	<b>0,69</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.10 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik, 2009-2011**

	<b>Perkotaan</b>		
<b>Provinsi</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Aceh	1,13	1,37	0,71
Sumatera Utara	0,96	1,04	0,81
Sumatera Barat	2,10	2,64	2,88
R i a u	3,41	2,52	1,06
Kepulauan Riau	2,15	4,02	1,02
J a m b i	6,64	3,51	2,30
Sumatera Selatan	1,42	2,03	1,43
Kep. Bangka Belitung	2,37	2,50	1,59
Bengkulu	2,49	1,67	2,16
Lampung	2,56	2,61	0,95
DKI Jakarta	0,43	0,45	0,05
Jawa Barat	0,54	0,50	0,28
Banten	1,32	0,59	0,33
Jawa Tengah	0,72	0,46	0,35
DI Yogyakarta	0,34	0,23	0,52
Jawa Timur	0,55	0,48	0,35
B a l i	0,55	0,86	0,28
Nusa Tenggara Barat	5,03	6,29	2,87
Nusa Tenggara Timur	2,68	4,43	2,52
Kalimantan Barat	2,29	0,83	1,29
Kalimantan Tengah	3,55	3,34	3,75
Kalimantan Selatan	0,63	0,79	0,41
Kalimantan Timur	1,23	0,91	0,93
Sulawesi Utara	0,70	1,61	0,96
Gorontalo	3,01	6,13	4,49
Sulawesi Tengah	2,72	3,89	1,75
Sulawesi Selatan	1,59	0,92	0,76
Sulawesi Barat	2,65	7,70	5,79
Sulawesi Tenggara	3,26	3,62	2,61
Maluku	6,34	4,38	6,03
Maluku Utara	4,59	2,98	0,86
Papua	6,01	7,33	4,13
Papua Barat	3,59	4,74	1,44
<b>Indonesia</b>	<b>1,10</b>	<b>1,04</b>	<b>0,65</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.11 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik, 2009-2011**

<b>Perdesaan</b>			
<b>Provinsi</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Aceh	11,37	8,73	6,11
Sumatera Utara	11,93	12,81	10,84
Sumatera Barat	14,44	13,33	12,15
R i a u	19,28	17,92	14,29
Kepulauan Riau	12,09	7,22	10,60
J a m b i	17,63	15,71	12,49
Sumatera Selatan	18,22	16,18	11,39
Kep. Bangka Belitung	9,38	11,99	5,33
Bengkulu	18,56	19,56	16,65
Lampung	14,99	10,66	9,57
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	2,31	1,87	1,04
Banten	5,02	6,21	1,54
Jawa Tengah	1,66	1,08	0,80
DI Yogyakarta	1,55	0,79	0,29
Jawa Timur	2,17	1,50	1,00
B a l i	4,86	4,54	2,52
Nusa Tenggara Barat	14,17	13,72	13,55
Nusa Tenggara Timur	64,31	57,85	56,25
Kalimantan Barat	32,99	30,93	25,97
Kalimantan Tengah	32,29	26,12	27,45
Kalimantan Selatan	10,14	9,71	7,65
Kalimantan Timur	12,01	11,28	15,33
Sulawesi Utara	7,14	4,88	4,84
Gorontalo	27,55	31,38	27,01
Sulawesi Tengah	26,60	24,61	24,25
Sulawesi Selatan	13,49	11,20	10,71
Sulawesi Barat	24,99	30,94	25,37
Sulawesi Tenggara	24,01	27,24	20,51
Maluku	34,07	30,54	32,47
Maluku Utara	37,13	27,02	25,98
Papua	71,78	74,35	78,53
Papua Barat	42,42	21,77	30,05
<b>Indonesia</b>	<b>11,50</b>	<b>10,59</b>	<b>9,60</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.12 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Penerangan Bukan Listrik, 2009-2011**

<b>Perkotaan+Perdesaan</b>			
<b>Provinsi</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
Aceh	8,50	6,67	4,59
Sumatera Utara	6,89	7,09	6,06
Sumatera Barat	10,17	9,23	8,60
R i a u	11,35	11,95	9,21
Kepulauan Riau	6,82	4,55	2,66
J a m b i	14,15	12,07	9,50
Sumatera Selatan	11,96	11,31	7,99
Kep. Bangka Belitung	6,01	7,23	3,51
Bengkulu	12,96	14,10	12,30
Lampung	11,76	8,71	7,47
DKI Jakarta	0,43	0,45	0,05
Jawa Barat	1,28	0,99	0,55
Banten	2,76	2,33	0,73
Jawa Tengah	1,21	0,80	0,60
DI Yogyakarta	0,74	0,41	0,45
Jawa Timur	1,39	1,03	0,70
B a l i	2,37	2,28	1,15
Nusa Tenggara Barat	10,35	10,61	9,19
Nusa Tenggara Timur	53,83	47,45	45,87
Kalimantan Barat	24,64	22,03	18,81
Kalimantan Tengah	22,51	18,46	19,64
Kalimantan Selatan	6,24	5,99	4,64
Kalimantan Timur	5,35	4,82	6,41
Sulawesi Utara	4,34	3,38	3,08
Gorontalo	19,80	22,67	19,12
Sulawesi Tengah	21,59	19,56	18,92
Sulawesi Selatan	9,62	7,51	7,12
Sulawesi Barat	17,73	25,75	21,10
Sulawesi Tenggara	19,20	20,71	15,69
Maluku	26,74	20,36	22,38
Maluku Utara	27,50	20,33	19,39
Papua	57,22	57,29	60,60
Papua Barat	31,01	16,71	21,81
<b>Indonesia</b>	<b>6,45</b>	<b>5,85</b>	<b>5,17</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011



**Tabel 3.13 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2011**

Provinsi	Perkotaan			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	78,35	11,70	7,95	2,00
Sumatera Utara	80,22	13,34	5,09	1,35
Sumatera Barat	74,41	18,90	5,13	1,55
R i a u	75,88	11,29	2,65	10,18
Kepulauan Riau	74,80	16,66	8,02	0,52
J a m b i	75,29	12,21	0,48	12,02
Sumatera Selatan	70,95	23,77	3,26	2,02
Kep. Bangka Belitung	57,74	31,26	9,43	1,58
Bengkulu	80,23	18,24	0,52	1,01
Lampung	72,55	21,10	4,60	1,76
DKI Jakarta	79,64	18,55	1,32	0,49
Jawa Barat	68,16	23,53	7,59	0,72
Banten	73,28	21,52	4,41	0,80
Jawa Tengah	69,63	24,57	4,22	1,57
DI Yogyakarta	64,97	33,70	1,17	0,15
Jawa Timur	72,17	23,49	3,09	1,25
B a l i	57,45	31,24	9,99	1,32
Nusa Tenggara Barat	39,83	46,37	11,78	2,02
Nusa Tenggara Timur	47,11	41,25	10,01	1,63
Kalimantan Barat	42,20	5,83	1,50	50,47
Kalimantan Tengah	68,86	18,91	6,21	6,02
Kalimantan Selatan	70,93	20,41	3,65	5,01
Kalimantan Timur	77,18	15,59	4,09	3,13
Sulawesi Utara	51,70	32,97	10,10	5,23
Gorontalo	47,65	40,21	9,94	2,20
Sulawesi Tengah	66,25	22,75	8,57	2,42
Sulawesi Selatan	61,45	30,16	7,29	1,10
Sulawesi Barat	44,95	36,87	17,44	0,75
Sulawesi Tenggara	52,64	37,31	9,55	0,50
Maluku	36,63	33,80	28,71	0,86
Maluku Utara	64,72	29,82	5,31	0,15
Papua	67,08	21,33	10,52	1,07
Papua Barat	46,87	37,50	8,23	7,40
<b>Indonesia</b>	<b>68,95</b>	<b>23,63</b>	<b>5,39</b>	<b>2,03</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.14 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2011**

Provinsi	Perdesaan			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	70,72	15,86	10,93	2,50
Sumatera Utara	55,67	15,32	22,68	6,33
Sumatera Barat	54,49	23,72	16,49	5,30
R i a u	71,10	13,14	4,76	10,99
Kepulauan Riau	46,56	23,71	28,85	0,89
J a m b i	60,54	19,43	8,82	11,21
Sumatera Selatan	54,37	25,34	11,50	8,79
Kep. Bangka Belitung	36,03	40,81	20,59	2,56
Bengkulu	68,87	21,60	8,46	1,07
Lampung	68,62	24,32	5,09	1,96
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	52,85	26,72	18,71	1,72
Banten	51,33	24,63	21,21	2,83
Jawa Tengah	60,95	26,97	10,59	1,49
DI Yogyakarta	58,34	35,04	3,37	3,24
Jawa Timur	53,63	33,59	11,61	1,17
B a l i	52,98	28,35	14,43	4,24
Nusa Tenggara Barat	24,58	51,39	22,06	1,97
Nusa Tenggara Timur	13,13	32,51	51,30	3,06
Kalimantan Barat	38,93	12,25	12,02	36,80
Kalimantan Tengah	40,36	19,58	20,41	19,65
Kalimantan Selatan	42,39	21,23	18,61	17,77
Kalimantan Timur	60,59	20,32	11,40	7,69
Sulawesi Utara	45,48	28,33	22,52	3,67
Gorontalo	31,67	41,81	20,39	6,13
Sulawesi Tengah	47,92	25,57	19,94	6,57
Sulawesi Selatan	41,19	40,71	15,51	2,58
Sulawesi Barat	39,78	29,53	23,29	7,40
Sulawesi Tenggara	38,68	37,53	22,44	1,36
Maluku	18,78	27,91	50,71	2,60
Maluku Utara	33,52	30,82	32,46	3,19
Papua	25,48	22,53	33,68	18,31
Papua Barat	40,50	25,31	26,30	7,89
<b>Indonesia</b>	<b>51,95</b>	<b>27,43</b>	<b>15,91</b>	<b>4,71</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan			
	Sendiri	Bersama	Umum	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	71,92	15,20	10,46	2,42
Sumatera Utara	64,87	14,58	16,09	4,46
Sumatera Barat	60,69	22,22	12,96	4,13
R i a u	72,22	12,71	4,27	10,80
Kepulauan Riau	63,30	19,53	16,50	0,67
J a m b i	63,97	17,75	6,88	11,40
Sumatera Selatan	58,64	24,93	9,38	7,05
Kep. Bangka Belitung	43,38	37,57	16,81	2,23
Bengkulu	71,59	20,80	6,56	1,06
Lampung	69,30	23,77	5,01	1,93
DKI Jakarta	79,64	18,55	1,32	0,49
Jawa Barat	61,56	24,90	12,39	1,15
Banten	63,04	22,97	12,24	1,75
Jawa Tengah	64,56	25,97	7,95	1,53
DI Yogyakarta	62,58	34,19	1,97	1,27
Jawa Timur	60,76	29,71	8,33	1,20
B a l i	55,01	29,66	12,41	2,91
Nusa Tenggara Barat	30,10	49,57	18,34	1,99
Nusa Tenggara Timur	18,89	33,99	44,30	2,82
Kalimantan Barat	39,68	10,77	9,60	39,95
Kalimantan Tengah	46,96	19,43	17,12	16,50
Kalimantan Selatan	52,79	20,93	13,16	13,12
Kalimantan Timur	68,53	18,06	7,90	5,51
Sulawesi Utara	47,54	29,86	18,41	4,19
Gorontalo	36,66	41,31	17,13	4,90
Sulawesi Tengah	50,91	25,11	18,08	5,90
Sulawesi Selatan	46,02	38,20	13,55	2,23
Sulawesi Barat	40,59	30,68	22,37	6,36
Sulawesi Tenggara	41,72	37,48	19,63	1,17
Maluku	24,79	29,89	43,31	2,01
Maluku Utara	40,33	30,60	26,54	2,53
Papua	31,15	22,36	30,52	15,96
Papua Barat	41,62	27,46	23,12	7,80
<b>Indonesia</b>	<b>58,68</b>	<b>25,92</b>	<b>11,74</b>	<b>3,65</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.16 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Tidak Ada Fasilitas Tempat Buang Air Besar , 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,02	0,59	2,00
Sumatera Utara	0,57	0,33	1,35
Sumatera Barat	0,04	0,63	1,55
R i a u	7,63	8,65	10,18
Kepulauan Riau	0,60	0,13	0,52
J a m b i	14,69	7,14	12,02
Sumatera Selatan	0,92	2,56	2,02
Kep. Bangka Belitung	0,00	0,83	1,58
Bengkulu	0,00	0,17	1,01
Lampung	0,28	0,20	1,76
DKI Jakarta	0,35	0,08	0,49
Jawa Barat	0,03	0,04	0,72
Banten	0,11	0,10	0,80
Jawa Tengah	0,10	0,07	1,57
DI Yogyakarta	0,00	0,00	0,15
Jawa Timur	0,28	0,17	1,25
B a l i	0,00	0,62	1,32
Nusa Tenggara Barat	0,00	0,25	2,02
Nusa Tenggara Timur	0,37	0,56	1,63
Kalimantan Barat	62,04	58,17	50,47
Kalimantan Tengah	4,38	3,66	6,02
Kalimantan Selatan	3,53	4,13	5,01
Kalimantan Timur	4,04	1,19	3,13
Sulawesi Utara	0,43	0,64	5,23
Gorontalo	0,00	0,40	2,20
Sulawesi Tengah	0,00	0,17	2,42
Sulawesi Selatan	0,49	0,48	1,10
Sulawesi Barat	5,21	0,67	0,75
Sulawesi Tenggara	0,36	0,49	0,50
Maluku	0,14	0,16	0,86
Maluku Utara	0,14	0,03	0,15
Papua	0,00	2,41	1,07
Papua Barat	1,47	1,23	7,40
<b>Indonesia</b>	<b>1,34</b>	<b>1,16</b>	<b>2,03</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.17 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Tidak Ada Fasilitas Tempat Buang Air Besar , 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1,19	0,83	2,50
Sumatera Utara	4,34	3,31	6,33
Sumatera Barat	2,95	1,99	5,30
R i a u	7,04	8,23	10,99
Kepulauan Riau	0,26	0,00	0,89
J a m b i	11,38	14,08	11,21
Sumatera Selatan	10,57	5,26	8,79
Kep. Bangka Belitung	0,38	0,08	2,56
Bengkulu	1,16	0,95	1,07
Lampung	1,56	0,99	1,96
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	0,26	0,59	1,72
Banten	2,54	3,15	2,83
Jawa Tengah	0,20	0,38	1,49
DI Yogyakarta	2,19	1,23	3,24
Jawa Timur	0,26	0,19	1,17
B a l i	1,01	3,05	4,24
Nusa Tenggara Barat	0,35	0,43	1,97
Nusa Tenggara Timur	1,86	1,97	3,06
Kalimantan Barat	53,56	37,02	36,80
Kalimantan Tengah	24,80	16,23	19,65
Kalimantan Selatan	20,28	23,93	17,77
Kalimantan Timur	10,38	10,29	7,69
Sulawesi Utara	0,68	0,36	3,67
Gorontalo	1,57	2,74	6,13
Sulawesi Tengah	2,18	2,32	6,57
Sulawesi Selatan	0,90	1,29	2,58
Sulawesi Barat	2,25	3,85	7,40
Sulawesi Tenggara	0,80	0,93	1,36
Maluku	0,55	0,93	2,60
Maluku Utara	2,42	1,40	3,19
Papua	6,09	4,90	18,31
Papua Barat	13,73	10,61	7,89
<b>Indonesia</b>	<b>3,86</b>	<b>3,21</b>	<b>4,71</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.18 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Tidak Ada Fasilitas Tempat Buang Air Besar , 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,96	0,79	2,42
Sumatera Utara	2,76	2,11	4,46
Sumatera Barat	2,05	1,54	4,13
R i a u	7,27	8,34	10,80
Kepulauan Riau	0,38	0,08	0,67
J a m b i	12,31	12,29	11,40
Sumatera Selatan	7,58	4,56	7,05
Kep. Bangka Belitung	0,23	0,39	2,23
Bengkulu	0,78	0,75	1,06
Lampung	1,27	0,84	1,93
DKI Jakarta	0,35	0,08	0,49
Jawa Barat	0,14	0,28	1,15
Banten	1,28	1,48	1,75
Jawa Tengah	0,15	0,25	1,53
DI Yogyakarta	0,81	0,47	1,27
Jawa Timur	0,27	0,19	1,20
B a l i	0,53	1,96	2,91
Nusa Tenggara Barat	0,21	0,36	1,99
Nusa Tenggara Timur	1,62	1,72	2,82
Kalimantan Barat	55,63	42,15	39,95
Kalimantan Tengah	18,82	12,87	16,50
Kalimantan Selatan	14,08	16,99	13,12
Kalimantan Timur	6,82	5,74	5,51
Sulawesi Utara	0,60	0,46	4,19
Gorontalo	1,09	2,00	4,90
Sulawesi Tengah	1,82	1,95	5,90
Sulawesi Selatan	0,79	1,09	2,23
Sulawesi Barat	3,12	3,26	6,36
Sulawesi Tenggara	0,71	0,83	1,17
Maluku	0,45	0,67	2,01
Maluku Utara	1,78	1,06	2,53
Papua	5,11	4,49	15,96
Papua Barat	10,79	8,83	7,80
<b>Indonesia</b>	<b>2,80</b>	<b>2,38</b>	<b>3,65</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.19 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2011**

Provinsi	Tangki/ SPAL	Kolam/ Sawah	Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	Perkotaan	
					Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	84,23	0,55	5,08	6,49	2,70	0,94
Sumatera Utara	82,98	0,32	5,44	9,50	0,60	1,16
Sumatera Barat	69,54	8,32	12,64	6,43	0,33	2,73
R i a u	88,24	0,82	2,27	7,41	0,88	0,38
Kepulauan Riau	90,84	0,30	3,17	3,10	1,39	1,20
J a m b i	76,46	1,69	8,95	9,60	1,19	2,10
Sumatera Selatan	80,10	1,59	10,18	6,85	0,33	0,96
Kep. Bangka Belitung	90,12	0,22	1,33	1,82	5,47	1,04
Bengkulu	69,70	0,61	4,61	22,92	0,14	2,02
Lampung	81,82	1,14	6,47	9,38	0,43	0,76
DKI Jakarta	93,90	0,34	2,84	2,09	0,03	0,79
Jawa Barat	66,04	6,85	19,06	6,75	0,51	0,80
Banten	83,95	5,78	3,11	3,06	3,78	0,33
Jawa Tengah	75,57	2,03	14,82	6,31	0,74	0,52
DI Yogyakarta	91,19	0,76	5,61	2,16		0,28
Jawa Timur	75,79	0,53	14,04	8,48	0,96	0,20
B a l i	93,50	0,25	2,77	1,03	2,34	0,11
Nusa Tenggara Barat	67,65	0,77	19,61	4,53	7,13	0,31
Nusa Tenggara Timur	53,03	0,28	0,30	44,95	1,33	0,10
Kalimantan Barat	81,24	0,67	4,99	10,88	1,61	0,61
Kalimantan Tengah	68,59	0,11	13,11	17,26	0,75	0,19
Kalimantan Selatan	73,07	0,25	18,94	7,42	0,32	
Kalimantan Timur	88,30	0,12	5,42	5,75	0,29	0,12
Sulawesi Utara	85,52	0,43	3,73	7,69	1,41	1,22
Gorontalo	85,36	0,18	8,15	1,14	4,13	1,04
Sulawesi Tengah	83,48	0,37	11,45	2,18	1,83	0,67
Sulawesi Selatan	90,74	0,71	3,33	2,90	1,93	0,39
Sulawesi Barat	78,10	0,74	8,28	2,94	9,28	0,65
Sulawesi Tenggara	88,57	0,21	2,28	3,37	5,43	0,13
Maluku	80,90	0,29	3,96	2,77	11,48	0,61
Maluku Utara	94,05		2,55	1,72	1,42	0,27
Papua	82,99	0,57	4,14	9,09	1,35	1,86
Papua Barat	84,09	1,38	5,03	3,86	5,43	0,22
<b>Indonesia</b>	<b>77,61</b>	<b>2,68</b>	<b>11,45</b>	<b>6,50</b>	<b>1,13</b>	<b>0,63</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.20 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2011**

Provinsi	Perdesaan					
	Tangki/ SPAL	Kolam/ Sawah	Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	48,16	1,40	21,88	15,53	10,33	2,70
Sumatera Utara	46,97	1,32	18,94	21,03	8,24	3,49
Sumatera Barat	32,82	15,91	37,64	10,49	1,51	1,63
R i a u	38,33	1,31	14,20	37,98	7,12	1,06
Kepulauan Riau	47,14	1,03	27,43	10,01	14,03	0,38
J a m b i	41,85	1,01	31,31	21,84	3,46	0,53
Sumatera Selatan	39,95	2,13	27,95	26,46	2,82	0,69
Kep. Bangka Belitung	57,52	0,22	3,95	6,62	30,03	1,68
Bengkulu	30,08	1,52	29,19	34,80	2,32	2,09
Lampung	38,32	4,26	8,30	45,77	2,55	0,79
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	44,39	22,05	18,62	12,40	1,83	0,70
Banten	32,72	7,10	19,78	9,66	29,23	1,51
Jawa Tengah	51,51	7,22	20,12	18,63	2,14	0,38
DI Yogyakarta	67,41	1,17	2,30	29,03	0,10	
Jawa Timur	41,76	1,28	23,86	27,73	4,71	0,65
B a l i	71,97	0,09	6,94	2,06	18,50	0,44
Nusa Tenggara Barat	44,67	1,30	24,24	4,68	23,97	1,15
Nusa Tenggara Timur	22,07	0,31	0,86	50,60	23,84	2,32
Kalimantan Barat	31,48	1,70	25,96	25,04	12,55	3,26
Kalimantan Tengah	21,22	0,27	56,19	20,28	1,35	0,69
Kalimantan Selatan	36,88	0,44	37,68	22,88	1,78	0,33
Kalimantan Timur	47,04	0,53	24,29	23,11	4,60	0,44
Sulawesi Utara	61,21	0,19	14,40	15,34	6,92	1,94
Gorontalo	43,53	0,85	23,75	4,10	27,48	0,30
Sulawesi Tengah	47,46	1,11	22,23	9,12	17,63	2,47
Sulawesi Selatan	54,82	1,70	9,97	13,43	18,77	1,31
Sulawesi Barat	38,70	0,46	27,37	12,47	20,15	0,85
Sulawesi Tenggara	43,94	0,41	10,30	20,67	23,34	1,34
Maluku	49,41	0,29	8,26	9,49	31,80	0,75
Maluku Utara	59,92	0,57	11,98	4,97	20,82	1,74
Papua	11,10	0,69	7,03	38,17	31,92	11,08
Papua Barat	54,55	1,28	12,23	20,61	10,40	0,92
<b>Indonesia</b>	<b>43,35</b>	<b>5,51</b>	<b>20,12</b>	<b>21,71</b>	<b>8,04</b>	<b>1,27</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011



**Tabel 3.21 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					
	Tangki/ SPAL	Kolam/ Sawah	Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	58,33	1,16	17,14	12,98	8,18	2,20
Sumatera Utara	64,13	0,84	12,51	15,54	4,60	2,38
Sumatera Barat	46,87	13,01	28,08	8,94	1,06	2,05
R i a u	57,50	1,12	9,62	26,24	4,72	0,80
Kepulauan Riau	83,35	0,43	7,32	4,29	3,55	1,06
J a m b i	52,02	1,21	24,74	18,24	2,79	0,99
Sumatera Selatan	53,67	1,95	21,87	19,76	1,97	0,78
Kep. Bangka Belitung	73,41	0,22	2,67	4,28	18,05	1,37
Bengkulu	41,96	1,25	21,82	31,24	1,67	2,07
Lampung	48,92	3,50	7,86	36,90	2,04	0,78
DKI Jakarta	93,90	0,34	2,84	2,09	0,03	0,79
Jawa Barat	58,30	12,28	18,90	8,77	0,98	0,77
Banten	67,12	6,21	8,58	5,23	12,14	0,72
Jawa Tengah	62,39	4,87	17,73	13,06	1,51	0,44
DI Yogyakarta	83,82	0,89	4,58	10,48	0,03	0,19
Jawa Timur	57,73	0,93	19,25	18,70	2,95	0,44
B a l i	85,15	0,19	4,38	1,43	8,60	0,24
Nusa Tenggara Barat	54,05	1,08	22,35	4,62	17,09	0,81
Nusa Tenggara Timur	28,05	0,30	0,76	49,51	19,50	1,89
Kalimantan Barat	45,92	1,40	19,88	20,93	9,38	2,49
Kalimantan Tengah	36,81	0,21	42,01	19,28	1,15	0,53
Kalimantan Selatan	51,91	0,36	29,90	16,46	1,17	0,19
Kalimantan Timur	72,60	0,27	12,60	12,36	1,93	0,24
Sulawesi Utara	72,26	0,30	9,55	11,86	4,42	1,61
Gorontalo	58,18	0,62	18,28	3,06	19,30	0,56
Sulawesi Tengah	55,99	0,93	19,67	7,47	13,89	2,04
Sulawesi Selatan	67,79	1,34	7,57	9,63	12,69	0,98
Sulawesi Barat	47,28	0,52	23,21	10,40	17,79	0,81
Sulawesi Tenggara	55,95	0,36	8,14	16,01	18,52	1,02
Maluku	61,43	0,29	6,62	6,93	24,04	0,70
Maluku Utara	68,86	0,42	9,51	4,12	15,74	1,36
Papua	28,42	0,66	6,34	31,16	24,56	8,86
Papua Barat	63,05	1,31	10,15	15,79	8,97	0,72
<b>Indonesia</b>	<b>60,33</b>	<b>4,11</b>	<b>15,83</b>	<b>14,17</b>	<b>4,61</b>	<b>0,95</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011

**Tabel 3.22 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
	(1)	(2)	(3)
Aceh	15,29	17,26	14,76
Sumatera Utara	20,94	16,79	20,69
Sumatera Barat	11,23	10,45	10,25
R i a u	15,50	11,54	13,72
Kepulauan Riau	13,00	14,88	14,95
J a m b i	22,04	12,50	14,46
Sumatera Selatan	16,52	18,37	18,01
Kep. Bangka Belitung	8,72	5,63	7,56
Bengkulu	13,88	5,66	5,27
Lampung	21,09	14,86	13,48
DKI Jakarta	11,02	8,13	4,03
Jawa Barat	14,10	13,62	13,05
Banten	9,56	5,96	5,87
Jawa Tengah	10,92	9,17	8,02
DI Yogyakarta	7,13	2,77	2,85
Jawa Timur	11,42	13,20	11,15
B a l i	6,04	3,32	2,65
Nusa Tenggara Barat	14,80	6,58	15,15
Nusa Tenggara Timur	24,38	19,44	14,40
Kalimantan Barat	10,29	7,67	9,97
Kalimantan Tengah	20,19	24,55	15,47
Kalimantan Selatan	14,23	18,07	17,74
Kalimantan Timur	12,15	13,05	10,92
Sulawesi Utara	14,62	18,16	5,67
Gorontalo	4,19	3,50	2,58
Sulawesi Tengah	14,86	8,75	7,80
Sulawesi Selatan	8,22	10,02	6,38
Sulawesi Barat	6,49	6,27	3,89
Sulawesi Tenggara	9,26	4,72	5,48
Maluku	17,87	11,39	11,51
Maluku Utara	4,60	8,91	3,03
Papua	33,35	26,63	18,38
Papua Barat	40,40	33,90	37,04
<b>Indonesia</b>	<b>12,95</b>	<b>11,72</b>	<b>10,71</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.23 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
	(1)	(2)	(3)
Aceh	44,64	38,37	28,50
Sumatera Utara	45,70	40,18	39,45
Sumatera Barat	39,63	39,99	30,09
R i a u	47,24	49,03	47,65
Kepulauan Riau	80,10	61,72	43,72
J a m b i	39,77	33,37	35,18
Sumatera Selatan	57,29	55,28	45,99
Kep. Bangka Belitung	17,65	13,64	13,35
Bengkulu	30,14	28,65	29,11
Lampung	44,10	45,42	43,98
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	34,22	32,39	33,77
Banten	19,62	22,00	21,01
Jawa Tengah	29,64	27,09	23,45
DI Yogyakarta	35,77	27,48	27,32
Jawa Timur	40,82	37,65	35,79
B a l i	6,83	9,03	1,96
Nusa Tenggara Barat	14,54	10,28	12,08
Nusa Tenggara Timur	66,25	60,25	58,41
Kalimantan Barat	42,88	39,96	32,57
Kalimantan Tengah	69,94	61,69	62,80
Kalimantan Selatan	40,48	44,21	42,05
Kalimantan Timur	40,77	32,03	39,07
Sulawesi Utara	16,88	11,16	11,87
Gorontalo	7,48	8,37	6,10
Sulawesi Tengah	23,61	21,73	18,08
Sulawesi Selatan	28,96	20,78	19,45
Sulawesi Barat	27,38	21,71	18,83
Sulawesi Tenggara	35,17	32,73	32,16
Maluku	32,26	36,87	20,61
Maluku Utara	23,89	16,71	18,57
Papua	68,69	74,83	73,25
Papua Barat	61,10	33,04	46,60
<b>Indonesia</b>	<b>38,17</b>	<b>35,49</b>	<b>33,46</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.24 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi yang Menggunakan Kloset Selain Leher Angsa, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	34,32	30,88	23,66
Sumatera Utara	32,61	27,21	29,39
Sumatera Barat	27,26	26,30	20,49
R i a u	30,08	33,13	33,48
Kepulauan Riau	42,52	21,53	19,12
J a m b i	33,12	25,87	28,00
Sumatera Selatan	39,43	40,48	34,81
Kep. Bangka Belitung	12,59	8,74	10,01
Bengkulu	23,14	19,80	20,11
Lampung	37,66	37,67	36,10
DKI Jakarta	11,02	8,13	4,03
Jawa Barat	21,61	19,50	19,69
Banten	12,07	8,80	8,99
Jawa Tengah	19,86	18,50	15,93
DI Yogyakarta	16,93	10,63	10,56
Jawa Timur	24,81	25,07	22,93
B a l i	6,32	5,12	2,42
Nusa Tenggara Barat	14,67	8,44	13,64
Nusa Tenggara Timur	57,01	50,18	47,78
Kalimantan Barat	30,85	27,28	24,09
Kalimantan Tengah	49,85	47,90	45,68
Kalimantan Selatan	27,97	31,74	30,91
Kalimantan Timur	22,37	19,72	20,83
Sulawesi Utara	15,77	14,69	8,69
Gorontalo	5,92	6,06	4,36
Sulawesi Tengah	20,98	17,36	14,67
Sulawesi Selatan	20,38	16,17	13,74
Sulawesi Barat	19,30	16,79	14,24
Sulawesi Tenggara	27,37	22,63	22,93
Maluku	26,86	24,13	16,28
Maluku Utara	16,55	14,11	13,48
Papua	56,48	55,89	52,09
Papua Barat	53,96	33,32	43,49
<b>Indonesia</b>	<b>24,31</b>	<b>22,22</b>	<b>20,83</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.25 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	73,03	74,00	75,80
Sumatera Utara	72,88	75,37	72,78
Sumatera Barat	65,73	68,70	67,23
R i a u	75,60	81,98	81,94
Kepulauan Riau	75,43	81,18	80,62
J a m b i	63,53	78,71	75,16
Sumatera Selatan	73,10	73,84	72,43
Kep. Bangka Belitung	77,04	82,44	83,12
Bengkulu	59,16	67,51	68,12
Lampung	57,60	72,81	74,43
DKI Jakarta	80,37	84,57	87,83
Jawa Barat	62,12	65,15	60,84
Banten	77,03	79,30	81,30
Jawa Tengah	67,20	70,99	72,51
DI Yogyakarta	84,99	89,71	89,35
Jawa Timur	69,51	69,71	71,50
B a l i	85,72	90,09	90,73
Nusa Tenggara Barat	49,51	56,92	58,08
Nusa Tenggara Timur	35,43	56,35	48,92
Kalimantan Barat	81,23	84,76	77,86
Kalimantan Tengah	56,13	63,98	64,59
Kalimantan Selatan	64,31	72,56	70,70
Kalimantan Timur	75,69	80,83	82,10
Sulawesi Utara	78,84	71,73	82,37
Gorontalo	73,17	68,16	74,16
Sulawesi Tengah	70,41	77,40	75,01
Sulawesi Selatan	85,38	80,47	84,41
Sulawesi Barat	66,59	68,37	72,38
Sulawesi Tenggara	78,87	82,75	84,09
Maluku	70,50	75,15	72,59
Maluku Utara	85,50	81,98	89,47
Papua	54,03	66,01	73,36
Papua Barat	56,05	58,31	56,61
<b>Indonesia</b>	<b>69,51</b>	<b>72,78</b>	<b>72,54</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.26 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2009-2011**

Provinsi	Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	29,96	34,00	40,01
Sumatera Utara	34,09	39,83	41,64
Sumatera Barat	25,19	29,06	30,69
R i a u	29,96	36,70	35,42
Kepulauan Riau	12,24	27,46	36,22
J a m b i	30,48	40,60	40,45
Sumatera Selatan	22,71	28,94	34,35
Kep. Bangka Belitung	45,51	47,59	52,91
Bengkulu	21,55	30,26	26,84
Lampung	31,71	34,61	34,63
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	38,47	38,39	37,48
Banten	30,10	29,26	29,09
Jawa Tengah	41,76	47,13	48,63
DI Yogyakarta	56,26	64,98	66,09
Jawa Timur	33,63	38,47	38,92
B a l i	62,60	61,65	71,45
Nusa Tenggara Barat	32,86	40,61	39,93
Nusa Tenggara Timur	10,80	18,94	17,82
Kalimantan Barat	24,77	28,76	29,89
Kalimantan Tengah	10,11	20,52	18,57
Kalimantan Selatan	25,05	32,06	32,52
Kalimantan Timur	30,69	47,80	41,27
Sulawesi Utara	51,89	59,09	54,62
Gorontalo	30,31	33,83	31,88
Sulawesi Tengah	34,49	38,85	40,13
Sulawesi Selatan	44,18	50,79	49,36
Sulawesi Barat	35,13	33,52	35,33
Sulawesi Tenggara	35,98	38,70	39,40
Maluku	27,27	31,17	37,27
Maluku Utara	25,39	42,19	39,42
Papua	12,45	9,61	8,73
Papua Barat	22,89	43,71	32,20
<b>Indonesia</b>	<b>33,96</b>	<b>38,50</b>	<b>38,97</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

**Tabel 3.27 Persentase Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Akses Terhadap Sanitasi Layak, 2009-2011**

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	2009	2010	2011
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	42,03	45,17	50,10
Sumatera Utara	51,92	57,10	56,47
Sumatera Barat	39,21	44,26	44,67
R i a u	52,75	54,27	53,29
Kepulauan Riau	45,78	72,37	73,01
J a m b i	40,93	51,98	50,65
Sumatera Selatan	41,48	44,36	47,36
Kep. Bangka Belitung	60,66	65,06	67,64
Bengkulu	34,66	41,64	39,22
Lampung	38,43	43,85	44,33
DKI Jakarta	80,37	84,57	87,83
Jawa Barat	52,17	55,57	52,50
Banten	58,82	63,78	64,15
Jawa Tengah	54,06	57,76	59,42
DI Yogyakarta	75,35	81,85	82,15
Jawa Timur	51,07	52,96	54,21
B a l i	75,95	79,13	83,26
Nusa Tenggara Barat	39,83	47,43	47,34
Nusa Tenggara Timur	14,98	26,23	23,82
Kalimantan Barat	40,12	45,32	43,81
Kalimantan Tengah	25,78	35,14	33,72
Kalimantan Selatan	41,16	48,95	48,38
Kalimantan Timur	58,48	68,37	66,56
Sulawesi Utara	63,59	64,87	67,23
Gorontalo	43,84	45,66	46,68
Sulawesi Tengah	42,02	48,25	48,39
Sulawesi Selatan	57,58	61,45	62,02
Sulawesi Barat	45,35	41,30	43,40
Sulawesi Tenggara	45,91	50,87	51,43
Maluku	38,69	48,28	50,75
Maluku Utara	43,18	53,26	52,53
Papua	21,65	23,97	24,31
Papua Barat	32,63	48,05	39,23
<b>Indonesia</b>	<b>51,19</b>	<b>55,54</b>	<b>55,60</b>

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional 2009-2011

<http://www.bps.go.id>





## **KESEHATAN LINGKUNGAN**

<http://www.kips.go.id>



## **4** Kesehatan Lingkungan

Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologis yang dinamis antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya realitas hidup manusia yang sehat, sejahtera dan bahagia. Salah satu kebutuhan penting akan kesehatan lingkungan adalah masalah air bersih serta persampahan dan sanitasi. Masalah air bersih yaitu kebutuhan masyarakat akan air bersih, sedangkan masalah persampahan dan sanitasi yaitu pengelolaan sampah yang setiap hari diproduksi oleh masyarakat serta pembuangan air limbah yang langsung dialirkan pada saluran/sungai.

Pada bab ini akan diulas mengenai kesehatan perumahan, kualitas lingkungan dan penyakit akibat sanitasi yang kurang baik. Untuk sub bab kesehatan perumahan dan sub bab kualitas lingkungan terdapat sedikit perbedaan dengan publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan 2009. Hal ini dikarenakan ditiadakannya Modul Perumahan 2010, sehingga tidak ada perbaruan beberapa data dari publikasi sebelumnya.

### **4.1. Kesehatan Perumahan**

Rumah sehat mendukung terciptanya lingkungan yang sehat. Rumah yang sehat dan layak huni tidak harus berwujud rumah mewah dan layak dihuni. Rumah sehat adalah kondisi fisik, kimia, biologi di dalam rumah dan perumahan sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal.

#### **4.1.1. Rumah Tangga Kumuh**

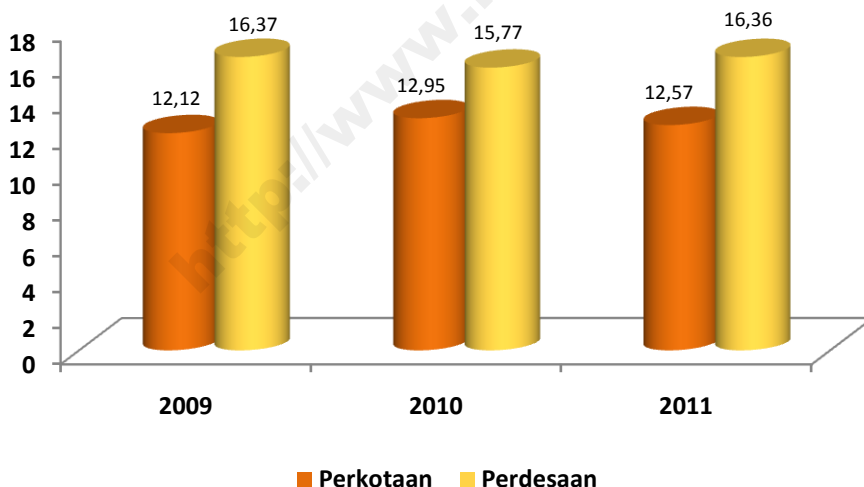
Indikator rumah tangga kumuh merupakan indikator komposit yang terbentuk dari beberapa indikator penyusun. Rumah tangga kumuh dihitung dari indikator air minum layak, sanitasi layak, kecukupan luas lantai hunian dan kualitas perumahan, yaitu dengan rumusan :

$$\text{Rumah tangga kumuh} = \frac{\text{Banyaknya ruma h tangga dengan kategori "X"}}{\text{Banyaknya ruma h tangga}} \times 100\%$$

"X" = (air minum tidak layak dengan bobot 15 %) + (sanitasi tidak layak dengan bobot 15 %) + (*sufficient living area* ≤ 7,2 dengan bobot 35 %) + (*durability of housing* ≥ 2 kriteria dengan bobot 35 %)

Suatu rumah tangga dinyatakan sebagai rumah tangga kumuh apabila nilai hasil penghitungan indikator komposit rumah tangga lebih dari 35 persen. Adapun gambaran mengenai rumah tangga kumuh di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.1. Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Tipe Daerah di Indonesia, 2009-2011**



Sumber: BPS, Susenas 2009-2011

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat besarnya persentase rumah tangga kumuh di daerah perdesaan (16,36 persen) lebih tinggi daripada di daerah perkotaan (12,57 persen). Dalam kurun waktu tiga tahun, besarnya persentase rumah tangga kumuh

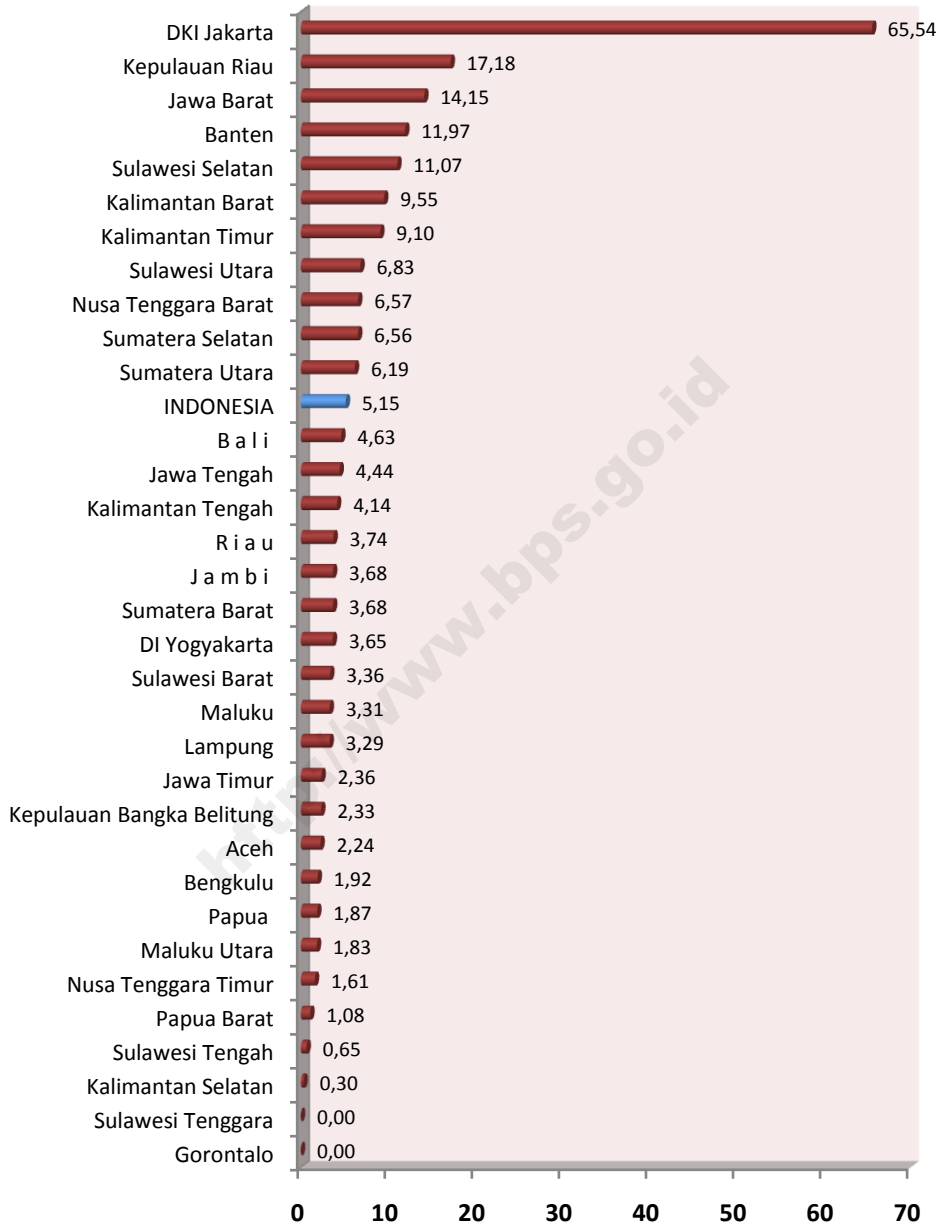
berfluktuasi dari tahun ke tahun. Akan tetapi besarnya perubahan setiap tahunnya tidak signifikan.

#### **4.1.2. Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas (memburuk), baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya. Ciri permukiman kumuh di antaranya tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu, tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah. Data permukiman kumuh yang digunakan dalam publikasi ini adalah data Podes (potensi desa) 2008, dimana unit analisis yang digunakan adalah desa/kelurahan. Hal ini berbeda dengan data Susenas yang unit analisisnya rumah tangga.

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa 5,15 persen desa di Indonesia memiliki permukiman kumuh yang tersebar di beberapa provinsi. Provinsi dengan persentase desa yang memiliki permukiman kumuh tertinggi adalah DKI Jakarta (65,54 persen). Diikuti oleh Provinsi Kepulauan Riau (17,18 persen) dan Provinsi Jawa Barat (14,15 persen). Sedangkan provinsi dengan persentase desa yang memiliki permukiman kumuh terendah adalah Provinsi Gorontalo (0,00 persen) dan Sulawesi Tenggara (0,00 persen) yang artinya tidak ada desa yang memiliki permukiman kumuh di kedua provinsi tersebut.

**Gambar 4.2. Persentase Desa yang Memiliki Permukiman Kumuh Menurut Provinsi di Indonesia, 2008**



Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan proporsi desa yang memiliki permukiman kumuh di daerah pesisir dan bukan pesisir, dilakukan uji beda proporsi dua populasi menggunakan *independent sample t-test*. Hipotesis yang digunakan dalam uji tersebut adalah  $H_0 : p_1=p_2$  dan  $H_1 : p_1 \neq p_2$ . Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,111 yang artinya tidak tolak  $H_0$  (lihat Tabel Lampiran 4.5). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara proporsi desa yang memiliki permukiman kumuh di daerah pesisir dan bukan pesisir. Dengan kata lain kategori daerah tidak memengaruhi perbedaan proporsi desa yang memiliki permukiman kumuh.

## **4.2. Kualitas Lingkungan**

Lingkungan yang berkualitas adalah lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Terwujudnya lingkungan yang berkualitas tidak terlepas dari peranan pemerintah dan tentunya masyarakat. Pemerintah berperan dalam menyediakan sarana kebersihan. Sementara itu, masyarakat juga sangat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

### **4.2.1. Sarana Kebersihan Lingkungan**

Sarana kebersihan merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang terciptanya lingkungan yang berkualitas. Sarana kebersihan merupakan salah satu tugas pemerintah, dalam hal ini dinas kebersihan untuk mengadakan peralatan dan perlengkapan sarana kebersihan. Adapun sarana kebersihan yang akan diulas pada publikasi ini adalah jumlah truk sampah, gerobak sampah dan tempat penampungan sementara (TPS).

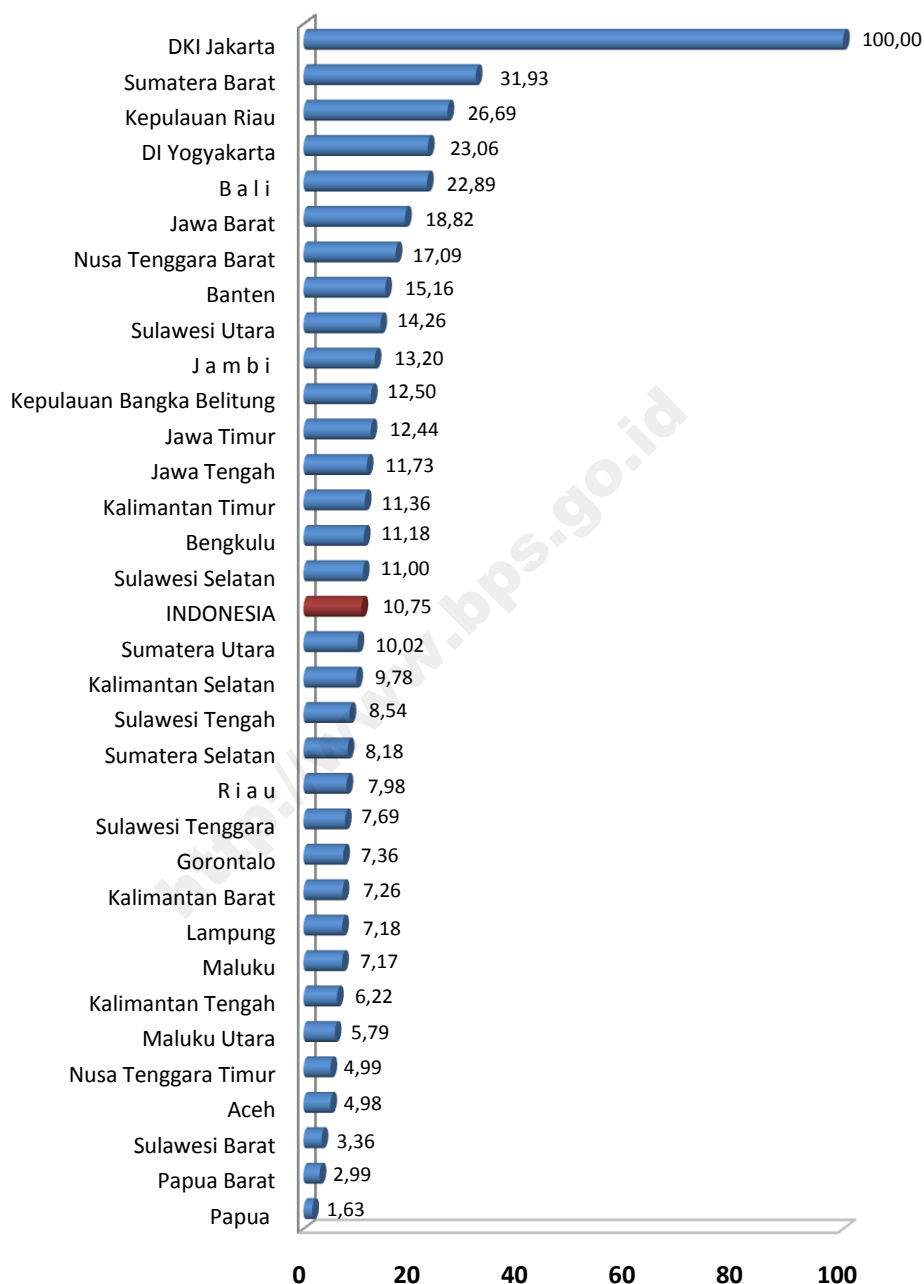
Data mengenai sarana kebersihan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait di beberapa kota dalam hal ini dinas kebersihan. Tidak semua dinas kebersihan dapat menyediakan data tersebut, oleh karenanya data sarana kebersihan menurut kota tahun 2010 hanya terdiri dari 26 kota yang merupakan ibukota 26 provinsi di Indonesia.

Dari Tabel lampiran 4.6 dapat diketahui bahwa data sarana kebersihan untuk Kota Pekanbaru, Palembang, DKI Jakarta, Bandung, Kupang, Banjarmasin dan Gorontalo tidak tersedia. Dari data 26 kota di Indonesia, kota dengan jumlah truk sampah paling banyak adalah Kota Makassar yaitu 160 buah, sedangkan Kota Tanjung Pinang adalah kota dengan jumlah truk sampah paling sedikit yaitu sembilan buah truk sampah. Kota dengan jumlah gerobak sampah paling banyak adalah Kota Medan yaitu 635 buah, sedangkan yang paling sedikit adalah Kota Mamuju dengan sembilan gerobak sampah. Sementara kota dengan jumlah TPS terbanyak adalah Kota Kendari dengan 1.486 TPS, sedangkan paling sedikit adalah Kota Manokwari dengan tiga TPS.

Tempat penampungan sementara digunakan untuk menampung sampah sementara waktu sebelum diangkut oleh petugas kebersihan. Keberadaan tempat penampungan sementara sangat berperan dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Oleh karenanya, keberadaan TPS seharusnya dalam jumlah dan kualitas yang baik. Dari Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa semua provinsi di Indonesia memiliki TPS, akan tetapi tidak semua desa di setiap provinsi memiliki TPS. Di seluruh Indonesia, hanya 10,75 persen desa yang memiliki TPS dan hanya Provinsi DKI Jakarta yang seluruh desanya memiliki TPS. Sementara itu, provinsi dengan persentase desa yang memiliki TPS tertinggi setelah DKI Jakarta adalah Sumatera Barat (31,93 persen) dan Kepulauan Riau (26,69 persen). Sedangkan provinsi dengan persentase desa yang memiliki TPS terendah adalah Provinsi Papua (1,63 persen).



**Gambar 4.3. Persentase Desa yang Memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Menurut Provinsi di Indonesia, 2008**



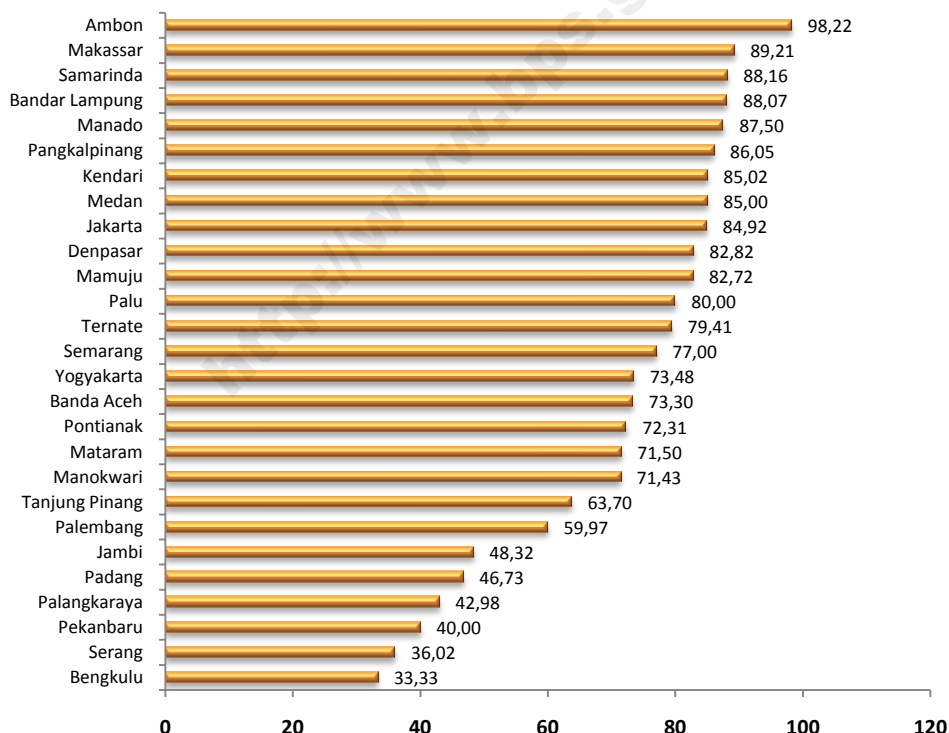
Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

#### 4.2.2. Pencemaran Limbah Padat

Limbah padat adalah segala sesuatu yang tidak terpakai dan berbentuk padat atau setengah padat. Limbah padat dapat berupa campuran berbagai bahan, baik yang tidak berbahaya (sisa makanan) maupun berbahaya (limbah bahan berbahaya dan beracun dari industri). Salah satu contoh limbah padat adalah sampah rumah tangga.

Sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga jumlahnya cukup besar. Oleh karenanya, sampah tersebut harus dapat ditanggulangi dengan baik, supaya tidak mencemari lingkungan dan menimbulkan berbagai penyakit. Pada kenyataannya, tidak semua sampah rumah tangga dapat ditanggulangi dengan baik.

**Gambar 4.4. Persentase Sampah yang Tertanggulangi Menurut Kota di Indonesia, 2010**

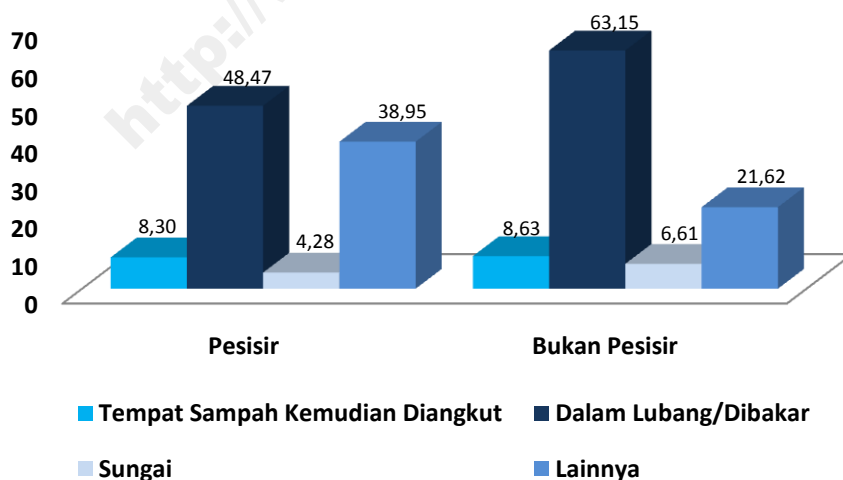


Sumber: BPS, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2011

Dari Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa kota dengan persentase sampah tertanggulangi tertinggi adalah Kota Ambon dimana 98,22 persen sampah dapat tertanggulangi. Sedangkan yang terendah adalah Kota Bengkulu dimana hanya 33,33 persen sampah yang dapat tertanggulangi. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa masih banyak sampah rumah tangga yang belum tertanggulangi dengan baik, yang tentunya akan berakibat buruk bagi sanitasi lingkungan.

Masih banyaknya sampah yang tidak tertanggulangi diantaranya dari sampah yang dibuang ke sungai, dibuang ke dalam lubang/dibakar dan lainnya. Dari Gambar 4.5 dapat dilihat bahwa sebagian besar desa di Indonesia membuang sampah dalam lubang atau dibakar, baik di daerah pesisir (48,47 persen) maupun bukan pesisir (63,15 persen). Sementara itu, desa yang membuang sampah di tempat sampah untuk kemudian diangkut hanya 8,58 persen dari seluruh desa yang ada di Indonesia. Sebagian besar masyarakat di Indonesia masih membuang sampah dengan cara yang kurang tepat, karena tidak membuang sampah di tempat sampah untuk kemudian diangkut.

**Gambar 4.5. Persentase Desa Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah dan Letak Geografis Desa di Indonesia, 2008**



Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

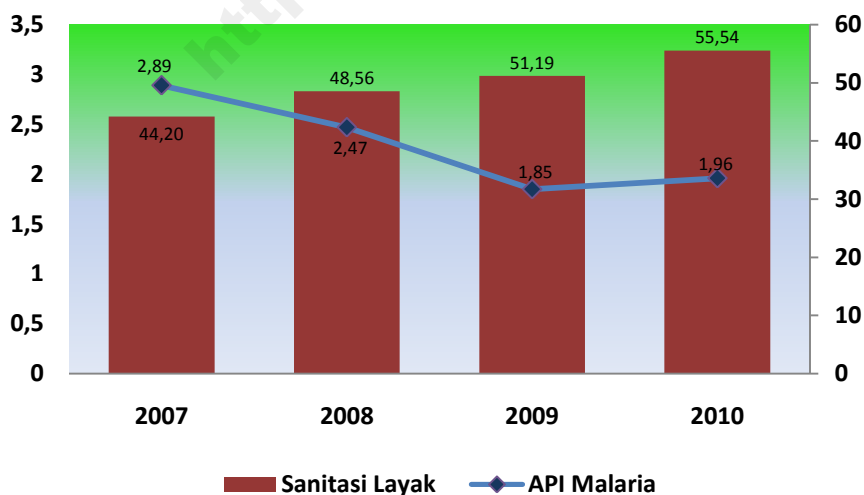
### 4.3. Penyakit Akibat Sanitasi yang Kurang Baik

Kesehatan lingkungan pasti akan memengaruhi kesehatan masyarakat. Lingkungan yang sehat akan menciptakan masyarakat yang sehat pula. Sebaliknya jika lingkungan tidak sehat, kesehatan masyarakat pun kurang baik. Lingkungan yang tidak sehat dapat membuat masyarakat mudah terjangkit penyakit. Berikut ini akan diulas beberapa penyakit akibat sanitasi yang kurang baik.

#### 4.3.1. Penyakit Malaria

Penyakit malaria merupakan salah satu penyakit yang diakibatkan oleh sanitasi lingkungan yang kurang baik. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit dari genus *Plasmodium* yang termasuk golongan *protozoa* melalui perantara gigitan nyamuk *Anopheles spp.* Pengendalian penyakit malaria termasuk salah satu poin dalam *Millenium Development Goals* (MDGs). Penanggulangan penyakit malaria dapat dipantau dengan menggunakan dua indikator yaitu API dan AMI.

**Gambar 4.6. Annual Parasite Incidence (API) Malaria dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak di Indonesia, 2007-2010**



Sumber: Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia 2010

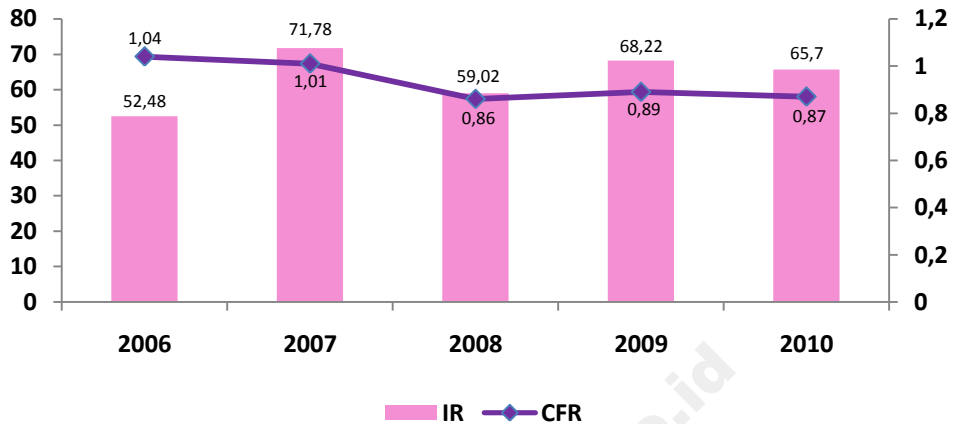
Dari Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa API malaria di Indonesia nilainya terus turun dari tahun 2007 (2,89) hingga tahun 2009 (1,85), akan tetapi mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2010 yaitu menjadi 1,96. API malaria pada tahun 2010 yang sebesar 1,96 memiliki arti bahwa pada tahun 2010 terdapat satu sampai dua kasus malaria per 1000 penduduk di Indonesia. Sementara itu, dapat dilihat juga pada gambar tersebut bahwa semakin tinggi persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak, nilai API malaria semakin menurun. Hal itu menunjukkan adanya hubungan antara sanitasi dan malaria. Di samping itu, dari hasil uji korelasi diperoleh hasil bahwa korelasi antara persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak dan API malaria sebesar  $-0,888$  (Lihat Tabel lampiran 4.12) yang artinya terdapat hubungan yang cukup kuat antara keduanya dan semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak semakin rendah kejadian malaria di Indonesia.

Jika dilihat dari sebaran provinsinya, provinsi dengan API tertinggi adalah Provinsi Papua yaitu 18,03. Hal ini berarti di Provinsi Papua pada tahun 2010 terdapat 18 kasus malaria per 1000 penduduk. Sedangkan API terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu 0 yang artinya tidak terdapat kasus malaria di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2010 (Lihat Tabel Lampiran 4.11)

#### **4.3.2. Penyakit Demam Berdarah**

Demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus *Dengue* dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti*. Indikator yang digunakan untuk mengetahui penyebaran penyakit ini yaitu *Incidence Rate (IR)* dan *Case Fatality Rate (CFR)* demam berdarah. *Incidence Rate* adalah jumlah kasus baru penyakit tertentu yang dilaporkan pada periode waktu dan tempat tertentu dibagi dengan jumlah penduduk dimana penyakit tersebut berjangkit. Sedangkan *Case Fatality Rate* merupakan persentase orang yang didiagnosa dengan penyakit tertentu kemudian meninggal karena penyakit tersebut dalam kurun waktu tertentu.

**Gambar 4.7. Incidence Rate per 100.000 penduduk dan Case Fatality Rate Demam Berdarah di Indonesia, 2006-2010**



Sumber: Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia 2010

Dalam kurun waktu 2006-2010, besarnya IR dan CFR mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2010, IR demam berdarah sebesar 65,7 yang artinya dari 100.000 penduduk terdapat 65 sampai 66 kasus baru demam berdarah. Pada tahun yang sama, besarnya CFR 0,87 yang artinya dari 100.000 penduduk yang terkena penyakit demam berdarah terdapat nol sampai satu orang yang meninggal.

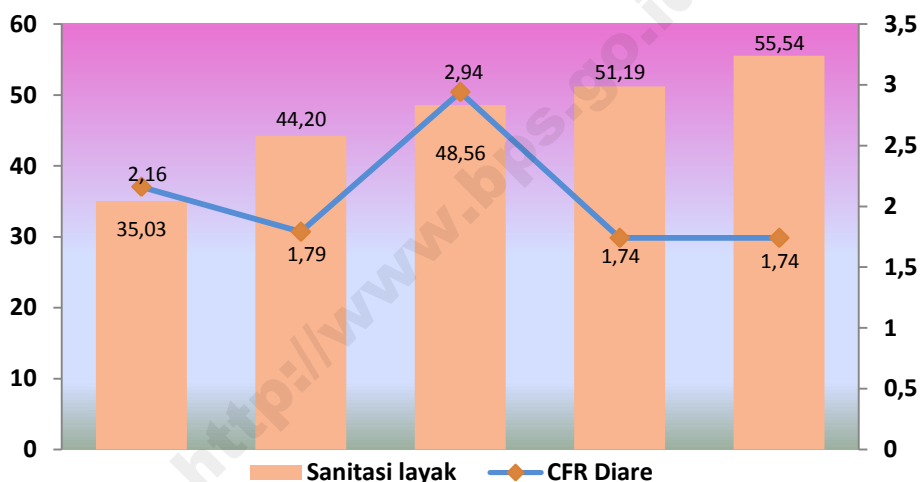
Jika dilihat dari sebaran provinsinya, provinsi dengan nilai IR demam berdarah tertinggi adalah Provinsi Bali yaitu sebesar 337,04 yang artinya dari 100.000 penduduk terdapat 337 kasus baru demam berdarah. Sedangkan provinsi dengan IR demam berdarah terendah adalah Provinsi Maluku yaitu 0,42 yang artinya dari 100.000 penduduk terdapat 0 sampai 1 orang kasus baru demam berdarah.

Sementara itu, provinsi dengan CFR demam berdarah tertinggi adalah Provinsi Maluku yaitu 16,67 yang artinya dari 100.000 penduduk yang terkena demam berdarah, terdapat 16 sampai 17 orang yang meninggal. Sedangkan provinsi dengan CFR demam berdarah yang terendah adalah provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat yaitu 0, yang artinya dari 100.000 penduduk yang terkena penyakit demam berdarah di provinsi tersebut tidak ada yang meninggal (Tabel lampiran 4.13).

### 4.3.3. Penyakit Diare

Diare merupakan salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia, dikarenakan masih tingginya angka kesakitan dan masih menimbulkan kematian khususnya pada bayi dan balita. Diare adalah penyakit yang terjadi ketika terjadi perubahan konsistensi feses selain dari frekuensi buang air besar. Seseorang dikatakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya, atau bila buang air besar tiga kali atau lebih, atau buang air besar yang berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam.

**Gambar 4.8. Case Fatality Rate Diare dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak di Indonesia, 2006-2010**



Sumber: Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia 2010

Sama halnya dengan demam berdarah, penyebaran penyakit diare juga ditunjukkan salah satunya dengan indikator CFR. Dari Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun, besarnya CFR diare di Indonesia berfluktuasi. Pada tahun 2010, CFR diare di Indonesia sebesar 1,74 yang artinya dari 100.000 kasus diare terdapat satu sampai dua orang yang meninggal. Selama kurun waktu tersebut, CFR diare yang tertinggi pada tahun 2008 sebesar 2,94. Sementara itu, jika dilihat dari kedua variabel, persentase rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak selalu meningkat akan tetapi angka CFR diare berfluktuasi setiap tahunnya.

Banyaknya penyakit yang mewabah akibat sanitasi yang buruk seharusnya dapat dihindari dengan memperbaiki sanitasi lingkungan. Hal ini sudah selayaknya menjadi perhatian bersama, baik dari pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan dan untuk memperbaiki sarana sanitasi yang ada baik secara kualitas dan kuantitas. Karena semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sanitasi layak, tentunya akan memperbaiki derajat kesehatan masyarakat di Indonesia.

<http://www.bps.go.id>



**Tabel 4.1. Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi dan Tipe Daerah di Indonesia, Tahun 2011**

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,49	21,19	19,02
Sumatera Utara	11,71	21,80	16,99
Sumatera Barat	10,78	17,40	14,87
R i a u	10,55	14,68	13,10
Kepulauan Riau	16,24	12,41	15,59
J a m b i	7,58	10,16	9,40
Sumatera Selatan	16,13	20,04	18,70
Kepulauan Bangka Belitung	8,34	7,44	7,88
Bengkulu	14,50	18,15	17,06
Lampung	9,07	11,07	10,58
DKI Jakarta	25,23	-	25,23
Jawa Barat	14,24	16,86	15,18
Banten	15,35	25,58	18,71
Jawa Tengah	5,45	7,32	6,48
DI Yogyakarta	4,16	6,46	4,87
Jawa Timur	8,62	10,12	9,41
B a l i	13,89	13,44	13,72
Nusa Tenggara Barat	18,60	23,65	21,59
Nusa Tenggara Timur	24,87	53,79	48,21
Kalimantan Barat	8,09	16,47	14,04
Kalimantan Tengah	13,85	14,41	14,23
Kalimantan Selatan	9,23	11,13	10,34
Kalimantan Timur	10,09	13,02	11,21
Sulawesi Utara	14,46	22,54	18,87
Gorontalo	15,83	30,67	25,47
Sulawesi Tengah	13,76	21,83	19,92
Sulawesi Selatan	11,38	11,54	11,48
Sulawesi Barat	15,66	24,00	22,19
Sulawesi Tenggara	13,92	16,97	16,15
Maluku	19,09	25,94	23,32
Maluku Utara	9,58	20,03	17,29
Papua	26,36	70,28	59,70
Papua Barat	23,97	22,50	22,93
<b>Indonesia</b>	<b>12,57</b>	<b>16,36</b>	<b>14,48</b>

Sumber: BPS, Susenas 2011

**Tabel 4.2. Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Permukiman Kumuh di Indonesia, Tahun 2008**

Pesisir

Provinsi	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)
Aceh	20	658
Sumatera Utara	59	316
Sumatera Barat	10	92
R i a u	27	159
Kepulauan Riau	45	222
J a m b i	5	23
Sumatera Selatan	-	22
Kepulauan Bangka Belitung	3	134
Bengkulu	11	155
Lampung	25	178
DKI Jakarta	6	9
Jawa Barat	43	174
Banten	24	100
Jawa Tengah	62	267
DI Yogyakarta	-	33
Jawa Timur	34	577
B a l i	15	152
Nusa Tenggara Barat	17	224
Nusa Tenggara Timur	20	821
Kalimantan Barat	28	125
Kalimantan Tengah	9	32
Kalimantan Selatan	3	132
Kalimantan Timur	39	140
Sulawesi Utara	64	563
Gorontalo	-	136
Sulawesi Tengah	10	829
Sulawesi Selatan	101	384
Sulawesi Barat	11	111
Sulawesi Tenggara	-	771
Maluku	28	744
Maluku Utara	13	759
Papua	27	447
Papua Barat	11	405
<b>Indonesia</b>	<b>770</b>	<b>9894</b>

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

**Tabel 4.3. Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Permukiman Kumuh di Indonesia, Tahun 2008**

<b>Bukan Pesisir</b>		
<b>Provinsi</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak Ada</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Aceh	124	5622
Sumatera Utara	298	5094
Sumatera Barat	24	798
Riau	33	1385
Kepulauan Riau	11	48
Jambi	43	1232
Sumatera Selatan	202	2855
Kepulauan Bangka Belitung	5	202
Bengkulu	15	1170
Lampung	52	2084
DKI Jakarta	169	83
Jawa Barat	788	4866
Banten	156	1224
Jawa Tengah	319	7926
DI Yogyakarta	16	389
Jawa Timur	167	7727
Bali	18	527
Nusa Tenggara Barat	43	629
Nusa Tenggara Timur	25	1937
Kalimantan Barat	143	1495
Kalimantan Tengah	51	1356
Kalimantan Selatan	3	1836
Kalimantan Timur	90	1148
Sulawesi Utara	38	829
Gorontalo	-	448
Sulawesi Tengah	1	846
Sulawesi Selatan	225	2236
Sulawesi Barat	7	407
Sulawesi Tenggara	-	1257
Maluku	2	132
Maluku Utara	6	258
Papua	35	2802
Papua Barat	2	787
<b>Indonesia</b>	<b>3111</b>	<b>61635</b>

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

**Tabel 4.4. Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Keberadaan Permukiman Kumuh di Indonesia, Tahun 2008**

**Pesisir + Bukan Pesisir**

Provinsi	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)
Aceh	144	6280
Sumatera Utara	357	5410
Sumatera Barat	34	890
R i a u	60	1544
Kepulauan Riau	56	270
J a m b i	48	1255
Sumatera Selatan	202	2877
Kepulauan Bangka Belitung	8	336
Bengkulu	26	1325
Lampung	77	2262
DKI Jakarta	175	92
Jawa Barat	831	5040
Banten	180	1324
Jawa Tengah	381	8193
DI Yogyakarta	16	422
Jawa Timur	201	8304
B a l i	33	679
Nusa Tenggara Barat	60	853
Nusa Tenggara Timur	45	2758
Kalimantan Barat	171	1620
Kalimantan Tengah	60	1388
Kalimantan Selatan	6	1968
Kalimantan Timur	129	1288
Sulawesi Utara	102	1392
Gorontalo	-	584
Sulawesi Tengah	11	1675
Sulawesi Selatan	326	2620
Sulawesi Barat	18	518
Sulawesi Tenggara	-	2028
Maluku	30	876
Maluku Utara	19	1017
Papua	62	3249
Papua Barat	13	1192
<b>Indonesia</b>	<b>3881</b>	<b>71529</b>

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

**Tabel 4.5. Hasil Output SPSS Uji Beda Proporsi Desa yang Memiliki Permukiman Kumuh di Daerah Pesisir dan Bukan Pesisir**

**Group Statistics**

	Klasifikasi desa	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Persentase desa yang memiliki permukiman kumuh	Pesisir	33	10,3024	9,22856	1,60649
	Bukan pesisir	33	6,0982	11,72898	2,04175

**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Persentase desa yang memiliki permukiman kumuh	Equal variances assumed	,836	,364	1,618	64	,111	4,204	2,598	-,98584	9,39433
	Equal variances not assumed			1,618	60,643	,111	4,204	2,598	-,99138	9,39986

**Tabel 4.6. Jumlah Truk Sampah, Gerobak Sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Menurut Kota di Indonesia, Tahun 2010**

Kota	Truk Sampah	Gerobak Sampah	TPS
(1)	(2)	(3)	(4)
Banda Aceh	59	57	58
Medan	154	635	63
Padang	59	52	656
Pekanbaru	-	-	-
Tanjung Pinang	9	150	28
Jambi	31	165	365
Palembang	-	-	-
Pangkal Pinang	-	34	125
Bengkulu	-	10	34
Bandar Lampung	27	48	12
DKI Jakarta	-	-	-
Bandung	-	-	-
Serang	15	35	55
Semarang	-	76	272
Yogyakarta	-	109	65
Surabaya	125	417	163
Denpasar	52	480	46
Mataram	41	325	115
Kupang	-	-	-
Pontianak	34	50	104
Palangkaraya	15	20	186
Banjarmasin	-	-	-
Samarinda	33	125	-
Manado	33	88	-
Gorontalo	-	-	-
Palu	20	25	602
Makassar	160	192	196
Mamuju	10	9	1
Kendari	32	45	1.486
Ambon	21	21	119
Ternate	17	-	120
Jayapura	38	-	37
Manokwari	11	45	3

Sumber: BPS, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2011

**Tabel 4.7. Persentase Desa yang Memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Menurut Provinsi dan Letak Geografis Desa di Indonesia, Tahun 2008**

Provinsi	Pesisir	Bukan Pesisir	Pesisir + Bukan Pesisir
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0,87	4,11	4,98
Sumatera Utara	0,40	9,62	10,02
Sumatera Barat	3,14	28,79	31,93
R i a u	0,62	7,36	7,98
Kepulauan Riau	18,10	8,59	26,9
J a m b i	0,08	13,12	13,20
Sumatera Selatan	0,03	8,15	8,18
Kepulauan Bangka Belitung	6,10	6,40	12,50
Bengkulu	0,96	10,21	11,18
Lampung	0,98	6,20	7,18
DKI Jakarta	5,62	94,38	100,00
Jawa Barat	0,55	18,28	18,82
Banten	1,06	14,10	15,16
Jawa Tengah	0,61	11,13	11,73
DI Yogyakarta	0,46	22,60	23,06
Jawa Timur	0,98	11,46	12,44
B a l i	7,72	15,17	22,89
Nusa Tenggara Barat	3,18	13,91	17,09
Nusa Tenggara Timur	2,18	2,82	4,99
Kalimantan Barat	1,06	6,20	7,26
Kalimantan Tengah	0,07	6,15	6,22
Kalimantan Selatan	0,81	8,97	9,78
Kalimantan Timur	3,11	8,26	11,36
Sulawesi Utara	5,29	8,97	14,26
Gorontalo	0,34	7,02	7,36
Sulawesi Tengah	4,69	3,86	8,54
Sulawesi Selatan	2,14	8,86	11,00
Sulawesi Barat	1,68	1,68	3,36
Sulawesi Tenggara	3,50	4,19	7,69
Maluku	4,53	2,65	7,17
Maluku Utara	4,05	1,74	5,79
Papua	0,33	1,30	1,63
Papua Barat	1,74	1,24	2,99
<b>Indonesia</b>	<b>1,43</b>	<b>9,32</b>	<b>10,75</b>

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa 2008

**Tabel 4.8. Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Indonesia, Tahun 2008**

Pesisir

Provinsi	Tempat Sampah Kemudian Diangkut	Dalam Lubang/ Dibakar	Sungai	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	50	488	26	114
Sumatera Utara	30	131	27	187
Sumatera Barat	21	67	7	7
R i a u	12	145	15	14
Kepulauan Riau	51	139	8	69
J a m b i	-	8	11	9
Sumatera Selatan	-	9	13	-
Kepulauan Bangka Belitung	9	75	2	51
Bengkulu	16	112	4	34
Lampung	17	103	14	69
DKI Jakarta	13	-	-	2
Jawa Barat	16	154	19	28
Banten	5	49	6	64
Jawa Tengah	45	245	8	31
DI Yogyakarta	-	33	-	-
Jawa Timur	74	358	11	168
B a l i	54	42	3	68
Nusa Tenggara Barat	22	79	29	111
Nusa Tenggara Timur	43	450	5	343
Kalimantan Barat	7	106	7	33
Kalimantan Tengah	1	21	15	4
Kalimantan Selatan	11	65	11	48
Kalimantan Timur	44	77	26	32
Sulawesi Utara	80	409	12	126
Gorontalo	5	111	1	19
Sulawesi Tengah	39	420	23	357
Sulawesi Selatan	71	240	38	136
Sulawesi Barat	10	51	3	58
Sulawesi Tenggara	54	328	8	381
Maluku	29	187	26	530
Maluku Utara	32	160	17	563
Papua	9	194	24	247
Papua Barat	15	113	37	251
<b>Indonesia</b>	<b>885</b>	<b>5169</b>	<b>456</b>	<b>4154</b>

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008



**Tabel 4.9. Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Indonesia, Tahun 2008**

<b>Bukan Pesisir</b>				
<b>Provinsi</b>	<b>Tempat Sampah Kemudian Diangkut</b>	<b>Dalam Lubang/ Dibakar</b>	<b>Sungai</b>	<b>Lainnya</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Aceh	232	4537	293	684
Sumatera Utara	510	3312	270	1300
Sumatera Barat	159	531	58	74
R i a u	102	1071	98	147
Kepulauan Riau	25	22	1	11
J a m b i	118	794	201	162
Sumatera Selatan	256	1529	538	734
Kepulauan Bangka Belitung	35	109	-	63
Bengkulu	142	617	81	345
Lampung	110	1546	38	442
DKI Jakarta	250	1	-	1
Jawa Barat	789	3835	257	773
Banten	166	693	43	478
Jawa Tengah	637	6305	173	1130
DI Yogyakarta	56	340	-	9
Jawa Timur	765	6378	77	674
B a l i	104	129	6	306
Nusa Tenggara Barat	102	258	103	209
Nusa Tenggara Timur	45	915	8	994
Kalimantan Barat	81	715	242	600
Kalimantan Tengah	63	686	549	109
Kalimantan Selatan	143	808	416	472
Kalimantan Timur	115	507	454	162
Sulawesi Utara	142	633	19	73
Gorontalo	30	368	5	45
Sulawesi Tengah	36	624	39	148
Sulawesi Selatan	250	1556	61	594
Sulawesi Barat	7	175	20	212
Sulawesi Tenggara	50	885	10	312
Maluku	11	85	7	31
Maluku Utara	20	111	18	115
Papua	24	553	137	2123
Papua Barat	13	256	57	463
<b>Indonesia</b>	<b>5588</b>	<b>40884</b>	<b>4279</b>	<b>13995</b>

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

**Tabel 4.10. Jumlah Desa Menurut Provinsi dan Jenis Tempat Pembuangan Sampah di Indonesia, Tahun 2008**

<b>Pesisir + Bukan Pesisir</b>				
<b>Provinsi</b>	<b>Tempat Sampah Kemudian Diangkut</b>	<b>Dalam Lubang/ Dibakar</b>	<b>Sungai</b>	<b>Lainnya</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Aceh	282	5025	319	798
Sumatera Utara	540	3443	297	1487
Sumatera Barat	180	598	65	81
R i a u	114	1216	113	161
Kepulauan Riau	76	161	9	80
J a m b i	118	802	212	171
Sumatera Selatan	256	1538	551	734
Kepulauan Bangka Belitung	44	184	2	114
Bengkulu	158	729	85	379
Lampung	127	1649	52	511
DKI Jakarta	263	1	-	3
Jawa Barat	805	3989	276	801
Banten	171	742	49	542
Jawa Tengah	682	6550	181	1161
DI Yogyakarta	56	373	-	9
Jawa Timur	839	6736	88	842
B a l i	158	171	9	374
Nusa Tenggara Barat	124	337	132	320
Nusa Tenggara Timur	88	1365	13	1337
Kalimantan Barat	88	821	249	633
Kalimantan Tengah	64	707	564	113
Kalimantan Selatan	154	873	427	520
Kalimantan Timur	159	584	480	194
Sulawesi Utara	222	1042	31	199
Gorontalo	35	479	6	64
Sulawesi Tengah	75	1044	62	505
Sulawesi Selatan	321	1796	99	730
Sulawesi Barat	17	226	23	270
Sulawesi Tenggara	104	1213	18	693
Maluku	40	272	33	561
Maluku Utara	52	271	35	678
Papua	33	747	161	2370
Papua Barat	28	369	94	714
<b>Indonesia</b>	<b>6473</b>	<b>46053</b>	<b>4735</b>	<b>18149</b>

Sumber: BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2008

**Tabel 4.11. Annual Paracite Incidence (API) Malaria Menurut Provinsi, Tahun 2007-2010**

Provinsi	2007	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,94	0,25	0,48	0,54
Sumatera Utara	NA	0,28	0,25	0,61
Sumatera Barat	0,03	0,57	0,41	0,11
R i a u	NA	0,23	0,47	0,24
Kepulauan Riau	1,06	1,34	1,12	0,86
J a m b i	1,21	2,12	1,89	1,64
Sumatera Selatan	0,08	0,54	0,45	0,45
Kepulauan Bangka Belitung	15,89	8,09	7,87	5,06
Bengkulu	1,52	4,70	4,36	4,26
Lampung	0,33	0,33	0,78	0,32
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	0,37	0,58	0,36	0,43
Banten	0,05	0,03	0,14	0,03
Jawa Tengah	0,12	0,07	0,08	0,10
DI Yogyakarta	0,05	0,00	0,30	0,01
Jawa Timur	0,18	0,71	0,47	0,10
B a l i	0,42	0,17	0,02	0,03
Nusa Tenggara Barat	3,47	4,88	1,93	1,81
Nusa Tenggara Timur	30,09	20,35	15,62	12,14
Kalimantan Barat	-	0,65	0,54	0,45
Kalimantan Tengah	-	2,53	1,38	3,48
Kalimantan Selatan	0,49	1,04	1,06	0,79
Kalimantan Timur	2,90	2,04	0,93	0,47
Sulawesi Utara	1,99	3,37	4,57	1,63
Gorontalo	0,43	4,13	0,54	1,71
Sulawesi Tengah	2,01	2,56	1,35	2,08
Sulawesi Selatan	0,08	0,31	0,47	0,35
Sulawesi Barat	0,48	0,28	0,85	0,55
Sulawesi Tenggara	0,52	0,28	0,22	0,46
Maluku	0,85	8,94	7,37	5,43
Maluku Utara	11,25	8,91	8,91	6,45
Papua	41,66	18,35	9,94	18,03
Papua Barat	53,57	46,10	27,66	17,86
<b>Indonesia</b>	<b>2,89</b>	<b>2,47</b>	<b>1,85</b>	<b>1,96</b>

Sumber: Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia 2010

**Tabel 4.12. Hasil Output SPSS Uji Korelasi antara Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses ke Sanitasi Layak dan API malaria**

**Correlations**

		API Malaria	Sanitasi Layak
API Malaria	Pearson Correlation	1	-,888
	Sig. (2-tailed)		,112
	N	4	4
Sanitasi Layak	Pearson Correlation	-,888	1
	Sig. (2-tailed)	,112	
	N	4	4

**Tabel 4.13. Incidence Rate dan Case Fatality Rate Demam Berdarah di Indonesia Tahun 2010**

Provinsi	IR	CFR
(1)	(2)	(3)
Aceh	63,71	0,92
Sumatera Utara	67,25	0,98
Sumatera Barat	38,13	0,28
R i a u	18,27	2,62
Kepulauan Riau	88,37	0,93
J a m b i	5,99	0,56
Sumatera Selatan	16,07	0,43
Kepulauan Bangka Belitung	18,52	4,39
Bengkulu	35,36	2,13
Lampung	25,59	1,63
DKI Jakarta	227,44	0,17
Jawa Barat	59,54	0,66
Banten	55,27	2,15
Jawa Tengah	60,46	1,26
DI Yogyakarta	144,92	0,68
Jawa Timur	68,92	0,90
B a l i	337,04	0,29
Nusa Tenggara Barat	51,02	0,57
Nusa Tenggara Timur	30,60	1,03
Kalimantan Barat	13,86	2,72
Kalimantan Tengah	62,82	0,50
Kalimantan Selatan	29,86	2,91
Kalimantan Timur	167,31	0,75
Sulawesi Utara	87,70	1,91
Gorontalo	46,14	1,71
Sulawesi Tengah	81,80	1,38
Sulawesi Selatan	49,02	0,81
Sulawesi Barat	14,19	0,00
Sulawesi Tenggara	45,28	1,32
Maluku	0,42	16,67
Maluku Utara	33,61	3,46
Papua	15,05	2,96
Papua Barat	52,83	0,00
<b>Indonesia</b>	<b>65,70</b>	<b>0,87</b>

Sumber: Kementerian Kesehatan, Profil Kesehatan Indonesia 2010

<http://www.bps.go.id>



<http://www.bps.go.id>

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

ISSN 2302-5905



9 772302 590503